

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

## TAHUN 2025

### BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Balai Diklat Industri Medan dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai wujud implementasi dari Peraturan tersebut diatas dan pertanggungjawaban atas kegiatan Balai Diklat Industri Medan secara keseluruhan serta menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan untuk tahun anggaran maupun dalam pengambilan keputusan pimpinan ataupun pihak berwenang dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa data yang disajikan dalam laporan ini belum sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk kemajuan bersama dan perbaikan di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini, diucapkan terima kasih.

Medan, 30 Januari 2026

**Kepala Balai Diklat Industri Medan**



**Chairil Almy, ST, M.Si., Ph.D.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL .....	4
DAFTAR GAMBAR .....	6
BAB I PENDAHULUAN .....	8
1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi .....	8
1.2 Peran Strategis Organisasi.....	9
1.3 Struktur Organisasi .....	10
1.4 Sumber Daya.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
2.1 Rencana Strategis Organisasi .....	13
2.2 Rencana Kinerja .....	16
2.3 Perjanjian Kinerja.....	19
2.4 Rencana Anggaran .....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
3.1 Analisis Capaian Kinerja.....	26
3.2 Analisis Akuntabilitas Keuangan .....	56
3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Keuangan .....	58
3.4 Inovasi.....	59
3.5 Permasalahan Yang Dihadapi.....	62
3.6 Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan .....	63
BAB IV PENUTUP .....	65
4.1 Kesimpulan .....	57
LAMPIRAN .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Pegawai Pada Jabatan Fungsional BDI Medan.....	11
Tabel 1.2 Sarana Prasarana Existing BDI Medan.....	12
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BDI Medan Tahun 2025-2029 .....	14
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BDI Medan Tahun 2025-2029.....	15
Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BDI Medan Tahun 2025-2029.....	15
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja BDI Medan Tahun 2025.....	17
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja BDI Medan Tahun 2025 Perubahan 2025.....	20
Tabel 2.6 Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025.....	23
Tabel 2.7 Rincian Pagu Anggaran Berdasarkan Output, Sub Output dan Komponen Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025.....	24
Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025.....	26
Tabel 3.2 Capaian IKT Persentase SDM Industri Yang Kompeten BDI Medan Tahun 2025.....	27
Tabel 3.3 Capaian SK1.1 Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri BDI Medan Tahun 2025.....	28
Tabel 3.4 Capaian SK1.2 Persentase Lulusan Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri BDI Medan Tahun 2025.....	29
Tabel 3.5 Pelaksanaan Diklat Vokasi Industri BDI Medan Tahun 2025.....	29
Tabel 3.6 Realisasi Target Indikator Kinerja Utama BDI Medan Tahun 2025.....	30
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Persentase SDM Industri Yang Kompeten Balai Diklat Industri Medan Dengan Jangka Menengah (Tahun 2021-2025) .....	30
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Persentase SDM Industri Yang Kompeten BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025 (Skilling, Upskilling dan Reskilling).....	31

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Persentase Lulusan Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025 (Skilling).....	31
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Persentase Lulusan Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025 (Reskilling dan Upskilling) .....	32
Tabel 3.11 Hasil Kegiatan Diklat Vokasi Industri Berbasis Kompetensi BDI Medan Tahun 2025.....	32
Tabel 3.12 Wirausaha Industri Program Inkubator Bisnis BDI Medan Tahun 2025.....	33
Tabel 3.13 Manfaat dan Dampak Program Inkubator Bisnis Bagi Tenant BDI Medan Tahun 2025.....	34
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Inkubator Bisnis BDI Medan Dengan Jangka MenengahTahun 2023-2025.....	35
Tabel 3.15 Hasil Kegiatan Program Inkubator Bisnis BDI Medan Tahun 2025.....	35
Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Inkubator Bisnis BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025.....	36
Tabel 3.17 Capaian Persentase Lulusan Pelatihan ASN Bidang Industri Dengan Predikat Minimal Baik di BDI Medan Tahun 2025.....	37
Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025.....	37
Tabel 3.19 Capaian IKSK3.1. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah BDI Medan Tahun 2025.....	39
Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Persentase Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri BDI Medan Dengan Jangka Menengah Tahun 2021-2025.....	39
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Persentase Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025.....	40
Tabel 3.22 Capaian IKSK 3.2 Nilai SAKIP BDI Medan Tahun 2025.....	41
Tabel 3.23 Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP BDI Medan Tahun 2025.....	41

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP BDI Medan Dengan Jangka Menengah Tahun 2022-2025.....	42
Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP BDI Medan Dengan Satker Lainnya Tahun 2025.....	42
Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BDI Medan Dengan Jangka Menengah Tahun 2022-2025.....	44
Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BDI Medan Dengan Satker Lainnya Tahun 2025.....	44
Tabel 3.28 Capaian IKSK 3.4 Indeks Profesionalitas ASN BDI Medan Tahun 2025.....	45
Tabel 3.29 Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN BDI Medan Dengan Jangka Menengah Tahun 2021-2025.....	46
Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN BDI Medan Dengan Satker Lainnya Tahun 2025.....	46
Tabel 3.31 Capaian IKSK 3.5 Nilai IKPA BDI Medan Tahun 2025.....	47
Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Nilai IKPA BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025.....	48
Tabel 3.33 Perbandingan Capaian Nilai IKPA BDI Medan Dengan Satker Lainnya Tahun 2025.....	48
Tabel 3.34 Capaian IKSK 3.5 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat BDI Medan Tahun 2025.....	49
Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025.....	50
Tabel 3.36 Capaian IKSK 3.5 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Unit Kearsipan BDI Medan Tahun 2025.....	51
Tabel 3.37 Perbandingan Capaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Unit Kearsipan BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025.....	51
Tabel 3.38 Capaian IKSK 3.5 Tingkat Penerapan SPBE BDI Medan Tahun 2025.....	52
Tabel 3.39 Perbandingan Capaian Tingkat Penerapan SPBE BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025.....	53
Tabel 3.40 Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi BDI Medan Dengan Jangka Menengah Tahun 2022-2025.....	54
Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025.....	55

Tabel 3.42 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kode Akun dan Jenis Program BDI Medan Tahun 2025.....	56
Tabel 3.43 Realisasi Keuangan dan Fisik Berdasarkan Rincian Output BDI Medan Tahun 2025.....	56
Tabel 3.44 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran BDI Medan Dengan Jangka Menengah Tahun 2022-2025.....	57
Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025.....	58
Tabel 3.46 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BDI Medan Tahun 2025.....	59

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Medan .....	10
Gambar 1.2 Sarana Prasarana BDI Medan .....	12

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Balai Diklat Industri Medan merupakan salah satu satuan kerja dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian yang mengemban tugas untuk menghasilkan SDM industri yang kompeten melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, pada pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa Balai Diklat Industri Medan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### 1) Tugas Pokok

Tugas pokok Balai Diklat Industri Medan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri. Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri pada pasal 19.a disebutkan bahwa Balai Diklat Industri Medan memiliki fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri bidang industri kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan *ole chemical* serta spesialisasi penunjang industri berbasis pangan dan produk karet.

#### 2) Fungsi

Adapun fungsi Balai Diklat Industri Medan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri dan wirausaha industri yang berbasis spesialisasi dan kompetensi;
3. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja industri;
4. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi kewirausahaan industri;
5. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri;

6. Pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri;
7. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas-tugas Balai Diklat Industri Medan dalam pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan bidang perindustrian terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 Peran Strategis Organisasi

Peran Strategis Balai Diklat Industri Medan adalah pengembangan sumber daya manusia industri kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan *oleo chemical* serta spesialisasi penunjang industri berbasis pangan dan produk karet melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan tersertifikasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor industri yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Diklat pada Balai Diklat Industri Medan yang berorientasi pada Diklat Vokasi Industri (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja);
- 2) Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi melalui:
  - a. Penyediaan *workshop* sesuai dengan spesialisasi dan kompetensi masing-masing sekaligus sebagai *Teaching Factory*;
  - b. Pembentukan LSP-P1 sebagai lembaga sertifikasi peserta diklat BDI Medan;
  - c. Membentuk Tempat Uji Kompetensi (TUK);
  - d. Melakukan penyusunan Skema, Modul Pelatihan, dan Materi Uji Kompetensi (MUK) yang sesuai dengan SKKNI dan standar kebutuhan industri.
- 3) Penempatan tenaga kerja di industri terkait bekerjasama dengan Mitra Industri BDI Medan, Asosiasi Industri, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peran strategis selain dari Diklat Vokasi Industri yang merupakan Indikator Kinerja Utama BDI Medan juga terdapat Inkubator Bisnis, Inkubator Bisnis merupakan pengembangan wirausaha industri yang bertaraf nasional.

### 1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Medan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri Medan dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri Medan yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1) Sub Bagian Tata Usaha

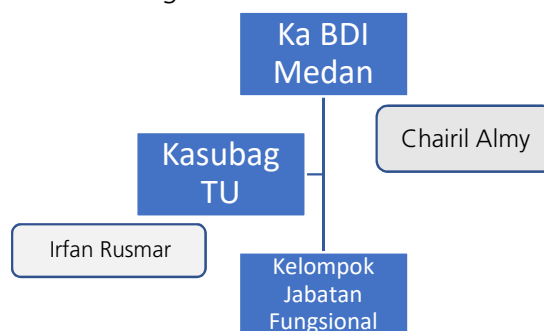
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Balai Diklat Industri Medan, Sub Bagian Tata Usaha.

#### 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambaran Struktur organisasi Balai Diklat Industri Medan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Medan



Adapun rincian jumlah pegawai pada jabatan fungsional sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Rincian Jumlah Pegawai pada Jabatan Fungsional BDI Medan**

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Widyaiswara Ahli Madya	1
2	Pembina Industri Ahli Madya	1
3	Pembina Industri Ahli Muda	3
4	Pembina Industri Ahli Pertama	3
5	Instruktur Ahli Pertama	9
6	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1
8	Perencana Ahli Pertama	1
9	Pranata Komputer Ahli Pertama	2
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11	Arsiparis Terampil	1
12	Penata Layanan Operasional	1
13	Pengelola Keuangan	2
14	Pengadministrasi Perkantoran	1
15	Operator Layanan Operasional	6
16	Pelaksana	3
17	Fungsional Umum	3
18	Pengelola BMN	1
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>

#### 1.4 Sumber Daya

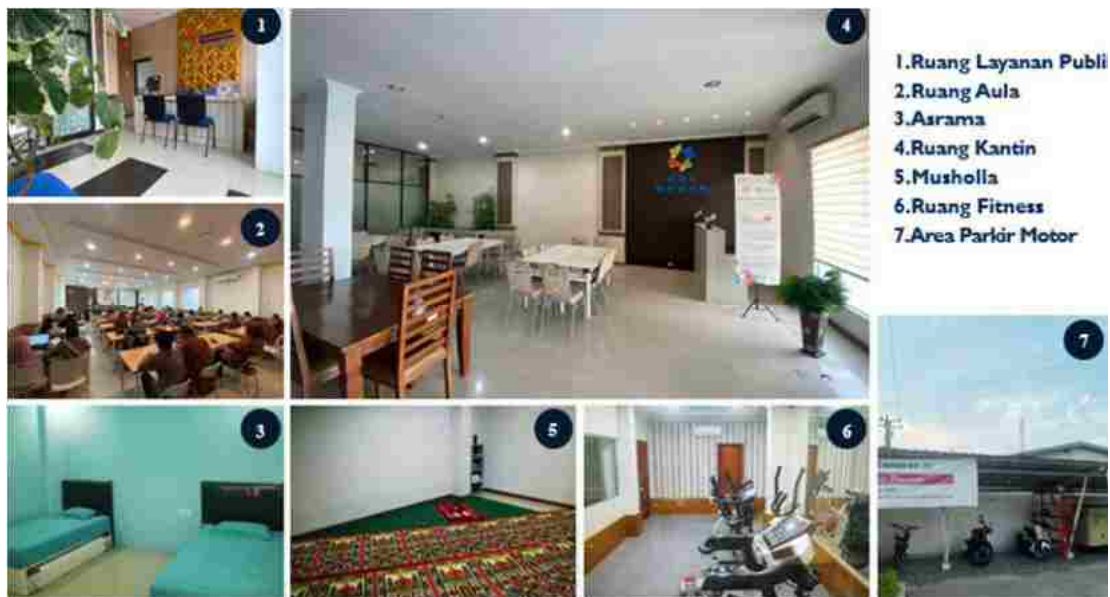
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BDI Medan didukung oleh sumber daya manusia - Aparatur Sipil Negara dan Sarana Prasarana yang terletak di Jalan Damai Nomor 32 Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara.

Adapun rincian sarana prasarana existing BDI Medan sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Sarana Prasarana Existing BDI Medan

No.	Jenis Saprns	Jumlah Instruktur
1	Ruang Layanan Publik	1 ruangan
2	Ruang Aula	1 ruangan
3	Asrama	22 kamar
4	Ruang Kantin	1 ruangan
5	Musholla	1 unit kapasitas 10 orang
6	Ruang Fitness	1 ruangan
7	Area Parkir	1 unit

Gambar 1.2  
Sarana Prasarana BDI Medan



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis Balai Diklat Industri Medan dilatarbelakangi oleh kebijakan Kementerian Perindustrian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, dimana Balai Diklat Industri Medan mempunyai peran dan tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri. Dalam melaksanakan peran tersebut, Balai Diklat Industri Medan fokus pada spesialisasi pendidikan dan pelatihan bidang industri kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan *oleo chemical* serta spesialisasi penunjang industri berbasis pangan dan produk karet.

Rencana strategis Balai Diklat Industri Medan merupakan penjabaran dari visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yaitu : “Meningkatkan daya saing global SDM industri melalui transformasi digital dan hilirisasi untuk mendukung Indonesia sebagai negara industri yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan”.

Rencana Strategis BDI Medan mengacu pada Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2025-2029, dengan ruang lingkup yaitu : “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”.

Pembangunan SDM Industri yang kompeten dan penyediaan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri, serta membangun manajemen diklat yang berbasis kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Medan.

Adapun pokok-pokok Rencana Strategis BDI Medan tahun 2025-2029 yang telah direviu dan direvisi sebagai berikut :

a. Visi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas Balai Diklat Industri Medan merumuskan Visi : **“Sebagai *Center of Excellences* penyiapan Sumber Daya Manusia Industri Kompeten.”**

b. Misi:

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Balai Diklat Industri Medan memiliki Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri;
2. Membangun program dan modul pelatihan berbasis kompetensi;
3. Menyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi (*skilling, up-skilling, dan re-skilling*);
4. Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP;
5. Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional;
6. Membangun dan mengembangkan sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis;
7. Membangun dan mengembangkan *smart training facility*, dan
8. Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN Pembina Industri atas penugasan dari BPSDMI.

c. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, maka BDI Medan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Balai Diklat Industri Medan**  
**Tahun 2025 – 2029**

Kode	Tujuan (TJ)	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1	Persentase SDM Industri yang kompeten*	Persen	90	90,5	91	91,5	92

d. Sasaran Kegiatan

Tujuan organisasi kemudian dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang akan dicapai setiap tahunnya, sesuai dengan Renstra BDI Medan 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**  
**Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 – 2029**

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri yang meningkat dari 93% tahun 2025 menjadi 94% tahun 2029*
		2	Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Industri dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri yang meningkat dari 94% tahun 2025 menjadi 95% tahun 2029*
		3	Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh yang meningkat dari 2 tenant tahun 2025 menjadi 5 tenant tahun 2029*
SK2	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1	Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik yang meningkat dari 91% tahun 2025 menjadi 95% tahun 2029*
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi	1	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada BDI yang meningkat dari 94% tahun 2025 menjadi 95% tahun 2029
		2	Nilai SAKIP BDI yang meningkat dari 79,45 tahun 2025 menjadi 80 tahun 2029
		3	Penilaian dan Analis Laporan Keuangan BDI yang meningkat dari 75 tahun 2025 menjadi 76 tahun 2029
		4	Indeks Profesionalitas ASN pada BDI yang meningkat dari 81,3 tahun 2025 menjadi 81,7 tahun 2029
		5	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BDI yang meningkat dari 93,4 tahun 2025 menjadi 94,5 tahun 2029
		6	Survey Kepuasan Masyarakat yang meningkat dari 91,3 tahun 2025 menjadi 92 tahun 2029
		7	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan pada BDI yang meningkat dari 70,1 tahun 2025 menjadi 82 tahun 2029
		8	Tingkat Penerapan SPBE pada BDI yang meningkat dari 77% tahun 2025 menjadi 85% tahun 2029
		9	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi pada BDI yang meningkat dari 60% tahun 2025 menjadi 70% tahun 2029

Dari seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran kegiatan tersebut di atas, yang menjadi indikator kinerja yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**  
**Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 – 2029**

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	Persen	93	93,5	94	94,5	95
		2	Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Industri dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	Persen	94	94,5	95	95,5	96

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		3 Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh*	Tenant	2	2	3	4	5
SK2	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1 Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik*	Persen	91	92	93	94	95
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi	1 Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada BDI	Persen	94	94,3	94,5	94,7	95
		2 Nilai SAKIP BDI	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80
		3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BDI	Nilai	75	75,25	75,50	75,75	76
		4 Indeks Profesionalitas ASN pada BDI	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
		5 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BDI	Indeks	93,4	93,4	94	94	94,5
		6 Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,3	91,3	91,7	91,7	92
		7 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan pada BDI	Nilai	70,1	73	76	79	82
		8 Tingkat Penerapan SPBE pada BDI	Persen	77	78	80	83	85
		9 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi pada BDI	Persen	60	62	64	68	70

Keterangan :

\*) Indikator Kinerja Utama

## 2.2 Rencana Kinerja

Rencana kinerja Balai Diklat Industri Medan tahun 2025 disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renkin/RKT) Tahun 2025 dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin/PK) Tahun 2025. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 disusun pada tahun 2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan pada awal tahun anggaran 2025.

Perencanaan kinerja yang disusun dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan perencanaan yang sesuai dengan perencanaan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029. Rencana Kinerja BDI Medan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategi BDI Medan Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan hasil reviu dikarenakan adanya perubahan target pada tataran Kementerian Perindustrian serta penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja.

Rencana Kinerja Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 merupakan kinerja yang akan diwujudkan oleh BDI Medan pada tahun 2025.

Adapun Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dimana dalam mengukur sasaran dari rencana Balai Diklat Industri Medan tersebut diatas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama oleh Kepala Balai Diklat Industri Medan No. 237 Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kinerja Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja**  
**Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025**

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target	Rencana Kegiatan	
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	93 (Persen)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sosialisasi diklat berbasis PNBPN ke industri terkait.</li> <li>2. Melakukan Tracer Study terhadap alumni Diklat Berbasis Kompetensi.</li> <li>3. Telah dilakukan Persiapan Penyelenggaraan Diklat Berbasis PNBPN</li> <li>4. Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi</li> <li>5. Membuat laporan pasca diklat</li> <li>6. Verifikasi penambahan ruang lingkup di BNSP melalui verifikator yang sudah ditetapkan oleh BNSP.</li> </ol>
		2	Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Industri dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	94 (Persen)	
		3	Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh*	2 (Tenant)	

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target	Rencana Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan pendampingan Pertemuan mitra usaha</li> <li>7. Melakukan pendampingan dalam pembentukan Nomor Izin Berusaha (NIB), BPOM, Izin Edar,</li> <li>8. Melakukan verifikasi dan Uji Validasi Produk tahap I-III serta marketing dari produk yang diproduksi oleh tenant BDI Medan.</li> <li>C. Melakukan proses Tahap Pasca Inkubasi melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyediaan jejaring antar peserta inkubasi (tenant) melalui WAG Tenant</li> <li>2. Pemberian peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta inkubasi (tenant) melalui fasilitasi pameran dan <i>business matching</i>.</li> <li>3. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta inkubasi (tenant) selama 2 tahun.</li> <li>4. Pendampingan proses pembentukan wadah yang legal dan pengurusan izin usaha dan izin edar.</li> </ul> </li> </ul>
SK2	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1 Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik*	91 (Persen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan pelatihan ASN Bidang Industri (Penunjukan Panitia, Jadwal Pelatihan, Narasumber dan lainnya).</li> <li>2. Melaksanakan pelatihan ASN Bidang Industri dari beberapa satker di lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>3. Melakukan evaluasi hasil kegiatan pelatihan ASN Bidang Industri</li> <li>4. Membuat Laporan Kegiatan Pelatihan ASN Bidang Industri</li> </ul>
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi	1 Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada BDI	94 (Persen)	Pelaksanaan belanja akun 52 (pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai) dengan prioritas pada barang PDN dan TKDN.
		2 Nilai SAKIP BDI	79,45 (Nilai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan Rencana Aksi)</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan (Rencana Aksi, Laporan PP 39 dan LAKIP)</li> <li>3. Penyiapan Dokumen Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>4. Penyiapan Dokumen Lainnya terkait SAKIP</li> </ul>
		3 Penilaian dan Analis Laporan Keuangan BDI	75 (Nilai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2. Pengumpulan dokumen</li> </ul>
		4 Indeks Profesionalitas ASN pada BDI	81,3 (Indeks)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan kedisiplinan pegawai,</li> <li>2. Pendataan kinerja pegawai,</li> <li>3. Melakukan analisa pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>4. Melakukan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>5. Penilaian SKP oleh Pimpinan.</li> </ul>
		5 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BDI	94 (Indeks)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2 Perlengkapan dokumen,</li> </ul>

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target	Rencana Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan</li> <li>4 Mengidentifikasi besaran UP Tunai dan KKP secara rasional dan menggunakan secara efektif dan efisien</li> <li>5 Melaksanakan Rapat RPD dengan masing-masing penanggung jawab kegiatan mencegah deviasi hal.III DIPA</li> </ul>
		6 Survey Kepuasan Masyarakat	91,3 (Indeks)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Menyusun instrumen survei</li> <li>2 Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel</li> <li>3 Melaksanakan survey</li> <li>4 Mengolah hasil survei</li> <li>5 Membuat Laporan hasil SKM Triwulanan</li> <li>6 Menindaklanjuti hasil survey</li> </ul>
		7 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan pada BDI	70,1 (Nilai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif yang tercipta dengan elektronik (Tte) dan melakukan pemberkasan arsip secara elektronik sesuai kaidah kearsipan (melalui google drive);</li> <li>2. Meregistrasikan naskah masuk ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>3. Meregistrasikan naskah keluar ke aplikasi srikandi;</li> <li>4. Memberkaskan naskah masuk dan naskah keluar ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>5. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif (arsip tekstual);</li> <li>6. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip inaktif (arsip tekstual);</li> </ul>
		8 Tingkat Penerapan SPBE pada BDI	77 (Persen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik,</li> <li>2. Perumusan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE</li> <li>4. Melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM SPBE Pusat Data dan Informasi</li> </ul>
		9 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi pada BDI	60 (Persen)	Melakukan kegiatan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan ke Inspektorat Jenderal dengan melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM API Inspektorat Jenderal.

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada perencanaan yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 serta mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Balai Diklat Industri Medan tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam dokumen LAKIP Balai Diklat Industri Medan tahun 2024 dan beberapa penyesuaian dengan ketersediaan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam DIPA Balai Diklat Industri Medan tahun 2025 serta perubahan dalam rangka penyesuaian dengan perubahan arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Hasil evaluasi dan beberapa penyesuaian ini berdampak pada target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Medan tahun 2025. Penyesuaian ini mencakup perubahan dan penyempurnaan sasaran strategis, indikator kinerja maupun target kinerja dan penganggarannya. Perubahan dan penyempurnaan sasaran-sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2025 dan ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Medan tahun 2025 dengan penetapan anggaran sebagaimana dalam DIPA Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Medan tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

**Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 (Perubahan)**

Kode	Sasaran Tujuan (TJ)/ Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Tujuan (IKT)/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1	Persentase SDM Industri yang kompeten*	Persen	90
SK 1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1	Persentase Lulusan Peserta Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	Persen	93
		2	Persentase Lulusan Peserta Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	Persen	94
		3	Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh	Tenant	2
SK 2	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1	Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik*	Persen	91
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi	1	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada BDI	Persen	94
		2	Nilai SAKIP BDI	Nilai	79,45
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BDI	Nilai	75
		4	Indeks Profesionalitas ASN pada BDI	Indeks	81,3

Kode	Sasaran Tujuan (TJ)/ Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Tujuan (IKT)/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target
		5	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BDI	Indeks	93,4
		6	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,3
		7	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan	Nilai	70,1
		8	Tingkat Penerapan SPBE pada BDI	Persen	77
		9	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi pada BDI	Persen	60

\*) Indikator Kinerja Utama

Kode	Program	Pagu Anggaran	Blokir
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1,128,000,000	0
019.10.WA	Program Dukungan Manajemen	7,878,694,000	1,284,908,000
	<b>Total</b>	<b>9,006,694,000</b>	<b>1,284,908,000</b>

Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025-2029, Balai Diklat Industri Medan telah menetapkan Rencana Kerja tahun 2025 Revisi dalam bentuk program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen dengan sasaran program/kegiatan sebagai berikut :

1. Menyediakan SDM Industri yang kompeten

Dalam rangka menciptakan SDM Industri yang kompeten sebagai Indikator Kinerja Utama, Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 memiliki target penyelenggaraan diklat, sertifikasi dan penempatan kerja pada sektor industri. Untuk mewujudkan target tersebut, maka Balai Diklat Industri Medan telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama industri dan lembaga sertifikasi profesi yang kompeten dalam mendukung program ini. Kerja sama dengan berbagai pihak tersebut tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Balai Diklat Industri Medan dengan Perusahaan yang bermitra dengan BDI Medan.

2. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pelatihan

Kualitas manajemen pelatihan yang baik didapatkan dari program dan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Berdasarkan Permenperin Nomor 2 Tahun 2022, Balai Diklat Industri Medan memiliki spesialisasi yakni bidang industri

kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan *oleo chemical* serta spesialisasi penunjang industri berbasis pangan dan produk karet.

Program pelatihan akan dievaluasi secara berkala dengan melakukan temu industri untuk mengetahui kesesuaian program, kebutuhan jabatan, kompetensi, dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri.

### 3. Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Baru

Balai Diklat Industri Medan menyelenggarakan program inkubator bisnis dalam rangka mengembangkan wirausaha baru menjadi wirausaha yang mandiri, kompeten, dan berdaya saing.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah inkubator industri yang tumbuh dengan target sebanyak 2 tenant. Program inkubator bisnis dengan penumbuhan wirausaha baru ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi dan potensi usaha di bidang makanan dan minuman.

### 4. Program Dukungan Manajemen

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Balai Diklat Industri Medan, dukungan terhadap manajemen sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja. Perencanaan kinerja yang baik berfungsi untuk meraih atau mendapatkan sesuatu secara lebih terkoordinasi, meminimalisasi ketidakpastian, dan meminimalisasi pemborosan sumber daya.

Kegiatan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian serta pelayanan umum, serta pelayanan rumah tangga dan perlengkapan merupakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja Balai Diklat Industri Medan.

### 5. Layanan Perkantoran

Balai Diklat Industri Medan mempunyai 2 (dua) kegiatan utama pada layanan perkantoran, yaitu: pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Pembayaran gaji dan tunjangan sudah termasuk di dalamnya yakni tunjangan anak, tunjangan suami, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, uang makan, serta tunjangan kinerja bagi pegawai PNS dan PPPK. Pada kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor di dalamnya meliputi operasional kegiatan perkantoran, perawatan gedung dan asrama, perawatan peralatan dan mesin serta pengelolaan energi (listrik, telepon dan air).

## 2.4 Rencana Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai balai diklat industri guna mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan industri, Balai Diklat Industri Medan pada Tahun 2025 telah memperoleh pagu awal anggaran sebesar Rp.8.934.350.000,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor : DS: 0169-0598-0352-1234 tanggal 29 November 2024 dengan dua kegiatan yaitu; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp.1.423.000.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 7.511.350.000,-.

Namun dalam perjalanannya sampai dengan akhir tahun 2025 pagu anggaran dimaksud telah mengalami revisi sebanyak 12 kali yang disebabkan adanya penarikan/ pergeseran anggaran antar BDI dan buka blokir anggaran yang ada di DJA yang berakibat pada penurunan pagu anggaran menjadi Rp.7,721,786,000,- (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025**

No.	Revisi	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Revisi I	18 Februari 2025	Revisi POK
2	Revisi II	21 Februari 2025	DJA, Penambahan Pagu Efisiensi
3	Revisi III	22 April 2025	DJA penambahan jumlah blokir SPPD
4	Revisi IV	5 Juni 2025	Revisi POK penyesuaian belanjaoperasional dan penambahan kegiatan
5	Revisi V	18 Juni 2025	Penyesuaian pagu minus belanja pegawai dan penyesuaian item operasional
6	Revisi VI	12 Juli 2025	Revisi POK
7	Revisi VII	15 Juli 2025	Pemuktahiran Halaman III DIPA
8	Revisi VIII	10 Oktober 2025	Revisi POK
9	Revisi IX	13 Oktober 2025	Revisi POK
10	Revisi X	8 November 2025	Revisi DJA Penambahan Pagu PNBP
11	Revisi XI	20 November 2025	Revisi POK
12	Revisi XII	11 Desember 2025	Revisi POK

Perubahan DIPA tersebut diatas merupakan langkah strategis dalam penyesuaian anggaran untuk pencapaian kinerja BDI Medan Tahun 2025, dimana beberapa penyesuaian merupakan optimalisasi anggaran untuk percepatan pencapaian kinerja BDI Medan dengan anggaran yang lebih efisien untuk pencapaian kinerja Tahun 2025.

Adapun Pagu Awal Anggaran Program Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 digunakan untuk melaksanakan kegiatan dengan klasifikasi rincian output sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Rincian Pagu Awal Anggaran Berdasarkan Output, Sub Output dan Komponen**  
**Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025**

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU (Rupiah)
019.10.DL	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>	<b>1,423,000,000</b>
4957	<b>Pelatihan Vokasi Industri</b>	<b>1,423,000,000</b>
4957.BDB	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>	<b>155,000,000</b>
4957.BDB.001	<b>Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri</b>	<b>155,000,000</b>
51	<b>Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sektor Industri</b>	<b>155,000,000</b>
A	Recognition Current Competities (RCC) Asesor BDI Medan	155,000,000
4957.FAI	<b>Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan</b>	<b>180,000,000</b>
4957.FAI.001	<b>Dokumen Pendidikan Non Formal Industri Berbasis Kompetensi</b>	<b>180,000,000</b>
52	<b>Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan Non Formal dengan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Lembaga Non-Pendidikan</b>	<b>180,000,000</b>
A	Pengembangan SDM BDI Medan Selaras Menuju corpu	180,000,000
4957.QDJ	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Start Up</b>	<b>100,000,000</b>
4957.QDJ.001	<b>Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri</b>	<b>100,000,000</b>
51	<b>Menyelenggarakan Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri</b>	<b>100,000,000</b>
A	Inkubasi Bisnis	100,000,000
4597.SCH	<b>Pelatihan Bidang Industri</b>	<b>988,000,000</b>
51	<b>Pelatihan Industri (Skilling, Reskilling, Upskilling) Sistem 3 in 1 Sektor Industri Makanan dan Minuman</b>	<b>988,000,000</b>
A	Diklat Operator Pengolahan Makanan (3 Angkatan)	685,825,000
B	Monitoring dan Evaluasi Diklat 3 in 1	31,000,000
C	Pengembangan SDM Industri	271,075,000
019.10.WA	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>7,511,350,000</b>
6043	<b>Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri</b>	<b>7,511,350,000</b>
6043.CCL	<b>OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>53.830.000</b>
6043.CCL.001	<b>Layanan Pemeliharaan Jaringan Komputer dan TIK</b>	<b>53.830.000</b>
051	<b>Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer</b>	<b>53.830.000</b>
A	<b>Pemeliharaan Peralatan Komputer dan Jaringan</b>	<b>53.830.000</b>
6043.EBA	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>7,031,350,000</b>
6043.EBA.994	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>7,031,350,000</b>
001	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4,686,350,000</b>
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	4,067,645,000
B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	618,705,000

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU (Rupiah)
002	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>2,345,000,000</b>
A	Operasional Perkantoran	74,600,000
B	Layanan Daya dan Jasa	177,600,000
C	Operasional Perkantoran Sehari-hari	174,951,000
D	Perawatan Sarana dan Prasarana Diklat	484,086,000
E	Rapat Pimpinan dengan Kemenperin/BPSDMI/Stakeholder	656,452,000
F	Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional	731,831,000
G	Pengelolaan Asrama	24,000,000
6043.EBD	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>426,170,000</b>
6043.EBD.004	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat Industri</b>	<b>426,170,000</b>
51	<b>Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran</b>	<b>126,704,000</b>
A	Persiapan, Pembinaan, Evaluasi Zona Integritas BDI Medan Menuju WBK	64,440,000
B	Penyusunan Rencana Kinerja, Renstra, SAKIP, LAKIP dan PP 39	61,264,000
52	<b>Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi</b>	<b>110,748,000</b>
A	Koordinasi dengan BPSDMI/Kemenperin	35,808,000
B	Evaluasi Kegiatan Satker dan Peta Resiko serta Penguatan Akuntabilitas Rekomendasi Hasil Pengawasan	21,800,000
C	Pengelolaan SMM ISO 9001 : 2015	53,140,000
53	<b>Pengelolaan Keuangan</b>	<b>103,976,000</b>
A	Penyusunan dan Pengiriman Laporan Tahunan	59,276,000
B	Pelaksanaan PIPK BDI Medan	44,700,000
54	<b>Pengelolaan Kepegawaian</b>	<b>55,214,000</b>
A	Pengiriman Peserta Diklat, Sosialisasi dan Undangan Lainnya	55,214,000
55	<b>Pelayanan umum dan perlengkapan</b>	<b>29,528,000</b>
A	Pengelolaan Arsip	29,528,000
	<b>Total</b>	<b>8,934,350,000</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Balai Diklat Industri Medan tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat tupoksi utama, kegiatan pendukung maupun kegiatan operasional lainnya.

Realisasi Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian/Penetapan Kinerja BDI Medan Tahun 2025 Revisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja BDI Medan Tahun 2025**

Kode	Sasaran Tujuan (TJ)/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1 Persentase SDM Industri yang kompeten*	Persen	90	96.18	106.86%
SK 1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1 Persentase Lulusan Peserta Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	Persen	93	93.33	100.35%
		2 Persentase Lulusan Peserta Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	Persen	94	94.64	100.68%
		3 Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh	Tenant	2	4	200.00%
SK 2	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1 Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik*	Persen	91	100	109.89%
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi	1 Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada BDI	Persen	94	97.03	103.22%
		2 Nilai SAKIP BDI	Nilai	79.45	79.35	99.87%
		3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BDI	Nilai	75	95.5	127.33%
		4 Indeks Profesionalitas ASN pada BDI	Indeks	81.3	81.61	100.38%
		5 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BDI	Indeks	93.4	97.45	104.34%
		6 Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	91.3	91.53	100.25%
		7 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan Pada BDI	Nilai	70,1	93.67	133.62%
		8 Tingkat Penerapan SPBE pada BDI	Persen	77	83.28	108.16%
		9 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi pada BDI	Persen	60	100	166.67%

BDI Medan telah menetapkan indikator kinerja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BDI Medan dengan Kepala BPSDMI

Kementerian Perindustrian Tahun 2025 berdasarkan Nota Dinas BPSDMI Nomor : 551/BPSDMI.1/PR/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 Tentang Pedoman Kinerja Teknis Pada Renstra 2025-2029 Revisi, terdiri dari 1 Sasaran Tujuan (TJ) yaitu: Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi dan 3 Sasaran Kegiatan (SK) yaitu; 1) Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi, 2) Terfasilitasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi, dan 3) Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi.

Capaian Kinerja BDI Medan akan dijelaskan sesuai dengan sasaran tujuan dan sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan BDI Medan selama Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sasaran Tujuan (TJ): Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi

Indikator Kinerja Tujuan (IKT): Persentasi SDM Industri yang Kompeten

Untuk Indikator Kinerja Tujuan yaitu Persentasi SDM Industri yang Kompeten Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terpenuhi sebesar 96,18% dengan capaian sebesar 106,86%. Secara rinci perhitungan capaian persentase SDM Industri yang Kompeten Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian IKT Persentasi SDM Industri yang Kompeten BDI Medan Tahun 2025**  
**(Skilling, Upskilling dan Reskilling)**

No.	Jenis Diklat	Jumlah Lulusan Diklat	Persentasi SDM Industri Yang Kompeten	
			Jumlah (Orang)	Share (%)
1	Skillling Operator Olahan Makanan Angkatan 1	45	45	100%
2	Upskilling Operator Mesin dan Peralatan PMKS Angkatan 1	37	36	97%
3	Upskilling Operator Mesin dan Peralatan PMKS Angkatan 2	37	32	86%
4	Upskilling Operator Material Handling PMKS Angkatan 1	38	38	100%
<b>Total SDM Industri Yang Kompeten (Orang)</b>		<b>157</b>	<b>151</b>	<b>96.18%</b>
<b>Target IKT 2025 (%)</b>				<b>90%</b>
<b>Capaian (%) Output</b>				<b>106.86%</b>

- 2) Sasaran Kegiatan 1 (SK1): Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi

1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1 (IKSK1.1): Persentase Lulusan Peserta Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1 yaitu Persentase Lulusan Peserta Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 93% dan terpenuhi sebesar 93,33% dengan capaian sebesar 100,36%. Secara rinci perhitungan capaian persentase Lulusan Peserta Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Capaian SK1.1 Persentasi Lulusan Peserta Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri BDI Medan Tahun 2025 (Skilling)**

No.	Jenis Diklat	Jumlah Lulusan Diklat	Persentasi Lulusan Diklat Yang Bekerja dan Kompeten	
			Jumlah (Orang)	Share (%)
1	Skilling Operator Olahan Makanan Angkatan 1	45	42	93.33%
<b>Total Lulusan Diklat Yang Bekerja dan Kompeten (Orang)</b>		<b>45</b>	<b>42</b>	<b>93.33%</b>
Target IK1.1 2025 (%)				93%
<b>Capaian (%) Output</b>				<b>100.36%</b>

2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2 (IKSK1.2): Persentase Lulusan Peserta Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2 yaitu Persentase Lulusan Peserta Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri BDI Medan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 94% dan terpenuhi sebesar 94,64% dengan capaian sebesar 100,68%. Secara rinci perhitungan capaian Persentase Lulusan Peserta Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

**Capaian IKSK 1.2 Persentasi Lulusan Peserta Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri BDI Medan Tahun 2025 (Upskilling)**

No.	Jenis Diklat	Jumlah Lulusan Diklat	Persentase Lulusan Diklat Yang Kompeten	
			Jumlah (Orang)	Share (%)
1	Upskilling Operator Mesin dan Peralatan PMKS Angkatan 1	37	36	97%
2	Upskilling Operator Mesin dan Peralatan PMKS Angkatan 2	37	32	86%
3	Upskilling Operator Material Handling PMKS Angkatan 1	38	38	100%
<b>Total Lulusan Diklat Yang Kompeten (Orang)</b>		<b>112</b>	<b>106</b>	<b>94.64%</b>

No.	Jenis Diklat	Jumlah Lulusan Diklat	Persentase Lulusan Diklat Yang Kompeten	
			Jumlah (Orang)	Share (%)
	Target IK1.2 2025 (%)			94%
Capaian (%) Output				100.68%

Kegiatan Diklat yang dijalankan oleh BDI Medan ini dilakukan dengan model *skilling* dan *upskilling* meliputi pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja bagi lulusan pelatihan pada dunia industri yang telah bekerjasama dengan BDI Medan. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, para peserta diuji kompetensi melalui LSP P1 BDI Medan (Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 Balai Diklat Industri Medan) perpanjangan tangan dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dengan pengujian oleh asesor internal maupun eksternal BDI Medan. Pelaksanaan kegiatan Diklat Vokasi Industri BDI Medan Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Pelaksanaan Diklat Vokasi Industri BDI Medan Tahun 2025**

No	Jenis Diklat	Angkatan Ke-	Jumlah Peserta (orang)	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Diklat	No PKS	Lokasi Penempatan	Wilayah
1	Diklat Skilling Operator Produksi Olahan Makanan	1	45	14 s.d 24 April 2025	BDI Medan	B/8/BPSDMI/BDI-Medan/HK/IV/2025	PT Asia Sakti Wahid Foods Manufacture	Medan
2	Diklat Upskilling Pengoperasian Mesin dan Peralatan Produksi pada PMKS	1	37	10 s.d 18 November 2025	PT Sahabat Sawit Rokan Sejahtera	B/75/BPSDMI/BDI-Medan/HK/XI/2025	PT Sahabat Sawit Rokan Sejahtera	Rokan Hilir
3	Diklat Upskilling Material Handling	1	38	17 s.d 26 November 2025	PT Sisirau PMKS - Aceh Tamiang	B/85/BPSDMI/BDI-Medan/HK/XI/2025	PT Sisirau PMKS - Aceh Tamiang	Aceh Tamiang
4	Diklat Upskilling Pengoperasian Mesin dan Peralatan Produksi pada PMKS	2	37	13 s.d 21 November 2025	PT Arya Rama Persada	B/80/BPSDMI/BDI-Medan/HK/XI/2025	PT Arya Rama Persada	Batubara
<b>Total</b>			<b>157</b>					

Secara total dari pelaksanaan diklat vokasi industri tahun 2025 adalah sebanyak 4 angkatan dengan jumlah peserta 157 orang. Adapun capaian realisasi indikator kinerja utama secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel. 3.6**  
**Realisasi Target Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025**

Kode	Sasaran Tujuan (TJ)/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1 Persentase SDM Industri yang kompeten*	Persen	90	96.18	106.86%
SK 1	Terfasilitasinya Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1 Persentase Lulusan Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	Persen	93	93.33	100.35%
		2 Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Industri dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	Persen	94	94.64	100.68%
		3 Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh	Tenant	2	4	200.00%

Keterangan : \*) Indikator Kinerja Utama

Perbandingan capaian persentase lulusan pelatihan vokasi industri yang kompeten BDI Medan dengan jangka menengah Tahun 2021-2025 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Persentase SDM Industri Yang Kompeten**  
**Balai Diklat Industri Medan Dengan Jangka Menengah (Tahun 2021-2025)**

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Lulusan Diklat	3,970	2,140	3,350	2,200	157
Jumlah Lulusan Diklat Yang kompeten	3,561	1,913	2,917	1,865	151
Persentase Lulusan Diklat Yang kompeten	<b>89.70%</b>	<b>89.39%</b>	<b>87.07%</b>	<b>84.77%</b>	<b>96.18%</b>

Dalam 5 tahun terakhir, Persentase SDM Industri Yang Kompeten mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2025 meningkat secara signifikan yaitu 96,18%. Hal ini menunjukkan kinerja utama BDI Medan dalam meningkatkan peran SDM industri dalam perekonomian nasional melalui unit pelatihan vokasi yang semakin baik termasuk dalam pengelolaannya.

Perbandingan capaian realisasi persentase SDM Industri Yang Kompeten BDI Medan dengan BDI lainnya dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Capaian Persentase SDM Industri Yang Kompeten**  
**BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025**  
**(Skilling, Upskilling dan Reskilling)**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang
Target (%)	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realisasi (%)	96.18	100.00	100.00	97.00	95.80	100.00	100.00
Capaian	106.87%	111.11%	111.11%	107.78%	106.44%	111.11%	111.11%

Capaian persentase SDM Industri Yang Kompeten BDI Medan dibandingkan dengan BDI lainnya sudah cukup baik, namun perlu adanya upaya perbaikan dimasa yang akan datang melalui peningkatan kerjasama penempatan tenaga kerja alumni diklat skilling dan peningkatan kompetensi instruktur dan asesor.

Perbandingan capaian realisasi Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri BDI Medan dengan BDI lainnya dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Capaian Persentase Lulusan Diklat Yang Bekerja dan**  
**Mempunyai Kompetensi Bidang Industri**  
**BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025**  
**(Skilling)**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang
Target (%)	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
Realisasi (%)	93.33	100.00	95.05	100.00	93.87	100.00	96.15
Capaian	100.35%	107.53%	102.20%	107.53%	100.94%	107.53%	103.39%

Capaian Persentase Lulusan Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri BDI Medan dibandingkan dengan BDI lainnya sudah cukup baik, namun perlu adanya upaya perbaikan dimasa yang akan datang melalui peningkatan kerjasama penempatan tenaga kerja alumni diklat skilling dan peningkatan kualitas layanan serta fasilitas TUK dan Workshop untuk kegiatan praktek diklat secara mandiri.

Perbandingan capaian realisasi Persentase Lulusan Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri BDI Medan dengan BDI lainnya dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Capaian Persentase Lulusan Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025 (Upskilling dan Reskilling)**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang
Target (%)	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
Realisasi (%)	94.64	100.00	95.05	97.00	95.48	100.00	100.00
Capaian	100.68%	106.38%	101.12%	103.19%	101.57%	106.38%	106.38%

Capaian Persentase Lulusan Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri BDI Medan dibandingkan dengan BDI lainnya sudah cukup baik, namun perlu adanya upaya perbaikan dimasa yang akan datang melalui peningkatan kerjasama industri, kualitas dan kompetensi asesor dan instruktur serta peningkatan kualitas layanan serta fasilitas TUK dan Workshop untuk kegiatan praktek diklat secara mandiri.

Beberapa hasil kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan rencana aksi pada Tahun 2025 terkait pengelolaan Pelatihan Bidang Industri Berbasis Kompetensi di BDI Medan dengan realisasi fisik 100% sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Hasil Kegiatan Pelatihan Bidang Industri Berdasarkan Rencana Aksi BDI Medan Tahun 2025**

Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan
25%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Kerjasama dengan Industri Terkait</li> <li>Rekrutmen Peserta sesuai kriteria yang dipersyaratkan</li> <li>Menyusun Perangkat diklat</li> <li>Menyusun draft PBK Baru sesuai dengan Kompetensi BDI Medan</li> <li>Persiapan Verifikasi skema Sertifikasi.</li> <li>Persiapan Pelatihan Asesor Kompetensi</li> <li>Sampai dengan Triwulan I tahun 2025 BDI Medan belum dapat melaksanakan kegiatan diklat yang disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran termasuk perjalanan dinas, namun direncanakan pelaksanaan diklat 3in1 akan dilakukan pada triwulan berikutnya sebanyak 152 orang untuk bidang makanan.</li> </ol>	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan sosialisasi diklat berbasis PNBSP ke industri terkait telah dilakukan.</li> <li>Rekapitulasi hasil TNA telah diselesaikan.</li> <li>Telah diselenggarakan Diklat Berbasis kompetensi Angkatan 1 Bidang Makanan sebanyak 45 orang</li> <li>Telah dilaksanakan finalisasi PBK sesuai dengan Kompetensi BDI Medan</li> <li>Telah disusun rancangan skema Sertifikasi untuk penambahan ruang lingkup</li> <li>Telah diajukan penambahan ruang lingkup ke BNSP melalui verifikator yang sudah ditetapkan oleh BNSP</li> <li>Persiapan Pelatihan Asesor Kompetensi telah dilakukan</li> <li>Prosentase penempatan kerja lulusan diklat angkatan 1 bidang</li> </ol>	75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sosialisasi diklat berbasis PNBSP ke industri terkait.</li> <li>Melakukan Tracer Study terhadap alumni Diklat Berbasis Kompetensi.</li> <li>Telah dilakukan Persiapan Penyelenggaraan Diklat Berbasis PNBSP</li> <li>Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi</li> <li>Membuat laporan pasca diklat</li> <li>Verifikasi penambahan ruang lingkup di BNSP melalui verifikator yang sudah ditetapkan oleh BNSP.</li> <li>Penundaan pelaksanaan diklat pada angkatan 2 dan 3 yang dijadwalkan pada triwulan berikutnya.</li> </ol>	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sosialisasi diklat berbasis PNBSP ke industri terkait.</li> <li>Melakukan Tracer Study terhadap alumni Diklat Berbasis Kompetensi.</li> <li>Telah dilakukan Persiapan Penyelenggaraan Diklat Berbasis PNBSP</li> <li>Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi</li> <li>Membuat laporan pasca diklat</li> <li>Verifikasi penambahan ruang lingkup di BNSP melalui verifikator yang sudah ditetapkan oleh BNSP</li> <li>Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 BDI Medan telah melaksanakan kegiatan diklat sebanyak 157 orang</li> </ol>

Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan
			makanan mencapai 100% dari 45 orang peserta. 9. Selanjutnya karena adanya kebijakan efisiensi anggaran maka terjadi penundaan pelaksanaan diklat pada angkatan 2 dan 3 yang dijadwalkan pada triwulan berikutnya.				dari 152 orang yang direncanakan dengan capaian output sebesar 103,29%, dimana terdiri dari 45 orang di bidang operator olahan makanan, 74 orang di bidang operator mesin dan peralatan pada PMKS dan 38 orang di bidang operator material handling.

Secara umum IKSK 1.1 dan IKSK1.2 menunjukkan kinerja yang cukup baik atau telah memenuhi target indikator kinerja utama, namun terdapat beberapa tantangan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya yaitu adanya keterlambatan jadwal pelaksanaan diklat vokasi industri akibat adanya penyesuaian kebijakan BPSDMI, sehingga BDI Medan melakukan akselerasi pelaksanaan diklat pada Triwulan IV 2025 melalui optimalisasi perencanaan serta penguatan kolaborasi industri guna memastikan relevansi pelaksanaan diklat vokasi industri dalam rangka optimalisasi capaian indikator kinerja utama.

3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.3 (IKSK1.3): Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 yaitu Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebanyak 2 tenant dan terpenuhi sebanyak 4 tenant dengan capaian sebesar 200%. Secara rinci Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh**  
**BDI Medan Tahun 2025**

No.	Nama Tenant	Bidang Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Lokasi Usaha
1	Jamu Kunyit Asam Sereh Rempahara	Memproduksi minuman jamu kesehatan dengan paduan kunyit, asam dan sereh	2	Deli Serdang Sumatera Utara
2	Bolu Nenas Hawais Cage	Memproduksi makanan roti dengan paduan nenas dengan rasa yang khas lokal	3	Medan
3	Cosmic Foodies	Memproduksi kue sus dengan paduan rasa andaliman yang khas lokal	2	Medan
4	Sirup Kesturi Sereh AI-Kubra	Memproduksi minuman kesehatan dengan paduan jeruk kesturi dan sereh	2	Medan

Adapun manfaat dan dampak dari program inkubator bisnis BDI Medan tahun 2025 terhadap perkembangan usaha tenant diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Manfaat dan Dampak Hasil Inkubator Bisnis Bagi Tenant**  
**BDI Medan Tahun 2025**

No.	Nama Tenant	Kondisi Kemasan Sebelum Program Inkubis	Kondisi Kemasan Sesudah Program Inkubis	Perubahan Indikator Kinerja Tenant
1	Jamu Kunyit Asam Sereh Rempahara			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Omzet Usaha Tenant sebesar 20%</li> <li>2. Meningkatnya Kapasitas Produksi Tenant 20%</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas Produk Tenant (Kemasan, Rasa, Varian dll)</li> <li>4. Meningkatnya Legalitas Usaha Tenant (NIB, PIRT dan Sertifikat Halal)</li> <li>5. Meningkatnya Mitra Usaha Tenant (Online dan Offline/Toko, Reseller dll)</li> <li>6. Meningkatnya Pendanaan Usaha Tenant dari BDI Medan dalam bentuk belanja bahan baku.</li> </ol>
2	Bolu Nenas Hawais Cage			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Omzet Usaha Tenant sebesar 30%</li> <li>2. Meningkatnya Kapasitas Produksi Tenant 30%</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas Produk Tenant (Kemasan, Rasa, Varian dll)</li> <li>4. Meningkatnya Legalitas Usaha Tenant (NIB, PIRT dan Sertifikat Halal)</li> <li>5. Meningkatnya Mitra Usaha Tenant (Online dan Offline/Toko, Reseller dll)</li> <li>6. Meningkatnya Pendanaan Usaha Tenant dari BDI Medan dalam bentuk belanja bahan baku dan KUR BRI sebesar Rp 50 Juta.</li> </ol>
3	Cosmic Foodies			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Omzet Usaha Tenant sebesar 30%</li> <li>2. Meningkatnya Kapasitas Produksi Tenant 30%</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas Produk Tenant (Kemasan, Rasa, Varian dll)</li> <li>4. Meningkatnya Legalitas Usaha Tenant (NIB, PIRT dan Sertifikat Halal)</li> <li>5. Meningkatnya Mitra Usaha Tenant (Online dan Offline/Toko, Cage, Reseller dll)</li> <li>6. Meningkatnya Pendanaan Usaha Tenant dari BDI Medan dalam bentuk belanja bahan baku.</li> </ol>
4	Sirup Kesturi Sereh Al-Kubra			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Omzet Usaha Tenant sebesar 50%</li> <li>2. Meningkatnya Kapasitas Produksi Tenant 30%</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas Produk Tenant (Kemasan, Rasa, Varian dll)</li> <li>4. Meningkatnya Legalitas Usaha Tenant (NIB, PIRT dan Sertifikat Halal)</li> <li>5. Meningkatnya Mitra Usaha Tenant</li> <li>6. Meningkatnya Pendanaan Usaha Tenant dari BDI Medan dalam bentuk belanja bahan baku.</li> </ol>

Perbandingan capaian inkubator bisnis BDI Medan dalam dalam jangka menengah (3 tahun terakhir) dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Capaian Inkubator Bisnis BDI Medan Dengan Jangka**  
**Menengah Tahun 2023-2025**

Tahun	2023	2024	2025
Target	4	4	2
Realisasi	4	4	4
Capaian	100%	100%	200%

Capaian realisasi inkubator bisnis BDI Medan sejak tahun 2023 sampai dengan 2025 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kinerja utama BDI Medan secara kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan inkubator bisnis semakin baik.

Proses inkubator bisnis sektor industri kecil menengah Tahun 2025 yang telah dilakukan dengan realisasi fisik 100% dan menjadi sasaran BDI Medan adalah yang sesuai dengan spesialisasi BDI Medan dimana pembinaan dilakukan dengan 3 tahap yaitu: Pra Inkubasi, Inkubasi, dan Pasca Inkubasi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Hasil Kegiatan Program Inkubator Bisnis Berdasarkan Rencana Aksi**  
**BDI Medan Tahun 2025**

Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan
10%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan Pembentukan Tim Inkubator Bisnis</li> <li>Telah dilakukan Penyusunan Proposal Kolaborasi Inkubator Bisnis</li> <li>Telah dilakukan Sosialisasi dalam bentuk pendaftaran calon tenant dalam rangka persiapan pra inkubasi.</li> </ol>	30%	<p>Telah dilakukan beberapa kegiatan Pra Inkubasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendaftaran tenant pada website BDI Medan telah diselesaikan</li> <li>Upload proposal bisnis calon tenant untuk proses seleksi tenant inkubator bisnis BDI Medan</li> <li>Telah dilakukan penilaian proposal oleh Tim Penilai Internal Program Inkubator Bisnis BDI Medan.</li> <li>Telah dilakukan verifikasi lokasi usaha calon tenant oleh Tim Verifikator Inkubator Bisnis BDI Medan</li> <li>Telah dilakukan pengumuman 4 tenant inkubator bisnis BDI Medan yang disahkan dengan SK yang dikeluarkan kepala Balai Diklat Industri Medan Nomor 190 Tahun 2025.</li> </ol>	80%	<p>Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait masa inkubasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembukaan dan Penandatanganan MoU</li> <li>Pelatihan ide usaha kepada 4 tenant beserta pendampingnya.</li> <li>Telah dilakukan mentoring dan coaching sebanyak 3 tahap, dimana setiap tahap akan dilakukan penyempurnaan proses bisnis dari setiap tenant BDI Medan seperti; pembuatan dan remake brand / logo, pembentukan catatan dan pelaporan keuangan tenant, peningkatan kualitas produk tenant,</li> <li>Telah dilakukan pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha</li> <li>Telah dilakukan pemberian bantuan bahan produksi</li> <li>Telah dilakukan pendampingan Pertemuan mitra usaha</li> <li>Telah dilakukan pendampingan dalam pembentukan Nomor Izin Berusaha (NIB), BPOM, Izin Edar,</li> <li>Telah dilakukan verifikasi dan Uji Validasi Produk tahap I-II serta marketing</li> </ol>	100%	<p>Telah dilakukan proses Tahap Pasca Inkubasi melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi penyediaan jejaring antar peserta inkubasi (tenant) melalui WAG Tenant</li> <li>Pemberian peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta inkubasi (tenant) melalui fasilitasi pameran dan business matching</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta inkubasi (tenant) selama 2 tahun</li> <li>Pendampingan proses pembentukan wadah yang legal dan pengurusan izin usaha dan izin edar.</li> <li>Telah dilakukan uji validasi tahap 3 dan diberikan sertifikat kepada keempat tenant pada Triwulan IV 2025.</li> <li>Jumlah realisasi tenant Inkubasi sebanyak 4 tenant dengan capaian 200% dari target 2025.</li> </ol>

Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik	Realisasi Kegiatan
					dari produk yang diproduksi oleh tenant BDI Medan.		

Perbandingan capaian realisasi inkubator bisnis BDI Medan dengan BDI lainnya dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Capaian Inkubator Bisnis**  
**BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang
Target (Tenant)	2	4	2	3	7	3	4
Realisasi (Tenant)	4	4	3	4	8	10	4
Capaian	200%	100%	150%	133%	114%	333%	100%

Perbandingan capaian inkubator bisnis BDI Medan dengan BDI lainnya Tahun 2025 menunjukkan prestasi yang cukup baik, dimana capaiannya sebesar 200% dengan posisi peringkat kedua setelah BDI Yogyakarta, sehingga diharapkan kedepan BDI Medan akan terus meningkatkan kinerja capaian pengembangan inkubator bisnis dengan perencanaan yang lebih baik.

Secara umum IKSK1.3 menunjukkan kinerja yang cukup baik atau telah memenuhi target indikator kinerja utama, namun terdapat beberapa tantangan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya yaitu adanya perbedaan kapasitas manajerial usaha tenant, sehingga BDI Medan melakukan pendampingan secara efektif dan efisien melalui penguatan coaching dan mentoring serta mengakselerasi validasi pasar secara bertahap (3 kali) dan legalitas usaha pada masa inkubasi dan pasca inkubasi.

3) Sasaran Kegiatan 2 (SK2): Terasmiliasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi

1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.1 (IKSK2.1): Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 yaitu Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik Tahun Anggaran 2025 sebesar

91% dan terpenuhi sebesar 100% dengan capaian sebesar 109,89%. Secara rinci Realisasi Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.17**

**Capaian Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan  
Dengan Predikat Minimal Baik BDI Medan Tahun 2025**

No.	Kualifikasi	Jumlah Lulusan Diklat ASN	Persentase Lulusan Diklat ASN Minimal Baik	
			Jumlah (Orang)	Share (%)
1	Sangat Memuaskan	19	19	63%
2	Memuaskan	9	9	30%
3	Baik	2	2	7%
	<b>Total Lulusan Diklat ASN Minimal Baik (Orang)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100.00%</b>
	Target SK2 2025 (%)			<b>91%</b>
<b>Capaian (%) Output</b>				<b>109.89%</b>

Dasar pelaksanaan kegiatan Diklat ASN adalah Nota Dinas BPSDMI No. 125/BPSDMI.1/PR/X/2025 Tanggal Tentang Relaksasi Blokir Anggaran TA 2025 dan Revisi Kewenangan DJA Lainnya serta Nota Dinas Biro OSDM dan RB No. B.5217/SJ-IND.2/DL/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 Tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Sistem Industri I 2025. Tahun 2025 kegiatan Diklat ASN yang dilaksanakan di Balai Diklat Industri Medan diikuti oleh 30 peserta dari beberapa Satker di Lingkungan Kementerian Perindustrian dengan tingkat kelulusan minimal baik sebesar 100%, dengan rincian komposisi predikat baik 7%, Memuaskan 30% dan Sangat Memuaskan 63%.

Perbandingan capaian realisasi inkubator bisnis BDI Medan dengan BDI lainnya dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.18**

**Perbandingan Capaian Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan  
Dengan Predikat Minimal Baik BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang
Target (%)	91	91	91	91	91	91	91
Realisasi (%)	100	100	100	100	100	100	100
Capaian	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%

Perbandingan capaian Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik BDI Medan dengan BDI lainnya Tahun 2025 menunjukkan prestasi yang cukup baik, dimana capaiannya sebesar 110% sama dengan BDI lainnya, sehingga diharapkan kedepan BDI Medan akan terus mempertahankan capaian kinerja dimaksud dengan perencanaan yang lebih baik.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 terkait pengelolaan Pelatihan ASN di BDI Medan dengan realisasi fisik 100% sebagai berikut :

- a. Melakukan persiapan pelatihan ASN Bidang Industri (Penunjukan Panitia, Jadwal Pelatihan, Narasumber dan lainnya sesuai dengan ketentuan).
- b. Melaksanakan pelatihan ASN Bidang Industri sebanyak 30 orang dari beberapa satker di lingkungan Kementerian Perindustrian
- c. Melakukan evaluasi hasil kegiatan pelatihan ASN Bidang Industri
- d. Membuat Laporan Kegiatan Pelatihan ASN Bidang Industri
- e. Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik sebesar 100% dengan capaian 109,89%.

Secara umum IKSK 2.1 menunjukkan kinerja yang cukup baik atau telah memenuhi target indikator kinerja, namun terdapat beberapa tantangan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya yaitu adanya keterlambatan administratif penganggaran, sehingga BDI Medan melakukan akselerasi pelaksanaan diklat pada Triwulan IV 2025 melalui momentum penguatan kapasitas kelembagaan dengan pemanfaatan realisasi diklat serta penguatan sinkronisasi perencanaan awal tahun dengan unit pusat demi menjamin ketepatan waktu pelaksanaan ke depan.

4) Sasaran Kegiatan 3 (SK3) : Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi

1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1 (IKSK3.1): Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1 yaitu: Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pemerintah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 94% dan terpenuhi sebesar 97,03% dengan capaian sebesar 103,22%. Secara rinci capaian Realisasi Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.19**

**Capaian IKSK3.1. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah BDI Medan Tahun 2025**

COA	Pagu	Realisasi		Realisasi TKDN	% TKDN Realisasi	Sisa Pagu
		Komitmen	Pembayaran			
4957 FAI	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	100.00%	-
4958 QDJ	20,406,000	2,662,900	17,735,020	20,397,920	99.96%	8,080
Total	2,813,142,000	493,600,446	2,311,675,317	2,729,574,857	97.03%	7,866,237
<b>Target TKDN</b>					<b>94.00%</b>	
<b>Capaian TKDN</b>					<b>103.22%</b>	

Perbandingan Capaian Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dengan jangka menengah Tahun 2021-2025 dijelaskan pada Gambar 3.4 sebagai berikut :

**Tabel. 3.20**

**Perbandingan Capaian Persentasi Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Dengan Jangka Menengah Tahun 2021-2025**

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	50	60	70	80	94
Realisasi	98.00	97.28	100.00	97.27	97.03
Capaian	196.00%	162.13%	142.86%	121.59%	103.22%

Jika dibandingkan jangka menengah tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi realisasi Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Terjadinya penurunan capaian sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 lebih disebabkan adanya kenaikan target yang ditetapkan oleh BPSDMI, sedangkan realisasinya maksimal 100%.

Perbandingan Capaian Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dengan BDI Lainnya Tahun 2025 dijelaskan pada Gambar 3.5 sebagai berikut :

**Tabel. 3.21**  
**Perbandingan Capaian Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang
Target (%)	94	94	94	94	94	94	94
Realisasi (%)	97.03	99.31	99.99	99.63	99.97	99.59	99.78
Capaian	103.22%	105.65%	106.37%	105.99%	106.35%	105.95%	106.15%

Jika dibandingkan dengan BDI lainnya Tahun 2025, dapat dilihat bahwa BDI Medan dalam capaian realisasi Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah sudah cukup baik yaitu 103,22%, namun perlu upaya perbaikan dalam bentuk peningkatan prioritas penggunaan produk dalam negeri pada setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 terkait pengelolaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah di BDI Medan dengan realisasi fisik 100% yaitu melaksanakan belanja akun 52 (pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai) dengan prioritas pada barang PDN dan TKDN dengan nilai TKDN posisi terakhir 2025 sebesar 97,03%.

Secara umum IKSK 3.1 menunjukkan kinerja yang cukup baik atau telah memenuhi target indikator kinerja, namun terdapat beberapa tantangan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya yaitu belum optimalnya pemetaan kebutuhan barang/jasa dalam negeri, sehingga BDI Medan perlu meningkatkan optimalisasi penguatan pemetaan kebutuhan dini dan perencanaan pengadaan strategis guna memaksimalkan dukungan terhadap ketahanan industri nasional.

## 2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.2 (IKSK3.2): Nilai SAKIP

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.2 yaitu: Nilai SAKIP BDI Medan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 79,45% dan terpenuhi sebesar 79,35% dengan capaian sebesar 99,87%. Secara rinci capaian Realisasi Nilai SAKIP BDI Medan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.22**  
**Capaian IKSK3.2. Nilai SAKIP BDI Medan Tahun 2025**

No.	Komponen	2025
1	Perencanaan Kinerja	23.7
2	Pengukuran Kinerja	24.6
3	Pelaporan Kinerja	12.3
4	Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Internal	18.76
	<b>Total Realisasi SAKIP</b>	<b>79.35</b>
	<b>Target SAKIP</b>	<b>79.45</b>
	<b>Capaian (%) Output</b>	<b>99.87%</b>

Tahun 2025 capaian Nilai SAKIP sebesar 99,87% yang lebih disebabkan adanya beberapa kelemahan dalam pengelolaan SAKIP yang perlu diperbaiki sesuai rekomendasi Tim Inspektorat I. Oleh karena itu Tim SAKIP BDI Medan telah menyelesaikan seluruh rekomendasi dimaksud sebagai berikut :

**Tabel 3.23**

**Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP BDI Medan Tahun 2025**

No.	Rekomendasi SAKIP	Realisasi Tindak Lanjut	Keterangan
1	Dalam menetapkan target di dokumen-dokumen perencanaan kinerja harus mempertimbangkan agar target dapat dicapai ( <i>achievable</i> ), menantang dan realistis.	Telah dilakukan perbaikan dokumen-dokumen perencanaan kinerja yang mempertimbangkan prinsip SMART (Specific, Measureable, Achievable, Realistic dan Time Bond)	Telah diselesaikan
2	Melakukan evaluasi berkala atas dokumen-dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renkin, Perkin) untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan dari dokumen perencanaan kinerja tersebut.	Telah dilakukan evaluasi berkala melalui Rapat PP 39, Monitoring Rencana Aksi setiap Triwulan dan Review atas dokumen-dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renkin, Perkin).	Telah diselesaikan
3	Melakukan evaluasi berkala atas mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja	Telah dilakukan evaluasi berkala melalui Rapat Review SAKIP dan PP 39 serta Monitoring Rencana Aksi setiap Triwulannya terkait melalui	Telah diselesaikan

No.	Rekomendasi SAKIP	Realisasi Tindak Lanjut	Keterangan
	untuk menguji keandalan, kesesuaian dan pemanfaatan data kinerja yang dilaporkan pada LAKIP.	Aplikasi SAKTI, ALKI, DJA dan eMonev Bapenas untuk penyusunan Laporan PP 39, Monitoring Rencana Aksi dan LAKIP).	
4	Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan dan finalisasi LAKIP untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan /kegagalan kinerja serta perbaikan/ penyempurnaannya	Telah dilakukan review berjenjang melalui Rapat bersama Kepala BDI Medan terkait Evaluasi LAKIP Review LAKIP 2024 dan melengkapi LAKIP tahun 2025 dengan membandingkan dengan target menengah dan membandingkan dengan satker sejenis secara nasional	Telah diselesaikan
5	Memanfaatkan data dan informasi dalam SAKIP untuk perencanaan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja di tahun berikutnya.	Telah dilakukan pemanfaatan data dan informasi dalam SAKIP melalui Rapat Evaluasi SAKIP dan LAKIP Tahun 2025 untuk penyusunan Renstra 2025-2029, Perkin 2026 dan Renkin 2026.	Telah diselesaikan

Perbandingan Capaian Nilai SAKIP dengan jangka menengah Tahun 2021-2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 3.24**  
**Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Dengan Jangka Menengah**  
**Tahun 2022-2025**

Tahun	2022	2023	2024	2025
Target	74	75	72	79.45
Realisasi	71.10	72.40	75.25	79.35
Capaian	96.08%	96.53%	104.51%	99.87%

Jika dibandingkan jangka menengah tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan secara signifikan realisasi Nilai SAKIP BDI Medan. Namun demikian, terjadinya penurunan capaian sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 lebih disebabkan adanya kelemahan dari kualitas penerapan SAKIP yang perlu terus disempurnakan dimasa depan.

Perbandingan Capaian Nilai SAKIP dengan Satker Lainnya Secara Nasional Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 3.25**  
**Perbandingan Capaian Nilai SAKIP BDI Medan Dengan Satker Lainnya**  
**Secara Nasional Tahun 2025**

Tahun	BDI Medan	PPVI	PTKI Medan	STTT Bandung	Pusdiklat SDMA	Pusdiklat SDMI	BBSPJIS Bandung
Target (%)	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	80.8
Realisasi (%)	79.35	76.95	79.1	72.05	77.4	80.2	81.5
Capaian	99.87%	96.85%	99.56%	90.69%	97.42%	100.94%	100.87%

Jika dibandingkan dengan satker lainnya secara nasional Tahun 2025, dapat dilihat bahwa BDI Medan sudah cukup baik, namun dalam hal capaian belum memenuhi target maka telah dilakukan upaya perbaikan penerapan SAKIP melalui evaluasi secara berkala dan reviu terhadap seluruh dokumen SAKIP oleh Tim SAKIP BDI Medan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 terkait pengelolaan SAKIP di BDI Medan dengan realisasi fisik 100% sebagai berikut :

- a. Penyiapan Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Aksi)
- b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I - IV (Rencana Aksi, Laporan PP 39 dan Data SIK)
- c. Penyiapan Dokumen Laporan Kinerja Triwulan I - IV
- d. Penyiapan Dokumen Lainnya terkait SAKIP
- e. Nilai akhir SAKIP 2025 adalah 79,35 atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 75,25 dan Tahun 2024 (72,40).
- f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dan telah ditetapkan laporan hasil evaluasi nomor 34/IJ-IND.2/LHEV/2025.

Secara umum IKSK 3.2 menunjukkan kinerja yang cukup baik walaupun belum memenuhi target indikator kinerja, dimana terdapat beberapa tantangan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya yaitu belum sempurnanya indikator kinerja berbasis SMART, masih lemahnya analisis *benchmarking* nasional serta belum adanya penggunaan aplikasi dalam khusus dalam proses kegiatan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu BDI

Medan telah melakukan upaya penyempurnaan indikator kinerja berbasis SMART, penguatan *benchmarking* perbandingan kinerja dengan satker atau L/K lainnya secara nasional dan pada tahun ini BDI Medan sedang mengembangkan aplikasi baru untuk optimalisasi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.

3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.3 (IKSK3.3): Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.3 yaitu: Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BDI Medan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 75 dan terpenuhi sebesar 95,5% dengan capaian sebesar 127,33%. Perbandingan Capaian Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan dengan jangka menengah Tahun 2021-2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 3.26**

**Perbandingan Capaian Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BDI Medan Dengan Jangka Menengah Tahun 2022-2025**

Tahun	2022	2023	2024	2025
Target	74	75	78	75
Realisasi	67.90	82.25	92.45	95.5
Capaian	91.76%	109.67%	118.53%	127.33%

Jika dibandingkan jangka menengah tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan realisasi Nilai Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan capaian nilai laporan keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa pengelolaan laporan dan analisis keuangan BDI Medan semakin baik.

Perbandingan Capaian Nilai Laporan Keuangan dengan Satker Lainnya Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 3.27**

**Perbandingan Capaian Nilai Laporan Keuangan BDI Medan Dengan Satker Lainnya Secara Nasional Tahun 2025**

Tahun	BDI Medan	STMI Banda Aceh	PTKI Medan	SMK Padang	STTT Bandung	ATK Yogyakarta	AKA Bogor
Target (%)	75	75	75	75	75	75	80
Realisasi (%)	95.5	92	93	98	97	98	90.75

Capaian	127.33%	122.67%	124.00%	130.67%	129.33%	130.67%	113.44%
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Jika dibandingkan dengan satker lainnya secara nasional Tahun 2025, dapat dilihat bahwa nilai laporan dan analisis keuangan BDI Medan sudah cukup baik namun tetap terus diupayakan adanya perbaikan dan penyempurnaan dimasa depan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 terkait pengelolaan dan Analisis Laporan Keuangan di BDI Medan dengan realisasi fisik 100% sebagai berikut :

- a. Pengarahan dan Koordinasi dengan Pusat dan Internal BDI Medan
- b. Pengumpulan dokumen laporan keuangan
- c. Nilai Laporan Keuangan tahun 2025 sebesar 95,5 atau meningkat sebesar 3,29% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 92,45.
- d. BDI Medan berada di rangking 13 dari 57 satker Kemenperin dan rangking 2 dari 7 BDI di lingkup BPSDMI.

Secara umum IKSK 3.3 menunjukkan kinerja yang cukup baik atau telah memenuhi target indikator kinerja, namun masih terdapat beberapa tantangan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya yaitu terus memperkuat komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan melalui penguatan tertib administrasi guna menjamin keberlanjutan opini kualitas laporan keuangan yang valid dan andal.

#### 4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.4 (IKSK3.4): Indeks Profesionalitas ASN

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.4 yaitu: Indeks Profesionalitas ASN BDI Medan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 81,3% dan terpenuhi sebesar 81,61% dengan capaian sebesar 100,38%. Secara rinci Capaian Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BDI Medan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.28**

#### **Capaian IKSK3.4. Indeks Profesionalitas ASN BDI Medan Tahun 2025**

No.	Aspek IP ASN	Nilai
1	Kualifikasi	21.77
2	Kompetensi	27.9
3	Kinerja	26.94

4	Disiplin	5.00
	<b>Total Nilai IPASN</b>	<b>81.61</b>
	<b>Target IPASN 2025</b>	<b>81.3</b>
	<b>Capaian (%)</b>	<b>100.38</b>

Penilaian IPASN BDI Medan dilakukan terhadap 31 Pegawai ASN BDI Medan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian pada Tahun 2025. Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN dengan jangka menengah Tahun 2021-2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 3.29**  
**Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN BDI Medan**  
**Dengan Jangka Menengah Tahun 2021-2025**

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	71	73	71	72	81.3
Realisasi	76.40	78.69	83.82	83.84	81.61
Capaian	107.61%	107.79%	118.06%	116.44%	100.38%

Jika dibandingkan jangka menengah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pada capaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN. Terjadinya penurunan capaian sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 lebih disebabkan adanya kenaikan target yang ditetapkan oleh BPSDMI.

Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN dengan Satker K/L lainnya Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 3.30**  
**Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN BDI Medan**  
**Dengan Satker dan K/L Lainnya Secara Nasional Tahun 2025**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang	BPPSDM Kelautan
Target (%)	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	82
Realisasi (%)	81.61	84.25	84.26	83.26	88.76	89.28	80.26	65
Capaian	100.38%	103.63%	103.64%	102.41%	109.18%	109.82%	98.72%	79.27%

Jika dibandingkan dengan Satker dan K/L lainnya Tahun 2025 secara nasional, dapat dilihat bahwa BDI Medan sudah cukup baik dalam capaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN yaitu 100,38%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 terkait pengelolaan IPASN di BDI Medan dengan realisasi fisik 100% sebagai berikut :

- a. Pendataan kedisiplinan pegawai,
- b. Pendataan kinerja pegawai,
- c. Melakukan analisa pengembangan kompetensi pegawai,
- d. Melakukan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai,
- e. Penilaian SKP oleh Pimpinan.

Secara umum IKSK 3.4 menunjukkan kinerja yang cukup baik atau telah memenuhi target indikator kinerja, namun masih terdapat beberapa tantangan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya yaitu belum optimalnya kompetensi ASN, sehingga BDI Medan perlu melakukan optimalisasi kompetensi ASN melalui penguatan diseminasi informasi dan dukungan manajerial sistematis guna memfasilitasi partisipasi diklat fungsional yang berkelanjutan serta berdampak pada penguatan kinerja organisasi secara kolektif.

#### 5. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.5 (IKSK3.5): Nilai IKPA

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.5 yaitu: Nilai IKPA BDI Medan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 93,4 dan terpenuhi sebesar 97,45 dengan capaian sebesar 104,34%. Secara rinci Capaian Realisasi Nilai IKPA BDI Medan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.31**  
**Capaian IKSK3.5. Nilai IKPA BDI Medan Tahun 2025**

Aspek	Indikator	Nilai
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100.00
	Deviasi Halama III DIPA	90.10
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	94.67
	Belanja Kontraktual	100.00
	Penyelesaian Tagihan	100.00
	Pengelolaan UP dan TUP	99.98
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100.00
<b>Nilai IKPA</b>		<b>97.45</b>
<b>Target IKPA 2025</b>		<b>93.40</b>
<b>Capaian (%)</b>		<b>104.34%</b>

Perbandingan Capaian Nilai IKPA BDI Medan dengan BDI Lainnya Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 3.32**  
**Perbandingan Capaian Nilai IKPA BDI Medan**  
**Dengan BDI Lainnya Tahun 2025**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang
Target (%)	93.4	94	94	94	94	94	94
Realisasi (%)	97.45	97.43	98.44	90.42	95.4	97.38	93.76
Capaian	104.34%	103.65%	104.72%	96.19%	101.49%	103.60%	99.74%

Jika dibandingkan dengan BDI lainnya Tahun 2025, dapat dilihat bahwa Nilai IKPA BDI Medan cukup baik dari capaian maupun nilai IKPA. Hal ini merupakan prestasi yang cukup baik bagi BDI Medan dalam pengelolaan anggaran guna mendukung pencapaian output kinerja yang optimal.

Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Satker K/L Lainnya Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 3.33**  
**Perbandingan Capaian Nilai IKPA BDI Medan Dengan Satker Lainnya**  
**Tahun 2025**

Tahun	BDI Medan	STMI Banda Aceh	PTKI Medan	SMK Padang	STTT Bandung	ATK Yogyakarta	AKA Bogor
Target (%)	75	75	75	75	75	75	80
Realisasi (%)	95.5	92	93	98	97	98	90.75
Capaian	127.33%	122.67%	124.00%	130.67%	129.33%	130.67%	113.44%

Nilai IKPA BDI Medan memiliki capaian 104,34%, dan itu menunjukkan bahwa nilai tersebut sudah baik dibandingkan dengan satker lainnya Tahun 2025 berdasarkan tabel di atas.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 terkait pengelolaan IKPA di BDI Medan dengan realisasi fisik 100% sebagai berikut :

- a. Pengarahan dan Koordinasi
- b. Perlengkapan dokumen
- c. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan
- d. Melakukan identifikasi besaran UP Tunai dan KKP secara rasional dan menggunakannya secara efektif dan efisien.

- e. Melaksanakan Rapat RPD dengan masing-masing penanggung jawab kegiatan mencegah deviasi hal.III DIPA
- f. Nilai IKPA posisi tahun 2025 adalah 97,45 atau capaian sebesar 104,34% dibanding target 2025
- g. Nilai IKPA juga meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 91,52.

Secara umum IKSK 3.5 menunjukkan kinerja yang cukup baik atau telah memenuhi target indikator kinerja, namun masih terdapat beberapa tantangan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya yaitu belum optimalnya disiplin fiskal, sehingga Bdi Medan perlu meningkatkan optimalisasi IKPA melalui penguatan disiplin fiskal dan konsistensi kepatuhan administratif secara berkelanjutan.

6. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.6 (IKSK3.6): Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.6 yaitu: Nilai SKM BDI Medan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 91,3 dan terpenuhi sebesar 91,53 dengan capaian sebesar 100,25%. Secara rinci Capaian Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat BDI Medan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.34**

**Capaian IKSK 3.6. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat BDI Medan Tahun 2025**

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1	Pelatihan/Diklat	106	89.15	<b>87.50</b>	90.57	100	93.4	90.09	90.09	89.86	92.22	86.44
2	Pendampingan	3	83.33	83.33	83.33	100	83.33	91.67	83.33	83.33	83.33	86.11
3	Konsultasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kemitraan	14	89.29	92.86	91.07	100	91.07	92.86	91.07	100	92.86	90.87
Rerata IKM Per Unsur			89.02	88.01	90.45	100	92.89	92.89	90.04	90.85	92.07	87.8
<b>Nilai SKM Unit Layanan 2025</b>			<b>91.53</b>									
<b>Mutu Unit Layanan</b>			<b>A</b>									
<b>Target SKM 2025</b>			<b>91.3</b>									
<b>Capaian (%)</b>			<b>100.25%</b>									

Perbandingan Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat BDI Medan dengan BDI lainnya Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 3.35**  
**Perbandingan Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**  
**BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang
Target (%)	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3
Realisasi (%)	91.53	97.75	86.25	95.58	87.60	88.50	85.63
Capaian	100.25%	107.06%	94.47%	104.68%	95.95%	96.93%	93.78%

Jika dibandingkan dengan BDI lainnya Tahun 2025, dapat dilihat bahwa Nilai SKM BDI Medan sudah cukup baik, namun perlu adanya upaya untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peningkatan kualitas layanan publik baik program diklat dan inkubator bisnis.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 terkait pengelolaan SKM di BDI Medan dengan realisasi fisik 100% sebagai berikut :

- a. Menyusun instrumen survei
- b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel
- c. Laporan hasil SKM sedang dalam proses penyelesaian oleh Tim Layanan.

Secara umum IKSK 3.6 menunjukkan kinerja yang cukup baik atau telah memenuhi target indikator kinerja, namun masih terdapat beberapa tantangan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya yaitu belum optimalnya proses transformasi layanan publik, sehingga BDI Medan perlu melakukan optimalisasi layanan melalui digitalisasi sertifikasi untuk efisiensi waktu, revitalisasi infrastruktur asrama dan konektivitas, serta penguatan unit pengaduan berbasis Service Level Agreement (SLA) demi menjamin responsivitas dan kenyamanan pengguna layanan secara menyeluruh.

7. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.7 (IKSK3.7): Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan (UK)

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.7 yaitu: Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan (UK) BDI Medan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 70 dan terpenuhi sebesar 93,67% dengan capaian sebesar

133,81%. Secara rinci Capaian Realisasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan (UK) BDI Medan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.36**

**Capaian IKSK3.7. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan (UK) BDI Medan Tahun 2025**

No.	Aspek	Nilai Standar	Nilai	Bobot Sub-Aspek	Nilai Sub Aspek	Bobot Aspek	Nilai Akhir
1	Pengelolaan Arsip Dinamis	1100			100.00	60%	60.00
	a. Pengendalian Naskah Dinas	100	100	10%	10.00		
	b. Penggunaan	100	100	25%	25.00		
	c. Pemeliharaan	700	700	35%	35.00		
	d. Penyusutan	200	200	30%	30.00		
2	Sumber Daya Kearsipan	500			84.17	40%	33.67
	a. SDM Kearsipan	300	250	50%	41.67		
	b. Sarana dan Prasarana Kearsipan	200	170	50%	42.50		
	<b>Total Nilai Akhir Kearsipan</b>					<b>100%</b>	<b>93.67</b>
	<b>Predikat</b>	<b>AA (Sangat Memuaskan)</b>					
	<b>Target Nilai Kearsipan Tahun 2025</b>	<b>70,1</b>					
	<b>Capaian (%)</b>	<b>133.62%</b>					

Perbandingan Capaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan (UK) BDI Medan dengan BDI lainnya 2025 dijelaskan pada Tabel 3.35 sebagai berikut:

**Tabel. 3.37**

**Perbandingan Capaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan (UK) Dengan BDI Lainnya Tahun 2025**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang
Target (%)	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1
Realisasi (%)	93.67	96.67	75.1	88.67	96.67	86.8	90.67
Capaian	133.62%	138%	107%	126%	138%	124%	129%

Jika dibandingkan dengan BDI lainnya Tahun 2025, maka dapat dilihat bahwa Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan (UK) BDI Medan sudah cukup baik, namun perlu upaya perbaikan dalam bentuk penyelesaian pembuatan daftar berkas, registrasi dan lainnya secara optimal.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 terkait pengelolaan Kearsipan di BDI Medan dengan realisasi fisik 100% sebagai berikut:

- a. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif yang tercipta dengan elektronik (Tte) dan melakukan pemberkasan arsip secara elektronik sesuai kaidah kearsipan (melalui google drive);
- b. Meregistrasikan naskah masuk ke dalam aplikasi srikandi;
- c. Meregistrasikan naskah keluar ke aplikasi srikandi;
- d. Memberkaskan naskah masuk dan naskah keluar ke dalam aplikasi srikandi;
- e. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif dan inaktif (arsip tekstual).

Secara umum IKSK 3.7 menunjukkan kinerja yang cukup baik atau telah memenuhi target indikator kinerja, namun masih terdapat beberapa tantangan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya yaitu belum optimalnya proses pengelolaan kearsipan, sehingga BDI Medan perlu terus meningkatkan kualitas manajemen kearsipan dan optimalisasi kepatuhan kearsipan melalui sertifikasi kompetensi arsiparis, standardisasi naskah dinas, serta penguatan koordinasi lintas unit dalam penyelesaian siklus hidup arsip guna mewujudkan tata kelola administrasi yang akuntabel dan selaras dengan regulasi nasional.

8. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.8 (IKSK3.8): Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.8 yaitu: Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BDI Medan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 77% dan terpenuhi sebesar 83,28% dengan capaian sebesar 108,16%. Secara rinci Capaian Realisasi Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BDI Medan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.38**

**Capaian IKSK3.8. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BDI Medan Tahun 2025**

No.	Indikator	Bobot		Pemen- uahan Data Dukung (Range 0-1)	Nilai	Range Penilaian Pusdatin	Nilai Pusdat- in	Range Penilaian Akhir	Nilai Akhir
	<b>TATA KELOLA SPBE</b>	<b>100%</b>	<b>45%</b>		<b>0</b>		<b>33.98</b>		<b>38.45</b>
1	1 Reviu Arsitektur SPBE Kemenperin telah dilaksanakan	8%		0	0	0.3	2.4	0.5	4.00
	2 Reviu Peta Rencana SPBE Kemenperin telah dilaksanakan	8%		0	0	0.5	4	0.8	6.40
	3 Konsultasi Rencana dan Anggaran SPBE dengan Pusdatin telah dilakukan	15%		0	0	1.0000	15.0000	1.0500	15.75

No.	Indikator	Bobot	Pemen-uan Data Dukung (Range 0-1)	Nilai	Range Penilaian Pusdatin	Nilai Pusdatin	Range Penilaian Akhir	Nilai Akhir
4	Reviu Rencana dan Anggaran SPBE telah dilaksanakan	4%	0	0	1	4	0.2	0.80
5	Reviu inovasi proses bisnis telah dilaksanakan	3%	0	0	0	0	0	0.00
6	Proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada Pusdatin	15%	0	0	1	15	1	15.00
7	Pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi	20%	0	0	1	20	1	20.00
8	Reviu pembangunan aplikasi SPBE telah dilaksanakan	7%	0	0	0.5	3.5	0.5	3.50
9	Reviu layanan Pusat Data Kemenperin dan Layanan Pusat Data Pemerintah	7%	0	0	0	0	1	7.00
10	Reviu tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Kemenperin	7%	0	0	0.8	5.6	1	7.00
11	Reviu pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan	6%	0	0	1	6	1	6.00
<b>MANAJEMEN SPBE</b>		<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>0</b>		<b>12.5</b>		<b>19.13</b>
<b>2</b>	12 Reviu Manajemen Data SPBE telah dilaksanakan	20%	0	0	1	20	1	20.00
	13 Reviu Manajemen Keamanan Informasi SPBE telah dilaksanakan	20%	0	0	0	0	0.5	10.00
	14 Reviu Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan	10%	0	0	1	10	1	10.00
	15 Reviu Manajemen Aset TIK (SPBE) telah dilaksanakan	10%	0	0	1	10	1	10.00
	16 Reviu Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE telah dilaksanakan	10%	0	0	1	10	1	10.00
	17 Reviu Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan	5%	0	0	0	0	0.3	1.50
	18 Reviu Manajemen Perubahan SPBE telah dilaksanakan	10%	0	0	0	0	0	0.00
	19 Reviu Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan	15%	0	0	0	0	1	15.00
<b>LAYANAN SPBE</b>		<b>100%</b>	<b>30%</b>	<b>0</b>		<b>13.5</b>		<b>20.70</b>
<b>3</b>	20 Reviu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	20%	0	0	1	20	1	20.00
	21 Reviu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	25%	0	0	1	25	1	25.00
	22 Reviu Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	25%	0	0	0	0	0	0.00
	23 Reviu Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik	30%	0	0	0	0	0.8	24.00
<b>Nilai Awal</b>				<b>0</b>		<b>59.98</b>		<b>78.28</b>
<b>Nilai Akhir SPBE Tahun 2025</b>						<b>Hasil Akhir (+5)</b>		<b>83.28</b>
<b>Target SPBE Tahun 2025</b>								<b>77.00</b>
<b>Capaian (%)</b>								<b>108.16%</b>

Perbandingan Capaian Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan BDI lainnya Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 3.39**  
**Perbandingan Capaian Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dengan BDI Lainnya Tahun 2021-2025**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang
Target (%)	77	77	77	77	77	77	77
Realisasi (%)	83.28	40.17	75.71	82.32	79.15	87.03	87.63
Capaian	108.16%	52.17%	98.32%	106.91%	102.79%	113.03%	113.81%

Jika dibandingkan dengan BDI lainnya Tahun 2025, dapat dilihat bahwa Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BDi Medan sudah cukup baik yaitu berada pada peringkat ketiga setelah BDI Padang dan BDI Jogjakarta.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 terkait pengelolaan SPBE di BDI Medan dengan realisasi fisik 100% sebagai berikut:

- a. Penerapan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik,
- b. Perumusan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
- d. Melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM SPBE Pusat Data dan Informasi.

Secara umum IKS 3.8 menunjukkan kinerja yang cukup baik atau telah memenuhi target indikator kinerja, namun masih terdapat beberapa tantangan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya yaitu belum optimalnya indeks SPBE, sehingga BDI Medan perlu mengoptimalkan indeks SPBE melalui penguatan koordinasi strategis dengan Pusdatin guna penyelarasan arsitektur sistem informasi, yang didukung oleh kolaborasi lintas satker untuk adopsi praktik terbaik dan pemenuhan bukti dukung penilaian yang lebih akurat.

9. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.9 (IKSK3.9): Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada BDI Medan

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.9 yaitu: Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada BDI Medan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 60% dan terpenuhi sebesar 100% dengan capaian sebesar 166,67%.

Perbandingan Capaian Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan jangka menengah Tahun 2021-2025 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel. 3.40**

**Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi pada BDI Medan Dengan Jangka Menengah Tahun 2021-2025**

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	92%	92%	92%	92%	60%
Realisasi	98%	100%	100%	100%	100%

Capaian	107.10%	108.70%	108.70%	108.46%	166.67%
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Jika dibandingkan jangka menengah tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan realisasi Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian. Terjadinya penurunan target pada tahun 2025 sesuai arahan dari BPSDMI.

Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada BDI Medan dengan BDI Lainnya Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 3.41**

**Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti pada BDI Medan Dengan BDI Lainnya Tahun 2025**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang
Target	60%	60%	60 %	60%	60%	60%	60%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	167%	167%	167%	167%	167%	167%	167%

Jika dibandingkan dengan BDI lainnya Tahun 2025, dapat dilihat bahwa BDI Medan memiliki peringkat yang sama dalam capaian realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada BDI Medan yaitu 167%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal di BDI Medan dengan realisasi fisik 100% sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan kegiatan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan ke Inspektorat Jenderal dengan melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM APIP Inspektorat Jenderal.
- b. Adapun hasil temuan sebanyak 4 temuan dan 11 rekomendasi telah selesai sesuai dengan lingkup program dan keuangan yang telah diaudit.
- c. Persentasi rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti adalah 100%.

Secara umum IKSK 3.9 menunjukkan kinerja yang cukup baik atau telah memenuhi target indikator kinerja, namun demikian BDI Medan terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan melalui komitmen mitigasi risiko proaktif dan kepatuhan absolut guna menjamin akuntabilitas serta efisiensi tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

### 3.2 Analisis Akuntabilitas Keuangan

Analisis akuntabilitas keuangan digambarkan dengan capaian realisasi keuangan/anggaran merupakan analisis kinerja berdasarkan realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran Tahun 2025 secara keseluruhan sebesar 7,708,422,622,- atau mencapai 99,83% dari pagu revisi anggaran tahun 2025, dengan rincian untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen masing-masing sebesar 99,73% dan 99,84%. Berikut rincian realisasi anggaran kegiatan yang dilaksanakan Balai Diklat Industri Medan berdasarkan komponen kegiatan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

**Tabel 3.42**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Kode Akun dan Jenis Program**  
**Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 (Rp Ribu)**

Kode Akun	Jenis Program	Pagu Awal	Pagu Revisi DIPA 12	Pagu Blokir	Pagu Non Blokir	Realisasi	Capaian
<b>019.10 DL</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>	<b>1,423,000</b>	<b>1,128,000</b>	<b>-</b>	<b>1,128,000</b>	<b>1,124,913</b>	<b>99.73%</b>
4957.BDB	Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga	155,000	-	-	-	-	0.00%
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	180,000	40,000	-	40,000	39,827	99.57%
4957.QDJ	Fasilitasi Dan Pembinaan Start Up	100,000	100,000	-	100,000	99,871	99.87%
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	988,000	988,000	-	988,000	985,214	99.72%
<b>019.10 WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>7,511,350</b>	<b>7,878,694</b>	<b>1,284,908</b>	<b>6,593,786</b>	<b>6,583,509</b>	<b>99.84%</b>
CCL OM	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	53,830	53,830	33,830	20,000	19,992	99.96%
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,031,350	7,248,694	891,238	6,357,456	6,354,675	99.96%
6043.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	426,170	426,170	359,840	66,330	59,974	90.42%
6043.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	150,000	-	150,000	148,868	99.25%
<b>Total</b>		<b>8,934,350</b>	<b>9,006,694</b>	<b>1,284,908</b>	<b>7,721,786</b>	<b>7,708,422</b>	<b>99,83%</b>

Realisasi keuangan dan fisik BDI Medan sampai dengan 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.43**

**Realisasi Keuangan dan Fisik Berdasarkan Rincian Output BDI Medan Tahun 2025**

Kode Akun	Jenis Program	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian Keuangan	Realisasi Fisik
<b>019.10 DL</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>	<b>1,423,000,000</b>	<b>1,128,000,000</b>	<b>1,124,913,127</b>	<b>99.73%</b>	<b>100%</b>
4957.BDB	Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga	155,000,000	-	-	0.00%	0%
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	180,000,000	40,000,000	39,827,290	99.57%	100%
4957.QDJ	Fasilitasi Dan Pembinaan Start Up	100,000,000	100,000,000	99,871,289	99.87%	100%
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	988,000,000	988,000,000	985,214,548	99.72%	100%
<b>019.10 WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>7,511,350,000</b>	<b>6,593,786,000</b>	<b>6,583,509,495</b>	<b>99.84%</b>	<b>100%</b>
CCL OM	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	53,830,000	20,000,000	19,992,340	99.96%	100%
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,031,350,000	6,357,456,000	6,354,674,619	99.96%	100%
6043.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	426,170,000	66,330,000	59,973,616	90.42%	100%
6043.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	150,000,000	148,868,920	99.25%	100%
<b>Total</b>		<b>8,934,350,000</b>	<b>7,721,786,000</b>	<b>7,708,422,622</b>	<b>99.83%</b>	<b>100%</b>

Pada Tabel diatas menggambarkan adanya penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian target per indikator kinerja secara spesifik tahun 2025. Pada indikator kinerja lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi dalam bentuk kegiatan Diklat, penggunaan anggaran sebesar 99,72% untuk pencapaian target indikator kinerja utama. Demikian juga dengan indikator kinerja lainnya dimana penggunaan anggaran dibawah 100% untuk mendukung pencapaian kinerja diatas 100% pada tahun 2025.

Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 99,83% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Perbandingan realisasi penyerapan anggaran Balai Diklat Industri Medan dengan jangka menengah sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.44**

**Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Balai Diklat Industri Medan Dengan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2025 (Dalam Ribuan Rp)**

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pagu	28,846,378	21,233,229	18,132,882	29,263,406	20,385,939	7,721,786
Realisasi	26,452,810	21,176,927	17,536,655	25,782,949	20,312,326	7,708,423
Capaian	91.70%	99.73%	96.71%	88.11%	99.64%	99.83%

Perbandingan realisasi anggaran BDI Medan dengan jangka menengah sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan adanya fluktuasi, namun dalam 3 tahun terakhir capaian penyerapan anggaran menunjukkan adanya trend positif, dimana tahun 2025 merupakan capaian penyerapan anggaran tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu 99,83%.

Perbandingan capaian realisasi anggaran BDI Medan dengan BDI Lainnya pada tahun anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.45**  
**Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran**  
**BDI Medan dengan BDI Lainnya Tahun 2025 (Rp Ribu)**

Tahun	BDI Medan	BDI Jakarta	BDI Surabaya	BDI Makassar	BDI Denpasar	BDI Yogyakarta	BDI Padang
Pagu	7,721,786	10,057,483	8,584,159	7,680,879	14,027,451	8,831,908	7,295,986
Realisasi	7,708,423	10,054,015	8,583,715	7,638,841	13,950,973	8,831,850	7,295,582
Capaian	99.83%	99.97%	99.99%	99.45%	99.45%	99.999%	99.99%

Secara nasional jika dibandingkan dengan BDI Lainnya, capaian realisasi anggaran BDI Medan pada tahun 2025 sudah cukup baik yaitu berada di peringkat 5 dari 7 BDI lainnya di lingkup Kemenperin. BDI Medan akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran di masa yang akan datang dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan efisien.

### 3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Keuangan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya keuangan BDI Medan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja. Pengukuran efisiensi Rincian Output (RO) yang dilakukan di tingkat RO sebagaimana dimaksud di atas menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E_{RO} = \frac{\left( \sum_{i=1}^n (AA_{ROi} \times CRO_{ROi}) - RA_{ROi} \right)}{\sum_i^n (AA_{ROi})} \times 100\%$$

Keterangan :

$E_{RO}$  : Efisiensi RO di tingkat satuan kerja

AARO<sub>i</sub> : Alokasi Anggaran ROI  
 RARO<sub>i</sub> : Realisasi Anggaran ROI  
 CRO<sub>i</sub> : Capaian ROI

Berdasarkan penggunaan rumus efisiensi diatas diperoleh hasil efisiensi RO berdasarkan Rincian Output BDI Medan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.46**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Berdasarkan Rincian Output**  
**BDI Medan Tahun 2025**

Kode	Rincian Output (RO)	Capaian (CRO)	Alokasi Anggaran (AA RO)	Realisasi Anggaran (RARO) (*)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi RO	Efisiensi RO Skala 100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (3)	(7) = (6) - (5)	(8) = ((7) / (4)) x 100%	(9) = (50%) + ((8) x 50/20)
019.10 DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	126%	1,128,000,000	1,124,913,127	1,419,276,316	294,363,189	26.10%	115.24%
4957.BDB	Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga	100%	-	-	-	-	-	50.00%
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	100%	40,000,000	39,827,290	40,000,000	172,710	0.43%	51.08%
4957.QDJ	Fasilitasi Dan Pembinaan Start Up	200%	100,000,000	99,871,289	200,000,000	100,128,711	100.13%	300.32%
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	103%	988,000,000	985,214,548	1,020,500,000	35,285,452	3.57%	58.93%
<b>019.10 WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>100%</b>	<b>6,593,786,000</b>	<b>6,583,509,495</b>	<b>6,593,786,000</b>	<b>10,276,505</b>	<b>0.16%</b>	<b>50.39%</b>
CCL OM	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	20,000,000	19,992,340	20,000,000	7,660	0.04%	50.10%
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%	6,357,456,000	6,354,674,619	6,357,456,000	2,781,381	0.04%	50.11%
6043.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	100%	66,330,000	59,973,616	66,330,000	6,356,384	9.58%	73.96%
6043.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	100%	150,000,000	148,868,920	150,000,000	1,131,080	0.75%	51.89%
<b>Total</b>		<b>113%</b>	<b>7,721,786,000</b>	<b>7,708,422,622</b>	<b>8,718,760,015</b>	<b>1,010,337,393</b>	<b>13.08%</b>	<b>82.71%</b>

Berdasarkan table tersebut di atas, secara umum tingkat efisiensi penggunaan anggaran di BDI Medan pada Tahun 2025 cukup baik, hal ini terlihat dari nilai efisien secara total mencapai 13,08% atau 82,71% (Skala 1-100). Tingkat efisiensi anggaran pada output indikator kinerja utama yaitu kegiatan inkubator bisnis yaitu sebesar 300,25%, hal ini lebih disebabkan capaian output pada program inkubator bisnis sebesar 200%.

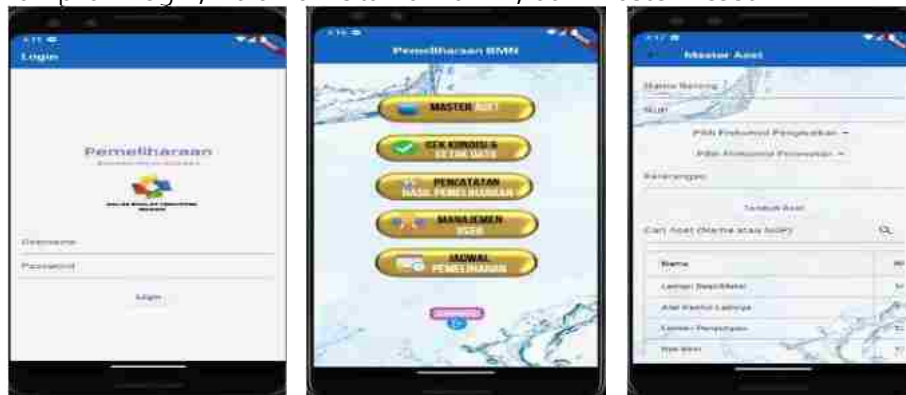
### 3.4 Inovasi

1. Penerapan Aplikasi Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) Balai Diklat Industri Medan

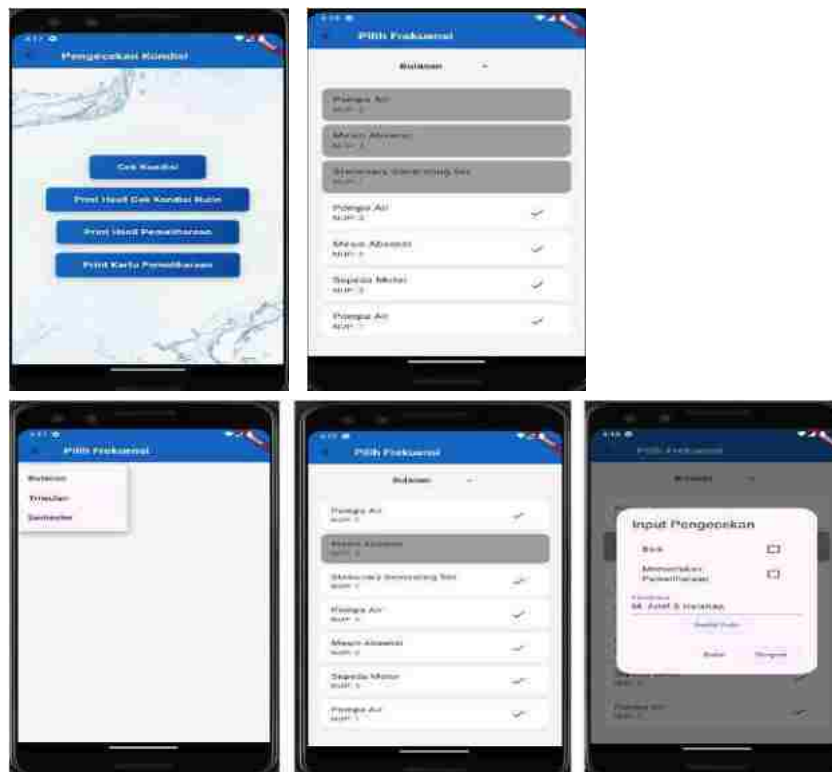
Aplikasi Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang dirancang untuk mengelola pemeliharaan asset milik Balai Diklat Industri Medan secara lebih terstruktur. Aplikasi ini membantu menyusun rencana pemeliharaan berdasarkan kondisi asset dan Data yang dikumpulkan

digunakan untuk membuat laporan digital yang transparan dan dapat diakses untuk evaluasi serta pengambilan keputusan lebih lanjut. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pencatatan riwayat pemeliharaan, jadwal perawatan, serta pengecekan kondisi aset secara real-time. Fitur utamanya termasuk pengingat otomatis, pencatatan digital. Adapun tampilan menu sebagai berikut :

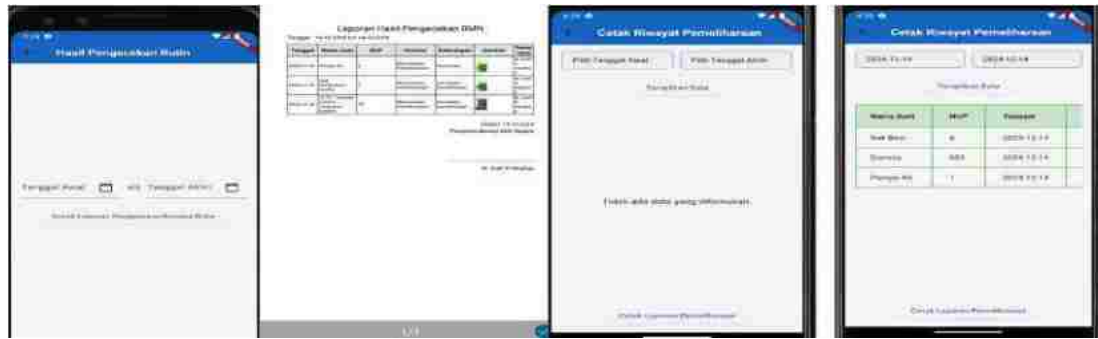
a. Tampilan Login, Halaman Utama Admin, dan Master Asset



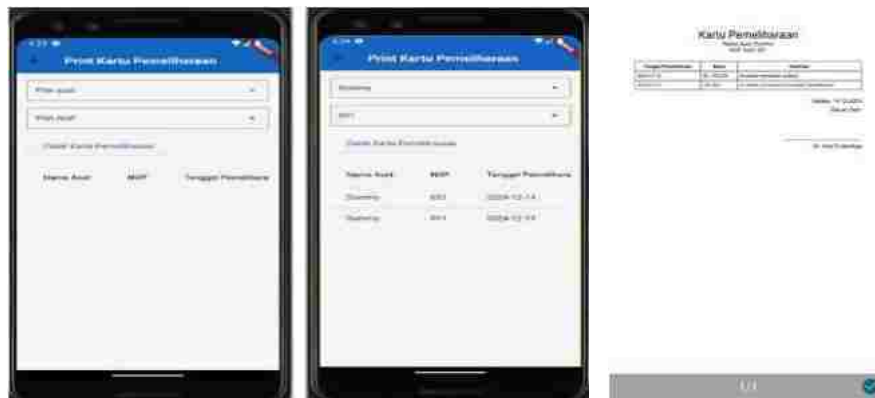
b. Tampilan Halaman Cek Kondisi dan Cek Data



c. Tampilan Halaman Print Hasil Cek Kondisi Rutin dan Hasil Pemeliharaan



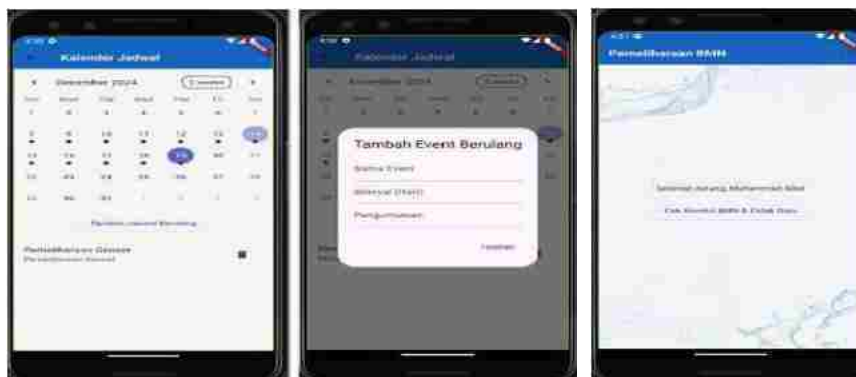
d. Tampilan Print Kartu Pemeliharaan



e. Tampilan Pencatatan Hasil Pemeliharaan



f. Tampilan Jadwal Pemeliharaan dan Halaman Utama User



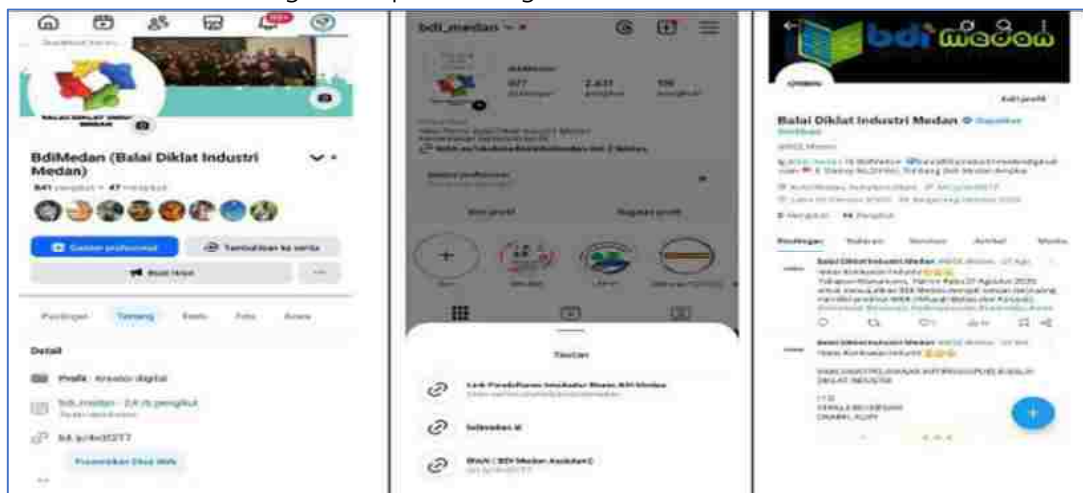
2. Penerapan Penggunaan Chat Bot AI Dalam Rangka Optimalisasi Sarana Promosi Pelayanan Publik Berbasis Mobile di Balai Diklat Industri Medan

BDI Medan Asisten (BIAN) merupakan Chat Bot AI asisten virtual dan berbasis digital yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses data terkait produk layanan Balai Diklat Industri Medan melalui platform media social BDI Medan. Untuk dapat mengakses produk layanan BDI Medan, dapat dilakukan dengan cara scan barcode berikut ini atau klik "Join Us!", jika ingin segera mengaksesnya, disamping itu dapat juga melalui klik link berikut <https://typebot.co/quick-carb-calculator-7cx6shh>.



Jika melakukan chat WhatsApp BDI Medan, maka akan diperoleh pesan otomatis yang akan diarahkan ke BIAN.

Di samping itu, BIAN juga telah diintegrasikan dengan berbagai platform media sosial BDI Medan dengan tampilan sebagai berikut :



### 3.5 Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BDI Medan sebagai berikut:

1. BDI Medan belum memiliki sarana dan prasarana seperti fasilitas workshop yang memadai baik untuk proses pelatihan maupun praktek lapangan khususnya alat dan tempat uji kompetensi (TUK) mandiri.
2. BDI Medan memiliki keterbatasan jumlah asesor di LSP Balai Diklat Industri Medan untuk memenuhi seluruh skema uji kompetensi yang dimiliki.
3. Jumlah instruktur yang memiliki kompetensi teknis sesuai spesialisasi BDI Medan terbatas sehingga di butuhkan sertifikasi kompetensi teknis.
4. Tidak bertambahnya Program diklat yang sesuai kebutuhan industri dikarenakan keterbatasan anggaran.
5. Belum optimalnya proses kegiatan penerapan SAKIP BDI Medan yang ditandai dengan lemahnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.

### 3.6 Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi tersebut di atas, maka beberapa rekomendasi tindak lanjut perbaikan yang perlu dilakukan oleh BDI Medan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan BPSDMI terkait usulan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pelatihan maupun praktek lapangan khususnya alat dan tempat uji kompetensi (TUK) mandiri.
2. Mendorong atau mensosialisasikan kepada instruktur dan asesor untuk memperoleh sertifikat kompetensi teknis.
3. Mendorong pelaksanaan diklat berbasis PNBPN dengan cara menawarkan Proposal kerjasama diklat dengan BPDP, KP2MI, Perusahaan Industri, Pemda dan promosi diklat berbayar.
4. Melakukan koordinasi dengan BPSDMI terkait usulan penambahan instruktur dan pelatihan/magang bagi instruktur di industri.

5. Menyusun modul pelatihan berbasis kompetensi untuk menunjang program diklat berbasis kompetensi di bidang: Pengelolaan Limbah: (PPPU dan PPPA) dan Perencanaan dan Pengendalian Produksi Pada Pabrik Kelapa Sawit (PPC).
6. Mendorong pelaksanaan kolaborasi program inkubator bisnis dengan BP2MI, Perusahaan Swasta, Perbankan, Pemerintah Daerah dan lainnya.
7. Pada Tahun 2026, Balai Diklat Industri Medan terus berupaya untuk meningkatkan optimalisasi penerapan SAKIP dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi SAKIP Tahun 2025 melalui perbaikan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja dan melakukan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen Tahunan serta pengembangan aplikasi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja satuan kerja Tahun 2025 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025-2029.

Secara umum, pencapaian kinerja Balai Diklat Industri Medan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dimana target kegiatan yang ditetapkan yaitu untuk diklat berbasis kompetensi dan inkubator bisnis pembentukan wirausaha telah mencapai target.

Penyerapan anggaran Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 7,708,422,622,- atau mencapai 99,83% dari pagu revisi non blokir anggaran tahun 2025. Penyerapan Anggaran Tahun 2025 merupakan yang terbaik selama 5 tahun terakhir.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat menjelaskan kinerja Balai Diklat Industri Medan selama Tahun 2025 dan menjadi bahan perbaikan bagi BDI Medan dimasa yang akan datang.

## LAMPIRAN

1. Sertifikat Penghargaan dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir untuk Program Inkubator Bisnis BDI Medan Tahun 2025



2. Sertifikat Penghargaan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Untuk Penerapan Sistem Manajemen Mutu LSP BDI Medan Tahun 2025



### 3. Pedoman Kinerja BDI Medan Tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
IKT	Persentase SDM Industri Yang Kompeten*	84,77	90	90,5	91	91,5	92
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Program pelatihan <i>skilling, reskilling dan upskilling</i> SDM Industri dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri melalui pelatihan berbasis kompetensi. Penyediaan SDM Industri yang kompeten dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan pada Balai Diklat Industri Medan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Industri. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan <i>skilling, reskilling dan upskilling</i> yang lulus uji kompetensi pada industri bidang kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan <i>oleo chemical</i> serta spesialisasi penunjang berbasis pangan, karet dan produk turunannya, pengelasan dan pengolahan limbah.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
<p>Berita acara lulusan diklat <i>skilling, reskilling dan upskilling</i>, Data Aplikasi SIDIA dan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat dan Penempatan pada Perusahaan Industri. Data lulusan pendidikan vokasi <i>skilling, reskilling dan upskilling</i> yang bekerja pada industri bidang kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan <i>oleo chemical</i> serta spesialisasi penunjang berbasis pangan, karet dan produk turunannya, pengelasan dan pengolahan limbah dan lulus uji kompetensi yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) baik sertifikat kompetensi dengan logo Garuda maupun skill passport.</p>							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
<p>Menghitung persentase SDM Industri Yang Kompeten dengan rumus sebagai berikut :</p> $A = B / C$ <p>Keterangan :</p> <p>A : Persentase SDM Industri Yang Kompeten            B : Jumlah Lulusan Diklat Vokasi Industri Yang Lulus Uji kompetensi            C : Jumlah Peserta Diklat <i>skilling, reskilling dan upskilling</i></p>							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Persen	Maksimasi	Tim Penyelenggara Diklat BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
SK1.1	Persentase Lulusan Peserta Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	-	93	93,5	94	94,5	95
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Program pelatihan <i>skilling</i> SDM Industri dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri melalui pelatihan berbasis kompetensi dan mengikuti sertifikasi kompetensi mengacu pada standar kompetensi serta lulusannya langsung ditempatkan pada perusahaan industri. Penyediaan SDM yang kompeten dan bersertifikat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan pada Balai Diklat Industri Medan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Industri. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan <i>skilling</i> yang terserap pada industri bidang kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan <i>oleo chemical</i> serta spesialisasi penunjang berbasis pangan, karet dan produk turunannya, pengelasan dan pengolahan limbah.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
<p>Berita acara penempatan lulusan diklat <i>skilling</i>, Data Aplikasi SIDIA dan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat <i>skilling</i> dan Penempatan pada Perusahaan Industri. Data lulusan pendidikan vokasi <i>skilling</i> yang bekerja dan memiliki sertifikasi kompetensi bidang industri yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) baik sertifikat kompetensi dengan logo Garuda maupun skill passport.</p>							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
<p>Menghitung persentase jumlah peserta diklat <i>skilling</i> pada Balai Diklat Industri yang lulus uji kompetensi dan telah bekerja dengan rumus sebagai berikut :</p> $A = B / C$ <p>Keterangan :</p> <p>A : Persentase Lulusan Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri  B : Jumlah Lulusan Diklat Yang Bekerja dan Lulus Uji Kompetensi Bidang Industri  C : Jumlah Lulusan Diklat <i>skilling</i></p>							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Persen	Maksimasi	Tim Penyelenggara Diklat BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
SK1.2	Persentase Lulusan Peserta Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	-	94	94,5	95	95,5	96
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Program pelatihan yang meliputi <i>upskilling dan reskilling</i> SDM Industri merupakan program penyiapan tenaga kerja industri melalui pelatihan berbasis kompetensi dan mengikuti sertifikasi kompetensi mengacu pada standar kompetensi. Penyediaan SDM yang kompeten dan bersertifikat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan pada Balai Diklat Industri Medan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Industri. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan (pelatihan dan sertifikasi) pada industri bidang kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan <i>oleo chemical</i> serta spesialisasi penunjang berbasis pangan, karet dan produk turunannya, pengelasan dan pengolahan limbah.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
<p>Berita acara lulusan diklat, Data Aplikasi SIDIA dan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat.  Data lulusan pendidikan vokasi (<i>reskilling dan upskilling</i>) dan yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang industri yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) baik sertifikat kompetensi dengan logo Garuda maupun skill passport.</p>							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
<p>Menghitung persentase jumlah peserta diklat <i>reskilling dan upskilling</i> pada Balai Diklat Industri yang lulus uji kompetensi dengan rumus sebagai berikut :</p> $A = B / C$ <p>Keterangan :</p> <p>A : Persentase Lulusan Diklat Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri  B : Jumlah Lulusan Diklat dan Lulus Uji Kompetensi Bidang Industri  C : Jumlah Lulusan Diklat <i>reskilling dan upskilling</i></p>							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Persen	Maksimasi	Tim Penyelenggara Diklat BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
SK1.3	Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Yang Tumbuh	4	2	2	3	4	5
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada Peserta Inkubasi (Tenant). Tenant inkubator bisnis pada BDI Medan adalah masyarakat (umum dan mahasiswa, alumni) yang telah memiliki prospektif usaha.</p> <p>Adapun tahapan kegiatan inkubator bisnis di Balai Diklat Industri Medan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tahap Pra Inkubasi</li> <li>2) Tahap Inkubasi</li> <li>3) Tahap Pasca Inkubasi</li> </ol> <p>Peserta inkubasi terdiri dari peserta yang sudah memiliki usaha sebelumnya ataupun dari mulai awal. Output dari inkubator bisnis ini adalah tenant yang memiliki produk yang siap dipasarkan.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
Sertifikat tanda menyelesaikan kegiatan inkubator bisnis dan laporan akhir kegiatan Inkubator Bisnis							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Jumlah tenant yang telah dibina yang memiliki NIB dan memiliki produk yang siap dipasarkan							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Tenant	Maksimasi	BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK2	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
SK2.1	Persentase ASN Industri Lulusan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik*	-	91	92	93	94	95
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
Program pelatihan bagi ASN Bidang Industri merupakan program peningkatan keterampilan ASN bidang industri melalui penyelenggaraan pendidikan bagi ASN Industri pada Balai Diklat Industri Medan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Industri. Capaian target ini merupakan jumlah ASN yang mengikuti program pelatihan dan lulus dengan predikat minimal baik.							
<b>SUMBER DATA</b>							
Data Sertifikat Pelatihan Bidang Industri yang diikuti ASN dengan kelulusan minimal predikat baik.							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Menghitung persentase jumlah peserta diklat ASN Industri pada Balai Diklat Industri yang lulus dengan predikat minimal baik dengan rumus sebagai berikut :							
$A = B / C$							
Keterangan :							
A : Persentase Lulusan Diklat ASN Bidang Industri Yang Lulus dengan Predikat Minimal Baik							
B : Jumlah Lulusan Diklat ASN Industri dan Lulus dengan Predikat Minimal Baik							
C : Jumlah Peserta Diklat ASN Bidang Industri							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Nilai	Maksimasi	BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>SK3</b>	<b>Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi</b>						
SK3.1	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada BDI	97	94	94,3	94,5	94,7	95
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian.							
<b>SUMBER DATA</b>							
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, dan 525115.							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri Medan diperoleh melalui rumus: RP3DN Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Balai Diklat Industri Medan RA P3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Nilai	Maksimasi	BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>SK3</b>	<b>Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi</b>						
SK3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BDI	75,25	79,45	79,45	79,70	79,70	80
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Audit Internal Kementerian Perindustrian mengacu pada Kepmen Perindustrian Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian SAKIP Balai Diklat Industri Medan dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
Hasil Penilaian SAKIP dari Tim Audit Internal Kementerian Perindustrian.							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai mengacu pada Kepmen Perindustrian Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Tim Audit Internal Kementerian Perindustrian yang meliputi Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 30%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja (Bobot 25%).							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Nilai	Maksimasi	BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>SK3</b>	<b>Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi</b>						
SK3.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BDI	92,45	75	75,25	75,50	75,75	76
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
Laporan keuangan pada Balai Diklat Industri Medan wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Penilaian atas Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Medan bertujuan untuk memberikan motivasi kepada BDI Medan dan diharapkan dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.							
<b>SUMBER DATA</b>							
Nilai Laporan Keuangan berasal dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian.							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Penilaian Laporan Keuangan dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian dengan lingkup yang dinilai antara lain: Kelengkapan Laporan Keuangan yang meliputi (penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan penting lainnya), kelengkapan lampiran meliputi (lampiran BMN dan Lapiram E Rekon). Formula perhitungan penilaian di Tingkat Satuan Kerja sebagai berikut :							
Komponen Penilaian		Bobot (%)					
1. Kesesuaian dengan SAP		24%					
2. Kecukupan Informasi		54%					
3. Efektivitas Pengendalian Internal		11%					
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan		11%					
Jumlah		100%					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Nilai	Maksimasi	BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>SK3</b>	<b>Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi</b>						
SK3.4	Indeks Profesionalitas ASN pada BDI	83.82	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Nilai profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Medan adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
Layanan Indeks Profesionalitas dalam Sistem Informasi ASN (SI-ASN) Instansi Badan Kepegawaian Negara.							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
<p>Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Penghitungan IP ASN dilakukan dengan dasar bobot 4 dimensi sebagai berikut:</p> <p>a) Dimensi Kualifikasi, terkait jenjang pendidikan formal (25%)  b) Dimensi Kompetensi, terkait riwayat pengembangan kompetensi (40%)  c) Dimensi Kinerja, terkait riwayat penilaian kinerja (30%)  d) Dimensi Disiplin, terkait riwayat hukuman disiplin (5%).</p> <p>Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:  a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).</p>							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Indeks	Maksimasi	BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>SK3</b>	<b>Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi</b>						
SK3.5	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BDI	91,52	93,4	93,4	94	94	94,5
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah alat yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). IKPA menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
<p>Nilai IKPA dirilis secara berkala melalui aplikasi OMS PAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara) pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran.</p>							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
<p>Nilai IKPA dihitung berdasarkan berbagai indikator yang relevan dengan kualitas pelaksanaan anggaran. Setiap indikator memiliki bobot tertentu yang menentukan kontribusinya terhadap nilai IKPA keseluruhan. Beberapa indikator IKPA meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi DIPA : 10 persen</li> <li>2. Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen</li> <li>3. Penyerapan Anggaran : 20 persen</li> <li>4. Belanja Kontraktual : 10 persen</li> <li>5. Penyelesaian Tagihan : 10 persen</li> <li>6. Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen</li> <li>7. Dispensasi SPM : 5 persen</li> <li>8. Capaian Output : 25 persen</li> </ol>							
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Nilai		Maksimasi		BDI Medan			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi						
SK3.6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	-	91,3	91,3	91,7	91,7	92
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Menghitung survei kepuasan masyarakat (SKM) melibatkan beberapa langkah sesuai dengan PermenPan No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pertama, tentukan unsur-unsur pelayanan yang akan dinilai. Kemudian, kumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara. Selanjutnya, hitung nilai rata-rata untuk setiap unsur pelayanan. Setelah itu, hitung nilai indeks unit pelayanan dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang. Terakhir, interpretasi hasil untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat. Identifikasi aspek-aspek yang akan diukur kepuasannya oleh masyarakat, seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, serta tanggapan terhadap pengaduan dan saran.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kuesioner:</b> Siapkan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang kepuasan masyarakat terhadap setiap unsur pelayanan.</li> <li>• <b>Wawancara:</b> Lakukan wawancara tatap muka atau wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kepuasan masyarakat.</li> </ul>							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jumlahan Nilai:</b> Jumlahkan nilai yang diberikan oleh setiap responden untuk setiap unsur pelayanan.</li> <li>• <b>Pembagian dengan Jumlah Responden:</b> Bagi jumlah nilai tersebut dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan.</li> <li>• <b>Nilai Tertimbang:</b> Kalikan nilai rata-rata per unsur pelayanan dengan nilai bobot atau penimbang yang telah ditentukan. Nilai bobot biasanya sama untuk setiap unsur pelayanan.</li> <li>• <b>Penjumlahan Nilai Tertimbang:</b> Jumlahkan nilai tertimbang dari semua unsur pelayanan untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan.</li> <li>• <b>Tingkat Kepuasan:</b> Bandingkan nilai indeks unit pelayanan dengan skala penilaian yang telah ditentukan untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat (misalnya, sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas).</li> <li>• <b>Analisis:</b> Lakukan analisis lebih lanjut untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.</li> </ul>							
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Nilai		Maksimasi		BDI Medan			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>SK3</b>	<b>Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi</b>						
SK3.7	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan pada BDI	77,47	70,1	73	76	79	82
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
<p>Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan (UK) diperoleh dari Hasil Pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.</p>							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Nilai	Maksimasi	BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>SK3</b>	<b>Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi</b>						
SK3.8	Tingkat Hasil Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada BDI	-	77	78	80	83	85
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penghitungan indeks SPBE adalah proses yang sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi penerapan SPBE di Indonesia. Proses ini membantu pemerintah untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengukur kemajuan dalam penerapan SPBE secara terintegrasi. Penghitungan Indeks SPBE mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
<p>Nilai yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian.</p>							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
<p>Data dari penilaian indikator dikumpulkan dan diolah untuk menghitung nilai indeks SPBE. Formula penghitungan indeks SPBE melibatkan bobot nilai untuk masing-masing domain. Nilai indeks SPBE menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa penerapan SPBE lebih matang dan efektif.</p> <p>Formula : <math>INDEKS\ SPBE = \sum NDj \times BDj</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NDj</b>: Nilai Indeks Domain ke-j (misalnya, domain kebijakan, tata kelola, dll.).</li> <li>• <b>BDj</b>: Bobot Domain ke-j.</li> </ul>							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Nilai	Maksimasi	BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja		Target
------	-------------------	--	--------

		Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>SK3</b>	<b>Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi</b>						
SK3.9	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada BDI	100	60	62	64	68	70
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Balai Diklat Industri Medan merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Industri Medan bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR)							
<b>SUMBER DATA</b>							
Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, data base Itjen							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
<p>Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi diperoleh dengan rumus:</p> <p><math>A = (B+C)/2</math></p> <p>A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR)</p> <p>B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1)</p> <p>C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2025 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2025 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan.</p>							
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>					
Nilai	Maksimasi	BDI Medan					

#### 4. Daftar Rekapitulasi Kelulusan Diklat ASN Bidang Industri BDI Medan Tahun 2025

No	Nama	NIP	Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat	Jabatan	Asal Satker	Kualifikasi	Keterangan
1	Adityo Murdiarto	198907292014021000	Jakarta, 29 Juli 1989	Penata / Ilc	Pembina Industri Ahli Muda	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	Sangat Memuaskan	LULUS
2	Agust Supriyadi	198408032009101000	JAKARTA, 3 Agustus 1984	Penata Tk. I / Illd	Pembina Industri Ahli Muda	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Memuaskan	LULUS
3	Agustinus Cook Siallagan	199008182014021000	Parapat, 18 Agustus 1990	Penata / Ilc	Pembina Industri Ahli Muda	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	Memuaskan	LULUS
4	Aidil Kurniawan	198904252015021000	Medan, 25 April 1989	Penata / Ilc	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	Sangat Memuaskan	LULUS
5	Amelina Dewi	199704052022022000	Tulungagung, 5 April 1997	Penata Muda / Illa	Pembina Industri Ahli Pertama	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Sangat Memuaskan	LULUS
6	Anita Kumala Sari	198805102015022000	Jakarta, 10 Mei 1988	Penata / Ilc	Pembina Industri Ahli Muda	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Sangat Memuaskan	LULUS
7	DAVID GRESANDO	199605082022021000	JAKARTA BARAT, 8 Mei 1996	Penata Muda / Illa	Pembina Industri Ahli Pertama	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Sangat Memuaskan	LULUS
8	Dwi Duma Christina Rina	199001242014022000	Jakarta, 24 Januari 1990	Penata / Ilc	Pembina Industri Ahli Muda	Direktorat Akses Industri Internasional	Sangat Memuaskan	LULUS
9	Edwin Harianto Siphahutar	196903252002121000	MEDAN, 25 Maret 1969	Penata Tk. I / Illd	Pembina Industri Ahli Muda	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	Memuaskan	LULUS
10	Feri Antoni Manullang	199005282019011000	Medan, 28 Mei 1990	Penata Muda / Illa	Pembina Industri Ahli Pertama	Balai Diklat Industri Medan	Sangat Memuaskan	LULUS
11	Fransnazoan Sitorus	198408182018011000	Pem Cengkering, 18 Agustus 1984	Penata Tk. I / Illd	Dosen	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	Sangat Memuaskan	LULUS
12	Haidar Ramzy Maha	199512062022021000	Waenetat, 6 Desember 1995	Penata Muda / Illa	Pembina Industri Ahli Pertama	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	Sangat Memuaskan	LULUS
13	Hamdani Ridwan	198412062010121000	Pamekasan, 6 Desember 1984	Penata Tk. I / Illd	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	Memuaskan	LULUS
14	Irfan Rusmar	198506192014021000	Tanjong Selamat, 19 Juni 1985	Pembina / IVa	Ka.sub Bag. Tata Usaha	Balai Diklat Industri Medan	Memuaskan	LULUS
15	KRISSANDARTA TARIGAN	199101242022021000	MEDAN, 24 Januari 1991	Penata Muda Tk. I / Illb	Dosen	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	Sangat Memuaskan	LULUS
16	Mahyana	197010102006042000	Desa Baru, 10 Oktober 1970	Penata Tk. I / Illd	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	Memuaskan	LULUS
17	Maria Ulfah	198605042008032000	BATANG, 4 Mei 1986	Penata / Ilc	Pembina Industri Ahli Muda	Direktorat Akses Industri Internasional	Sangat Memuaskan	LULUS
18	MARIE AZALEA	199604012022022000	KARO, 1 April 1996	Penata Muda / Illa	Pembina Industri Ahli Pertama	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	Sangat Memuaskan	LULUS
19	MEISY RADHISTA	199705222022022000	JAKARTA, 22 Mei 1997	Penata Muda / Illa	Pembina Industri Ahli Pertama	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Sangat Memuaskan	LULUS
20	Muhammad Wisnu Muq'asfa	199002092018011000	Jombang, 9 Februari 1990	Penata Muda Tk. I / Illb	Pembina Industri Ahli Pertama	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	Sangat Memuaskan	LULUS
21	Mulyadi	197504162006041000	Ajuen, 16 April 1975	Penata Tk. I / Illd	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh	Baik	LULUS
22	Novreza Utama Putra	198111292009111000	Jakarta, 29 November 1981	Penata / Ilc	Pembina Industri Ahli Muda	Pusat Industri Halal	Memuaskan	LULUS
23	Nur Wahyu Khalish Barus	199603282022021000	Medan, 28 Maret 1996	Penata Muda / Illa	Pembina Industri Ahli Pertama	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	Sangat Memuaskan	LULUS
24	Patia Junjungan Monangdo	198503062015021000	JAKARTA, 6 Maret 1985	Penata / Ilc	Pembina Industri Ahli Muda	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	Sangat Memuaskan	LULUS
25	Rahadi Sri Rahmanto	198204192009111000	Pasuruan, 19 April 1982	Penata Tk. I / Illd	Pembina Industri Ahli Muda	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Memuaskan	LULUS
26	Ratno Adi Hartanto	198203032010011000	Salatiga, 3 Maret 1982	Penata Tk. I / Illd	Kepala Sub bagian Tata Usaha	Inspektorat I	Baik	LULUS
27	Saida Rahmawati BS	198604292014022000	Sleman, 29 April 1986	Penata / Ilc	Pembina Industri Ahli Muda	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Sangat Memuaskan	LULUS

No	Nama	NIP	Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat	Jabatan	Asal Satker	Kualifikasi	Keterangan
28	Shabrina Sekar Tresnannisa	199709222022022000	Bogor, 22 September 1997	Penata Muda / IIIa	Pembina Industri Ahli Pertama	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Sangat Memuaskan	LULUS
29	VETRIO MONANDES	198212112006041000	PADANG, 11 Desember 1982	Penata / IIIc	Pembina Industri Ahli Muda	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	Sangat Memuaskan	LULUS
30	Yufriza Wannur Azah	198204262009011000	Meulaboh, 26 April 1982	Penata Tk. I / III d	Pembina Industri Ahli Muda	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	Memuaskan	LULUS

**Catatan :**

- Tingkat kelulusan Pelatihan ASN Tahun 2025 minimal baik adalah

## 5. Matriks Keterkaitan Indikator Kinerja, Kegiatan dan Anggaran BDI Medan Tahun 2025

No	Sasaran Tujuan (TJ)/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Satuan)	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp Ribu)	Capaian Realisasi Keuangan (%)
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi	Persentase SDM Industri Yang Kompeten*	90 (%)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Kerjasama dengan Industri Terkait</li> <li>Rekrutmen Peserta sesuai kriteria yang dipersyaratkan</li> <li>Menyusun Perangkat diklat</li> <li>Menyusun draft PBK Baru sesuai dengan Kompetensi BDI Medan</li> <li>Persiapan Verifikasi skema Sertifikasi.</li> <li>Melaksanakan sosialisasi diklat berbasis PNBPN ke industri terkait.</li> <li>Melakukan Tracer Study terhadap alumni Diklat Berbasis Kompetensi.</li> <li>Melakukan Penyelenggaraan Diklat Berbasis PNBPN</li> <li>Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi</li> <li>Verifikasi penambahan ruang lingkup di BNSP melalui verifikator yang sudah ditetapkan oleh BNSP</li> <li>Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 BDI Medan telah melaksanakan kegiatan diklat sebanyak 157 orang dari 152 orang yang direncanakan dengan capaian output sebesar 103,29%, dimana terdiri dari 45 orang di bidang operator olahan makanan, 74 orang di bidang operator mesin dan peralatan pada PMKS dan 38 orang di bidang operator material handling.</li> </ol>	100	985,215	99.72
SK 1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi	Persentase Lulusan Peserta Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	93 (%)				
		Persentase Lulusan Peserta Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri	94 (%)				
		Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh	2 (Tenant)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan beberapa kegiatan terkait Pra Inkubasi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Inkubator Bisnis</li> <li>Penyusunan Proposal Kolaborasi Inkubator Bisnis</li> <li>Pendaftaran tenant pada website BDI Medan telah diselesaikan</li> <li>Upload proposal bisnis calon tenant untuk proses seleksi tenant inkubator bisnis BDI Medan</li> <li>Penilaian proposal oleh Tim Penilai Internal Program Inkubator Bisnis BDI Medan.</li> <li>Verifikasi lokasi usaha calon tenant oleh Tim verifikator Inkubator Bisnis BDI Medan</li> <li>Pengumuman 4 tenant inkubator bisnis BDI Medan yang disahkan dengan SK yang dikeluarkan kepala Balai Diklat Industri Medan Nomor 190 Tahun 2025.</li> </ol> </li> <li>Melakukan beberapa kegiatan terkait masa inkubasi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembukaan dan Penandatanganan MoU</li> <li>Pelatihan ide usaha kepada 4 tenant beserta pendampingnya.</li> </ol> </li> </ol>	100	99,871	99.87

No	Sasaran Tujuan (TJ)/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Satuan)	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp Ribu)	Capaian Realisasi Keuangan (%)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Telah dilakukan mentoring dan coaching sebanyak 3 tahap, dimana setiap tahap akan dilakukan penyempurnaan proses bisnis dari setiap tenant BDI Medan seperti; pembuatan dan remake brand / logo, pembentukan catatan dan pelaporan keuangan tenant, peningkatan kualitas produk tenant,</li> <li>d. Telah dilakukan pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha</li> <li>e. Telah dilakukan pemberian bantuan bahan produksi</li> <li>f. Telah dilakukan pendampingan Pertemuan mitra usaha</li> <li>g. Telah dilakukan pendampingan dalam pembentukan Nomor Izin Berusaha (NIB), BPOM, Izin Edar,</li> <li>h. Telah dilakukan verifikasi dan Uji Validasi Produk tahap I-II serta marketing dari produk yang diproduksi oleh tenant BDI Medan.</li> </ul> <p>3. Melakukan proses Tahap Pasca Inkubasi melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi penyediaan jejaring antar peserta inkubasi (tenant) melalui WAG Tenant</li> <li>b. Pemberian peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta inkubasi (tenant) melalui fasilitasi pameran dan business matching</li> <li>c. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta inkubasi (tenant) selama 2 tahun</li> <li>d. Pendampingan proses pembentukan wadah yang legal dan pengurusan izin usaha dan izin edar.</li> <li>e. Telah dilakukan uji validasi tahap 3 dan diberikan sertifikat kepada keempat tenant pada Triwulan IV 2025.</li> <li>f. Jumlah realisasi tenant Inkubis sebanyak 4 tenant dengan capaian 200% dari target 2025.</li> </ul>			
SK 2	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi	Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik*	91 (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan pelatihan ASN Bidang Industri (Penunjukan Panitia, Jadwal Pelatihan, Narasumber dan lainnya).</li> <li>2. Melaksanakan pelatihan ASN Bidang Industri sebanyak 30 orang dari beberapa satker di lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>3. Melakukan evaluasi hasil kegiatan pelatihan ASN Bidang Industri</li> <li>4. Membuat Laporan Kegiatan Pelatihan ASN Bidang Industri</li> <li>5. Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik sebesar 100% dengan capaian 109,89%.</li> </ul>	100	488.689	99.25
SK 3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang	94 (%)	Pelaksanaan belanja akun 52 (pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai) dengan prioritas pada barang PDN dan TKDN dengan nilai TKDN sebesar 100%.	100	2,804,868	68,36

No	Sasaran Tujuan (TJ)/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Satuan)	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp Ribu)	Capaian Realisasi Keuangan (%)
	Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi	dan/atau Jasa Pemerintah pada BDI					
		Nilai SAKIP BDI	79,45 (Nilai)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan Rencana Aksi)</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV (Rencana Aksi, Laporan PP 39 dan LAKIP)</li> <li>3. Penyiapan Dokumen Laporan Kinerja Triwulan IV</li> <li>4. Penyiapan Dokumen Lainnya terkait SAKIP</li> <li>5. Nilai akhir SAKIP 2025 adalah 79,35 atau naik dibandingkan tahun 2024 yaitu 75,25 dan Tahun 2023 (72,40).</li> </ol>	100	29,733	100
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BDI	75 (Nilai)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2. Pengumpulan dokumen</li> <li>3. Nilai Laporan Keuangan tahun 2025 sebesar 95,5 atau meningkat sebesar 3,29% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 92,45.</li> <li>4. BDI Medan berada di ranking 13 dari 57 satker Kemenperin dan ranking 2 dari 7 BDI di lingkup BPSDMI.</li> </ol>	100	5,000	82,78
		Indeks Profesionalitas ASN pada BDI	81,3 (Indeks)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan kedisiplinan pegawai,</li> <li>2. Pendataan kinerja pegawai,</li> <li>3. Melakukan analisa pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>4. Melakukan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>5. Penilaian SKP oleh Pimpinan.</li> <li>6. Nilai IPASN Tahun 2025 sebesar 81,61 dengan capaian 100,38%</li> </ol>	100	25,240	82,60
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BDI	93,4 (Indeks)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2 Perlengkapan dokumen,</li> <li>3 Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan</li> <li>4 Mengidentifikasi besaran UP Tunai dan KKP secara rasional dan menggunakan secara efektif dan efisien</li> <li>5 Melaksanakan Rapat RPD dengan masing-masing penanggung jawab kegiatan mencegah deviasi hal.III DIPA</li> <li>6 Nilai IKPA posisi tahun 2025 adalah 97,45 atau capaian sebesar 103,67% dibanding target 2025</li> <li>7 Nilai IKPA juga meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 91,52.</li> </ol>	100	5,000	82,78
		Survey Kepuasan Masyarakat	91,3 (Indeks)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyusun instrumen survei</li> <li>2 Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel</li> </ol>			

No	Sasaran Tujuan (TJ)/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Satuan)	Realisasi Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp Ribu)	Capaian Realisasi Keuangan (%)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Melaksanakan survey</li> <li>4 Mengolah hasil survei</li> <li>5 Menyajikan dan melaporkan hasil survei</li> <li>6 Menindaklanjuti hasil survei</li> <li>7 Nilai SKM Tahun 2025 sebesar 91,53 dengan capaian 100,25%.</li> </ul>	100	0	0
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan pada BDI	70,1 (Nilai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif yang tercipta dengan elektronik (Tte) dan melakukan pemberkasan arsip secara elektronik sesuai kaidah kearsipan (melalui google drive);</li> <li>2. Meregistrasikan naskah masuk ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>3. Meregistrasikan naskah keluar ke aplikasi srikandi;</li> <li>4. Memberkaskan naskah masuk dan naskah keluar ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>5. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif (arsip tekstual);</li> <li>6. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip inaktif (arsip tekstual);</li> <li>7. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan Tahun 2025 sebesar 93,67 dengan capaian 133,62%.</li> </ul>	100	0	0
		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada BDI	77 (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik,</li> <li>2. Perumusan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE</li> <li>4. Melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM SPBE Pusat Data dan Informasi</li> <li>5. Nilai SPBE Tahun 2025 sebesar 83,28% dengan capaian 108,16%.</li> </ul>	100	0	0
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada BDI	60 (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan kegiatan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan ke Inspektorat Jenderal dengan melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM APiP Inspektorat Jenderal.</li> <li>2. Adapun hasil temuan sebanyak 4 temuan dan 11 rekomendasi telah selesai sesuai dengan lingkup program dan keuangan yang telah diaudit.</li> <li>3. Persentasi rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti adalah 100%</li> </ul>	100	0	0

**Laporan Hasil Monitoring Rencana Aksi  
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Progres	Pelaksanaan Kegiatan	
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Penumbuhan Sektor Industri Manufaktur	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja dalam 1 Tahun	93 (%)	25%	1. Melakukan Kerjasama dengan Industri Terkait 2. Rekrutmen Peserta sesuai kriteria yang dipersyaratkan 3. Menyusun Perangkat diklat 4. Menyusun draft PBK Baru sesuai dengan Kompetensi BDI Medan 5. Persiapan Verifikasi skema Sertifikasi. 6. Persiapan Pelatihan Asesor Kompetensi	25%	1. Melakukan Kerjasama dengan Industri Terkait 2. Rekrutmen Peserta sesuai kriteria yang dipersyaratkan 3. Menyusun Perangkat diklat 4. Menyusun draft PBK Baru sesuai dengan Kompetensi BDI Medan 5. Persiapan Verifikasi skema Sertifikasi. 6. Persiapan Pelatihan Asesor Kompetensi	Tim Diklat, LSP dan Kerjasama
		Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	152 (Orang)					
		Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh	2 (Tenant)	10%	Melakukan Sosialisasi Pendaftaran Calon Tenant Inkubator Bisnis	10%	Melakukan Sosialisasi Pendaftaran Calon Tenant Inkubator Bisnis	Tim Inkubator Bisnis
2	Menguatnya Komponen Penunjang Produktivitas Industri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	90 (%)	5%	Pelaksanaan belanja akun 52 (pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai) dengan prioritas pada barang PDN dan TKDN	5%	Pelaksanaan belanja akun 52 (pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai) dengan prioritas pada barang PDN dan TKDN	Tim Tata Usaha
3	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi pada layanan prima	Nilai SAKIP	79,5 (Nilai)	25%	1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja	25%	1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja	Tim Tata Usaha
		Nilai Laporan Keuangan	78 (Nilai)	10%	1. Pengarahan, dan Koordinasi 2. Pengumpulan dokumen	10%	1. Pengarahan, dan Koordinasi 2. Pengumpulan dokumen	Tim Tata Usaha
		Nilai Profesional ASN	81,3 (Indeks)	25%	1. Pendataan kedisiplinan pegawai, 2. Pendataan kinerja pegawai,	25%	1. Pendataan kedisiplinan pegawai, 2. Pendataan kinerja pegawai, 3. Melakukan analisa pengembangan kompetensi pegawai,	Tim Tata Usaha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Progres	Pelaksanaan Kegiatan	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan analisa pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>4. Melakukan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>5. Penilaian SKP oleh Pimpinan.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai.</li> <li>5. Penilaian SKP oleh Pimpinan.</li> </ul>	
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94 (Indeks)	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2. Perlengkapan dokumen,</li> <li>3. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan</li> <li>4. Mengidentifikasi besaran UP Tunai dan KKP secara rasional dan menggunakan secara efektif dan efisien</li> </ul>	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2. Perlengkapan dokumen,</li> <li>3. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan</li> <li>4. Mengidentifikasi besaran UP Tunai dan KKP secara rasional dan menggunakan secara efektif dan efisien</li> </ul>	Tim Tata Usaha
		Survey Kepuasan Masyarakat	3,25 (Indeks)	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun instrumen survei</li> <li>2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel</li> </ul>	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun instrumen survei</li> <li>2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel</li> </ul>	Tim Tata Usaha
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	70 (Nilai)	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif yang tercipta dengan elektronik (Tte) dan melakukan pemberkasan arsip secara elektronik sesuai kaidah kearsipan (melalui google drive);</li> <li>2. Meregistrasikan naskah masuk ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>3. Meregistrasikan naskah keluar ke aplikasi srikandi;</li> <li>4. Memberkaskan naskah masuk dan naskah keluar ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>5. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif (arsip tekstual);</li> </ul>	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif yang tercipta dengan elektronik (Tte) dan melakukan pemberkasan arsip secara elektronik sesuai kaidah kearsipan (melalui google drive);</li> <li>2. Meregistrasikan naskah masuk ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>3. Meregistrasikan naskah keluar ke aplikasi srikandi;</li> <li>4. Memberkaskan naskah masuk dan naskah keluar ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>5. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif (arsip tekstual);</li> <li>6. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip inaktif (arsip tekstual);</li> </ul>	Tim Tata Usaha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Progres	Pelaksanaan Kegiatan	
					6. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip inaktif (arsip tekstual);			
		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	80 (%)	25%	1. Penerapan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2. Perumusan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	25%	1. Penerapan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2. Perumusan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Tim Tata Usaha
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian	50 (%)	25%	Penyusunan dan penyiapan berkas dokumen audit kinerja dan keuangan	25%	Penyusunan dan penyiapan berkas dokumen audit kinerja dan keuangan	Tim Tata Usaha

Medan, 14 April 2025

 Kepala Balai Diklat Industri Medan



Chairil Almy

**Laporan Hasil Monitoring Rencana Aksi**

**Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penang-gung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Prog-res	Pelaksanaan Kegiatan	
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Penumbuhan Sektor Industri Manufaktur	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja dalam 1 Tahun	93 (%)	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sosialisasi diklat berbasis PNBK ke industri terkait.</li> <li>Melakukan rekapitulasi hasil TNA.</li> <li>Menyelenggarakan Diklat Berbasis Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan Instrumen Diklat untuk seluruh kompetensi sesuai dengan spesialisasi</li> <li>Menyiapkan Jadwal penyelenggaraan diklat</li> <li>Membuat jadwal petugas piket dalam pelaksanaan diklat</li> <li>Menyiapkan instruktur sesuai dengan kompetensinya dan diklat yang dilaksanakan</li> <li>Pelaksanaan uji kompetensi</li> <li>Membuat laporan pasca diklat</li> </ul> </li> <li>Melaksanakan finalisasi PBK sesuai dengan Kompetensi BDI Medan</li> <li>Menyusun rancangan skema sertifikasi untuk penambahan ruang lingkup</li> <li>Pengajuan penambahan ruang lingkup ke BNSP melalui verifikasi yang sudah ditetapkan oleh BNSP</li> <li>Persiapan Pelatihan Asesor Kompetensi</li> </ol>	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan sosialisasi diklat berbasis PNBK ke industri terkait telah dilakukan.</li> <li>Rekapitulasi hasil TNA telah diselesaikan.</li> <li>Telah diselenggarakan Diklat Berbasis kompetensi Angkatan 1 Bidang Makanan sebanyak 45 orang</li> <li>Telah dilaksanakan finalisasi PBK sesuai dengan Kompetensi BDI Medan</li> <li>Telah disusun rancangan skema Sertifikasi untuk penambahan ruang lingkup</li> <li>Telah diajukan penambahan ruang lingkup ke BNSP melalui verifikasi yang sudah ditetapkan oleh BNSP</li> <li>Persiapan Pelatihan Asesor Kompetensi telah dilakukan</li> <li>Persentase penempatan kerja lulusan diklat angkatan 1 bidang makanan mencapai 100% dari 45 orang peserta.</li> </ol>	Tim Diklat, LSP dan Kerjasama
		Lulusan Pelatihan Vokasi Industri berbasis Kompeten-si	152 (Dra-ng)					
		Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh	2 (Te-nant)	40%	<p>Pra Inkubasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penawaran program inkubasi</li> <li>Perumusan dan penetapan kriteria calon tenant</li> <li>Penunjukan tim seleksi calon tenant</li> <li>Seleksi peserta inkubasi (tenant)</li> </ol>	30%	<p>Telah dilakukan proses Pra Inkubasi melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi program inkubator bisnis melalui media sosial dan sosialisasi langsung ke kecamatan</li> <li>Perumusan dan penetapan kriteria calon tenant</li> <li>Penunjukan tim seleksi calon tenant</li> <li>Seleksi calon peserta inkubasi (tenant) dalam proses finalisasi</li> </ol>	
2	Menguatnya Komponen Penunjang Produktivitas Industri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91 (%)	100 %	Pelaksanaan belanja akun 52 (pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai) dengan prioritas pada barang PDN dan TKDN	100 %	Pelaksanaan belanja akun 52 (pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai) dengan prioritas pada barang PDN dan TKDN dengan nilai TKDN sebesar 100%	Tim Tata Usaha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penang-gung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Prog-res	Pelaksanaan Kegiatan	
3	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi pada layanan prima	Nilai SAKIP	79,5 (Nilai)	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan Rencana Aksi)</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II (Rencana Aksi, Laporan PP 39 dan Data SIK)</li> <li>3. Penyiapan Dokumen Laporan Kinerja Triwulan II</li> <li>4. Penyiapan Dokumen Lainnya terkait SAKIP</li> </ol>	50%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk penilaian SAKIP (Nilai akhir SAKIP 2025 : 79,35) seperti : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Aksi)</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II (Rencana Aksi, Laporan PP 39 dan Data SIK)</li> <li>3. Penyiapan Dokumen Laporan Kinerja Triwulan II</li> <li>4. Penyiapan Dokumen Lainnya terkait SAKIP</li> </ol>	Tim Tata Usaha
		Nilai Laporan Keuangan	78 (Nilai)	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2. Pengumpulan dokumen</li> </ol>	50%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait penyiapan laporan keuangan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2. Pengumpulan dokumen</li> </ol>	Tim Tata Usaha
		Nilai Profesional ASN	81,3 (Indeks)	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan kedisiplinan pegawai,</li> <li>2. Pendataan kinerja pegawai,</li> <li>3. Melakukan analisa pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>4. Melakukan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>5. Penilaian SKP oleh Pimpinan.</li> </ol>	50%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan nilai profesional ASN yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan kedisiplinan pegawai,</li> <li>2. Pendataan kinerja pegawai,</li> <li>3. Melakukan analisa pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>4. Melakukan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>5. Penilaian SKP oleh Pimpinan.</li> </ol>	Tim Tata Usaha
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94 (Indeks)	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2. Perengkapan dokumen,</li> <li>3. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan</li> <li>4. Mengidentifikasi besaran UP Tunai dan KKP secara rasional dan menggunakan secara efektif dan efisien</li> </ol>	50%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan nilai IKPA yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2. Perengkapan dokumen,</li> <li>3. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan</li> <li>4. Mengidentifikasi besaran UP Tunai dan KKP secara rasional dan menggunakan secara efektif dan efisien</li> </ol>	Tim Tata Usaha
		Survey Kepuasan Masyarakat	3,25 (Indeks)	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyusun instrumen survei</li> <li>2 Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel</li> <li>3 Melaksanakan survey</li> <li>4 Mengolah hasil survei</li> <li>5 Menyajikan dan melaporkan hasil</li> <li>6 Menindaklanjuti hasil survei</li> </ol>	50%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan indeks kepuasan masyarakat yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun instrumen survei</li> <li>2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel</li> <li>3. Melaksanakan survey</li> <li>4. Mengolah hasil survei</li> <li>5. Menyajikan dan melaporkan hasil</li> <li>6. Menindaklanjuti hasil survei</li> </ol>	Tim Tata Usaha
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	70 (Nilai)	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif yang tercipta dengan elektronik (Tte) dan melakukan pemberkasan arsip secara elektronik sesuai kaidah kearsipan (melalui google drive);</li> </ol>	50%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan nilai kearsipan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif yang tercipta dengan elektronik (Tte) dan melakukan pemberkasan arsip</li> </ol>	Tim Tata Usaha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penang-gung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Prog-res	Pelaksanaan Kegiatan	
					2. Meregistrasikan naskah masuk ke dalam aplikasi srikandi; 3. Meregistrasikan naskah keluar ke aplikasi srikandi; 4. Memberkaskan naskah masuk dan naskah keluar ke dalam aplikasi srikandi; 5. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif (arsip tekstual); 6. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip inaktif (arsip tekstual);		secara elektronik sesuai kaidah kearsipan (melalui google drive); 2. Meregistrasikan naskah masuk ke dalam aplikasi srikandi; 3. Meregistrasikan naskah keluar ke aplikasi srikandi; 4. Memberkaskan naskah masuk dan naskah keluar ke dalam aplikasi srikandi; 5. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif (arsip tekstual); 6. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip inaktif (arsip tekstual);	
	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	80 (%)	50%	1. Penerapan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2. Perumusan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	50%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait penerapan SPBE yaitu : 1. Penerapan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2. Perumusan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Tim Tata Usaha	
	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian	50 (%)	50%	Penyusunan dan persiapan berkas dokumen audit kinerja dan keuangan	50%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait Penyusunan dan persiapan berkas dokumen audit kinerja dan keuangan	Tim Tata Usaha	

Medan, 4 Juli 2025

 Kepala Balai Diklat Industri Medan



Chairil Almy



Laporan Hasil Monitoring Rencana Aksi  
Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penang-gung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Progres	Pelaksanaan Kegiatan	
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Penumbuhan Sektor Industri Manufaktur	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja dalam 1 Tahun*)	93 (%)	75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sosialisasi diklat berbasis PNBP ke industri terkait.</li> <li>Melakukan Tracer Study terhadap alumni Diklat Berbasis Kompetensi.</li> <li>Persiapan Penyelenggaraan Diklat Berbasis PNBP               <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan Instrumen Diklat untuk seluruh kompetensi sesuai dengan spesialisasi</li> <li>Menyiapkan Jadwal penyelenggaraan diklat</li> <li>Membuat jadwal petugas piket dalam pelaksanaan diklat</li> <li>Menyiapkan instruktur sesuai dengan kompetensinya dan diklat yang dilaksanakan</li> <li>Pelaksanaan uji kompetensi sesuai diklat</li> <li>Membuat laporan pasca diklat</li> </ul> </li> <li>Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi</li> <li>Membuat laporan pasca diklat</li> <li>Verifikasi penambahan ruang lingkup di BNSP melalui verifikator yang sudah ditetapkan oleh BNSP</li> </ol>	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sosialisasi diklat berbasis PNBP ke industri terkait.</li> <li>Melakukan Tracer Study terhadap alumni Diklat Berbasis Kompetensi.</li> <li>Persiapan Penyelenggaraan Diklat Berbasis PNBP               <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan Instrumen Diklat untuk seluruh kompetensi sesuai dengan spesialisasi</li> <li>Menyiapkan Jadwal penyelenggaraan diklat</li> <li>Membuat jadwal petugas piket dalam pelaksanaan diklat</li> <li>Menyampaikan instruktur sesuai dengan kompetensinya dan diklat yang dilaksanakan</li> <li>Pelaksanaan uji kompetensi sesuai diklat</li> <li>Membuat laporan pasca diklat</li> </ul> </li> <li>Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi</li> <li>Membuat laporan pasca diklat</li> <li>Verifikasi penambahan ruang lingkup di BNSP melalui verifikator yang sudah ditetapkan oleh BNSP</li> <li>Telah dilaksanakan Diklat 3 In 1 sebanyak 45 orang dan sisanya sebanyak 107 orang akan diselenggarakan pada triwulan berikutnya.</li> </ol>	Tim Diklat, LSP dan Kerjasama
		Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	152 (Orang)	75%		50%		
	Wirusaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh	2 (Tenant)	75%	80%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumuman Tenant hasil seleksi</li> <li>Penetapan SK Tenant Inkubator Bisnis</li> <li>Kontrak tertulis dengan peserta inkubasi</li> <li>Pembukaan masa inkubasi</li> <li>Perumusan ide usaha</li> <li>Penunjukan dan penetapan tim trainer, tim mentor dan tim coaching</li> <li>Pelatihan ide usaha peserta inkubasi</li> <li>Pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha</li> <li>Pemberian bantuan bahan produksi</li> <li>Pendampingan Pertemuan mitra usaha</li> <li>Jumlah realisasi tenant Inkubis sebanyak 4 tenant dan telah diberikan pelatihan Klasikal 1, 2 dan 3 pada Triwulan III 2025.</li> </ol>	<p>Telah dilakukan proses inkubasi melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumuman Tenant hasil seleksi</li> <li>Penetapan SK Tenant Inkubator Bisnis</li> <li>Kontrak tertulis dengan peserta inkubasi</li> <li>Pembukaan masa Inkubasi</li> <li>Perumusan ide usaha</li> <li>Penunjukan dan penetapan tim trainer, tim mentor dan tim coaching</li> <li>Pelatihan ide usaha peserta inkubasi</li> <li>Pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha</li> <li>Pemberian bantuan bahan produksi</li> <li>Pendampingan Pertemuan mitra usaha</li> <li>Jumlah realisasi tenant Inkubis sebanyak 4 tenant dan telah diberikan pelatihan Klasikal 1, 2 dan 3 pada Triwulan III 2025.</li> </ol>	Tim INBIS	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Progres	Pelaksanaan Kegiatan	
2	Mengkuatinya Komponen Penunjang Produktivitas Industri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91 (%)	75%	Pelaksanaan belanja akun 52 (pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai) dengan prioritas pada barang PDN dan TKDN	100%	Pelaksanaan belanja akun 52 (pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai) dengan prioritas pada barang PDN dan TKDN dengan nilai TKDN posisi terakhir 2025 sebesar 100%.	Tim Tata Usaha
3	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi pada layanan prima	Nilai SAKIP	79,5 (Nilai)	75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan Rencana Aksi)</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II (Rencana Aksi, Laporan PP 39 dan Data SIK)</li> <li>3. Penyiapan Dokumen Laporan Kinerja Triwulan II</li> <li>4. Penyiapan Dokumen Lainnya terkait SAKIP</li> </ol>	75%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk penilaian SAKIP seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Aksi)</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III (Rencana Aksi, Laporan PP 39 dan Data SIK)</li> <li>3. Penyiapan Dokumen Laporan Kinerja Triwulan III</li> <li>4. Penyiapan Dokumen Lainnya terkait SAKIP</li> <li>5. Nilai akhir SAKIP 2025 adalah 79,35 atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 75,25 dan Tahun 2023 (72,40).</li> </ol>	Tim Tata Usaha
		Nilai Laporan Keuangan	78 (Nilai)	75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2. Pengumpulan dokumen laporan keuangan</li> </ol>	75%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait penyiapan laporan keuangan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan dan Koordinasi</li> <li>2. Pengumpulan dokumen laporan keuangan</li> <li>3. Nilai Laporan Keuangan tahun 2025 sebesar 95,5 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 92,45</li> <li>4. BDI Medan berada di rangking 13-14 dan 57 satker Kemenperin dan rangking 2 dari 7 BDI di lingkup BPSDMI.</li> </ol>	Tim Tata Usaha
		Nilai Profesional ASN	81,3 (Indeks)	75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan kedisiplinan pegawai,</li> <li>2. Pendataan kinerja pegawai,</li> <li>3. Melakukan analisa pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>4. Melakukan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>5. Penilaian SKP oleh Pimpinan.</li> </ol>	75%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan nilai profesional ASN yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan kedisiplinan pegawai,</li> <li>2. Pendataan kinerja pegawai,</li> <li>3. Melakukan analisa pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>4. Melakukan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai,</li> <li>5. Penilaian SKP oleh Pimpinan.</li> <li>6. Nilai Profesional ASN Tahun 2025 sebesar 85,92 atau melebihi target minimal yaitu 81,3.</li> </ol>	Tim Tata Usaha
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94 (Indeks)	75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2. Perengkapan dokumen,</li> <li>3. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan</li> <li>4. Mengidentifikasi besaran UP Tunai dan KKP secara rasional dan menggunakan secara efektif dan efisien</li> </ol>	75%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan nilai IKPA yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan, dan Koordinasi</li> <li>2. Perengkapan dokumen,</li> <li>3. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan</li> <li>4. Mengidentifikasi besaran UP Tunai dan KKP secara rasional dan</li> </ol>	Tim Tata Usaha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Progres	Pelaksanaan Kegiatan	
					5. Melaksanakan Rapat RPD dengan masing-masing penanggung jawab kegiatan mencegah deviasi hal.III DIPA		<p>menggunakannya secara efektif dan efisien.</p> <p>5. Melaksanakan Rapat RPD dengan masing-masing penanggung jawab kegiatan mencegah deviasi hal.III DIPA</p> <p>6. Nilai IKPA posisi tahun 2025 adalah 95,64 atau capaian sebesar 101,74% dibanding target 2025</p> <p>7. Nilai IKPA juga meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 91,52.</p>	
	Survey Kepuasan Masyarakat	3,25 (Indeks)	75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun instrumen survei</li> <li>2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel</li> </ol>	75%	<p>Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan indeks kepuasan masyarakat yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun instrumen survei</li> <li>2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel</li> <li>3. Laporan hasil SKM sedang dalam proses penyelesaian oleh Tim Layanan.</li> <li>4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III sebesar 90,76 dengan konversi : 3,63 (Indeks) atau capaian sebesar 111,7% dibanding target 2025.</li> </ol>	Tim Tata Usaha	
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	70 (Nilai)	75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif yang tercipta dengan elektronik (Tte) dan melakukan pemberkasan arsip secara elektronik sesuai kaidah kearsipan (melalui google drive);</li> <li>2. Meregistrasikan naskah masuk ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>3. Meregistrasikan naskah keluar ke aplikasi srikandi;</li> <li>4. Memberkaskan naskah masuk dan naskah keluar ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>5. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif (arsip tekstual);</li> <li>6. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip inaktif (arsip tekstual);</li> </ol>	75%	<p>Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan nilai kearsipan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif yang tercipta dengan elektronik (Tte) dan melakukan pemberkasan arsip secara elektronik sesuai kaidah kearsipan (melalui google drive);</li> <li>2. Meregistrasikan naskah masuk ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>3. Meregistrasikan naskah keluar ke aplikasi srikandi;</li> <li>4. Memberkaskan naskah masuk dan naskah keluar ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>5. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif (arsip tekstual);</li> <li>6. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip inaktif (arsip tekstual);</li> <li>7. Penilaian Pengawasan Kearsipan akan dilakukan oleh Kantor Pusat pada Triwulan IV 2025.</li> <li>8. Nilai Unit Pengolah = 95,62 dan Unit Kearsipan = 89,47 dan hasil akhirnya menunggu pleno dan Biro Umum.</li> </ol>	Tim Tata Usaha	
	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	80 (%)	75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik,</li> <li>2. Perumusan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE</li> </ol>	75%	<p>Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait penerapan SPBE yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik,</li> <li>2. Perumusan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE</li> </ol>	Tim Tata Usaha	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Progres	Pelaksanaan Kegiatan	
					4. Melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM SPBE Pusat Data dan Informasi		4. Melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM SPBE Pusat Data dan Informasi.	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian	50 (%)	75%	1. Penyusunan dan penyiapan berkas dokumen audit kinerja dan keuangan 2. Melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM APIP Inspektorat Jenderal	100%	1. Telah dilakukan kegiatan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan ke Inspektorat Jenderal dengan melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM APIP Inspektorat Jenderal. 2. Adapun hasil temuan sebanyak 4 temuan dan 11 rekomendasi telah selesai sesuai dengan lingkup program dan keuangan yang telah diaudit.	Tim Tata Usaha

Catatan \*):

1. Realisasi lulusan diklat yang bekerja sampai dengan triwulan III 2025 sebanyak 18 orang dengan capaian sebesar 50% dari 45 orang peserta diklat 3in1 yang disebabkan oleh rekrutmen karyawan dari perusahaan secara bertahap dibagi dalam beberapa termin bulan perekrutan. Selain itu, perusahaan tempat penempatan sedang dalam masa perbaikan di bagian line produksi.
2. Realisasi lulusan diklat 3 in1 berbasis kompetensi terhambat dikarenakan adanya kebijakan pending penggunaan anggaran diklat kompetensi dari BPSDMI.

Medan, 3 Oktober 2025

Kepala Balai Diklat Industri Medan



Chairil Almy, ST, M.Si, Ph.D

**Laporan Hasil Monitoring Rencana Aksi  
Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Progres	Pelaksanaan Kegiatan	
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Perumbuhan Sektor Industri Manufaktur	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja dalam 1 Tahun*)	93 (%)	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sosialisasi diklat berbasis PNBSP ke industri terkait.</li> <li>Melakukan Tracer Study terhadap alumni Diklat Berbasis Kompetensi.</li> <li>Persiapan Penyelenggaraan Diklat Berbasis PNBSP <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan Instrumen Diklat untuk seluruh kompetensi sesuai dengan spesialisasi</li> <li>Menyiapkan Jadwal penyelenggaraan diklat</li> <li>Membuat jadwal petugas piket dalam pelaksanaan diklat</li> <li>Menyiapkan instruktur sesuai dengan kompetensinya dan diklat yang dilaksanakan</li> <li>Pelaksanaan uji kompetensi sesuai diklat</li> <li>Membuat laporan pasca diklat</li> </ul> </li> <li>Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi</li> <li>Membuat laporan pasca diklat</li> <li>Verifikasi penambahan ruang lingkup di BNSP melalui verifikator yang sudah ditetapkan oleh BNSP</li> </ol>	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sosialisasi diklat berbasis PNBSP ke industri terkait</li> <li>Melakukan Tracer Study terhadap alumni Diklat Berbasis Kompetensi.</li> <li>Persiapan Penyelenggaraan Diklat Berbasis PNBSP <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan Instrumen Diklat untuk seluruh kompetensi sesuai dengan spesialisasi</li> <li>Menyiapkan Jadwal penyelenggaraan diklat</li> <li>Membuat jadwal petugas piket dalam pelaksanaan diklat</li> <li>Menyiapkan instruktur sesuai dengan kompetensinya dan diklat yang dilaksanakan</li> <li>Pelaksanaan uji kompetensi sesuai diklat</li> <li>Membuat laporan pasca diklat</li> </ul> </li> <li>Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi</li> <li>Membuat laporan pasca diklat</li> <li>Verifikasi penambahan ruang lingkup di BNSP melalui verifikator yang sudah ditetapkan oleh BNSP</li> <li>Sampai dengan Triwulan IV 2025 telah dilaksanakan Diklat sebanyak 157 orang dari target 152 orang.</li> <li>Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri sebesar 97,45% dengan capaian 104,79% dari target 2025.</li> </ol>	Tim Diklat, LSP dan Kerjasama
		Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi*)	152 (Orang)	100%				
		Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh*)	2 (Tenant)	100%	<p>Pasca Inkubasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan jejaring antar peserta inkubasi (tenant)</li> <li>Pemberian peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta inkubasi (tenant)</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta inkubasi (tenant) selama 2 tahun</li> <li>Pendampingan proses pembentukan wadah yang legal dan pengurusan izin usaha dan izin edar.</li> </ol>	100%	<p>Telah dilakukan proses Pasca Inkubasi melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi penyediaan jejaring antar peserta inkubasi (tenant) melalui WAG Tenant</li> <li>Pemberian peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta inkubasi (tenant) melalui fasilitasi pameran dan business matching</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta inkubasi (tenant) selama 2 tahun</li> <li>Pendampingan proses pembentukan wadah yang legal dan pengurusan izin usaha dan izin edar.</li> <li>Telah dilakukan uji validasi tahap 3 dan diberikan sertifikat kepada keempat tenant pada Triwulan IV 2025.</li> <li>Jumlah realisasi tenant Inkubasi sebanyak 4 tenant dengan capaian 200% dari target 2025.</li> </ol>	Tim INBIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Progres	Pelaksanaan Kegiatan	
2	Menguatnya Komponen Penunjang Produktivitas Industri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91 (%)	100%	Pelaksanaan belanja akun 52 (pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai) dengan prioritas pada barang PDN dan TKDN	100%	Pelaksanaan belanja akun 52 (pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai) dengan prioritas pada barang PDN dan TKDN dengan nilai TKDN posisi terakhir 2025 sebesar 100%.	Tim Tata Usaha
3	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi pada layanan prima	Nilai SAKIP	79,5 (Nilai)	100%	1. Penyiapan Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan Rencana Aksi) 2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV (Rencana Aksi, Laporan PP 39 dan Data SIK) 3. Penyiapan Dokumen Laporan Kinerja Triwulan IV 4. Penyiapan Dokumen Lainnya terkait SAKIP	100%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk penilaian SAKIP seperti: 1. Penyiapan Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Aksi) 2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV (Rencana Aksi, Laporan PP 39 dan Data SIK) 3. Penyiapan Dokumen Laporan Kinerja Triwulan IV 4. Penyiapan Dokumen Lainnya terkait SAKIP 5. Nilai akhir SAKIP 2025 adalah 79,35 atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 75,25 dan Tahun 2023 (72,40).	Tim Tata Usaha
		Nilai Laporan Keuangan	78 (Nilai)	100%	1. Pengarahan, dan Koordinasi 2. Pengumpulan dokumen laporan keuangan	100%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait penyiapan laporan keuangan yaitu : 1. Pengarahan dan Koordinasi 2. Pengumpulan dokumen laporan keuangan 3. Nilai Laporan Keuangan tahun 2025 sebesar 95,5 atau meningkat sebesar 3,29% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 92,45. 4. BDI Medan berada di rangking 13-14 dari 57 satker Kemenperin dan rangking 2 dari 7 BDI di lingkup BPSDMI.	Tim Tata Usaha
		Nilai Profesional ASN	81,3 (Indeks)	100%	1. Pendataan kedisiplinan pegawai, 2. Pendataan kinerja pegawai, 3. Melakukan analisa pengembangan kompetensi pegawai, 4. Melakukan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai, 5. Penilaian SKP oleh Pimpinan,	100%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan nilai profesional ASN yaitu : 1. Pendataan kedisiplinan pegawai, 2. Pendataan kinerja pegawai, 3. Melakukan analisa pengembangan kompetensi pegawai, 4. Melakukan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai, 5. Penilaian SKP oleh Pimpinan. 6. Nilai Profesional ASN Tahun 2025 sebesar 85,4 dengan capaian 105,04%.	Tim Tata Usaha
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94 (Indeks)	100%	1. Pengarahan, dan Koordinasi 2. Perengkapan dokumen, 3. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan 4. Mengidentifikasi besaran UP Tunai dan KKP secara rasional dan menggunakan secara efektif dan efisien 5. Melaksanakan Rapat RPD dengan masing-masing penanggung jawab kegiatan mencegah deviasi hal. III DIPA	100%	Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan nilai IKPA yaitu : 1. Pengarahan, dan Koordinasi 2. Perengkapan dokumen, 3. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan 4. Mengidentifikasi besaran UP Tunai dan KKP secara rasional dan menggunakannya secara efektif dan efisien. 5. Melaksanakan Rapat RPD dengan masing-masing penanggung jawab kegiatan	Tim Tata Usaha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Progres	Pelaksanaan Kegiatan	
							<p>mencegah deviasi hal III DIPA</p> <p>6. Nilai IKPA posisi tahun 2025 adalah 97,45 atau capaian sebesar 103,67% dibanding target 2025</p> <p>7. Nilai IKPA juga meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 91,52.</p>	
		Survey Kepuasan Masyarakat	3,25 (Indeks)	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun instrumen survei</li> <li>2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel</li> </ol>	100%	<p>Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan indeks kepuasan masyarakat yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun instrumen survei</li> <li>2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel</li> <li>3. Laporan hasil SKM sedang dalam proses penyelesaian oleh Tim Layanan.</li> <li>4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV sebesar 91,53 dengan nilai konversi sebesar 3,66% atau dengan capaian sebesar 112,62% target 2025.</li> </ol>	Tim Tata Usaha
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	70 (Nilai)	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif yang tercipta dengan elektronik (Tte) dan melakukan pemberkasan arsip secara elektronik sesuai kaidah kearsipan (melalui google drive);</li> <li>2. Meregistrasikan naskah masuk ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>3. Meregistrasikan naskah keluar ke aplikasi srikandi;</li> <li>4. Memberkaskan naskah masuk dan naskah keluar ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>5. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif (arsip tekstual);</li> <li>6. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip inaktif (arsip tekstual);</li> </ol>	100%	<p>Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan nilai kearsipan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif yang tercipta dengan elektronik (Tte) dan melakukan pemberkasan arsip secara elektronik sesuai kaidah kearsipan (melalui google drive);</li> <li>2. Meregistrasikan naskah masuk ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>3. Meregistrasikan naskah keluar ke aplikasi srikandi;</li> <li>4. Memberkaskan naskah masuk dan naskah keluar ke dalam aplikasi srikandi;</li> <li>5. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif (arsip tekstual);</li> <li>6. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas arsip inaktif (arsip tekstual);</li> <li>7. Penilaian Pengawasan Kearsipan akan dilakukan oleh Kantor Pusat pada Triwulan IV 2025.</li> <li>8. Nilai Unit Pengolah = 95,63 dan Unit Kearsipan = 93,67 dengan capaian 136,61%..</li> </ol>	Tim Tata Usaha
		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	80 (%)	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik,</li> <li>2. Perumusan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE</li> <li>4. Melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM SPBE Pusat Data dan Informasi</li> </ol>	100%	<p>Telah dilakukan beberapa kegiatan terkait penerapan SPBE yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik,</li> <li>2. Perumusan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE</li> <li>4. Melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM SPBE Pusat Data dan Informasi.</li> <li>5. Nilai SPBE Tahun 2025 sebesar 83,28 dengan capaian 108,16%.</li> </ol>	Tim Tata Usaha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Satuan)	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
				Target Fisik	Sasaran Kegiatan	Progres	Pelaksanaan Kegiatan	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian	50 (%)	100%	1. Penyusunan dan persiapan berkas dokumen audit kinerja dan keuangan 2. Melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM APIP Inspektorat Jenderal	100%	1. Telah dilakukan kegiatan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan ke Inspektorat Jenderal dengan melaksanakan konsultasi dan Koordinasi dengan TIM APIP Inspektorat Jenderal. 2. Adapun hasil temuan sebanyak 4 temuan dan 11 rekomendasi telah selesai sesuai dengan lingkup program dan keuangan yang telah diaudit. 3. Persentasi rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti adalah 100%.	Tim Tata Usaha

Catatan :

1. Tanda \*) merupakan Indikator Kinerja Utama sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang lama.
2. Pada Triwulan IV 2025 telah terjadi perubahan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja sesuai arahan dari Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian.

Medan, 6 Januari 2026

Kepala Balai Diklat Industri Medan



Chairil Almy, ST, M.Si, Ph.D



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BDI MEDAN**

NOMOR : 34 /IJ-IND.2/LHE/V/2025

TANGGAL : 26 MEI 2025

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
2025**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 2181 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat I telah melaksanakan evaluasi atas Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada BDI Medan dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100.

BDI Medan memperoleh nilai sebesar 79,35 atau BB dengan interpretasi **Sangat Baik**. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di BDI Medan dengan rincian sebagai berikut:

- |  |         |
|--|---------|
| a. Perencanaan Kinerja                     | : 23,70 |
| b. Pengukuran Kinerja                      | : 24,60 |
| c. Pelaporan Kinerja                       | : 12,30 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | : 18,75 |

Berdasarkan hasil evaluasi, kami rekomendasikan Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut dalam rangka meningkatkan implemementasi SAKIP yaitu:

1. Dalam menetapkan target di dokumen-dokumen perencanaan kinerja harus mempertimbangkan agar target dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
2. Melakukan evaluasi berkala atas dokumen-dokumen perencanaan kinerja (Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja) untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan dari dokumen perencanaan kinerja tersebut.
3. Melakukan evaluasi berkala atas mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk menguji keandalan, kesesuaian, serta pemanfaatan data kinerja yang dilaporkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Melakukan rewiu berjenjang dalam proses penyusunan dan finalisasi LAKIP untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, serta perbaikan/penyempurnaannya.
5. Memanfaatkan data dan informasi dalam SAKIP untuk perencanaan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja di tahun berikutnya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum Evaluasi**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2181 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
6. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 78/IJ-IND/ST/II/2025 tanggal 27 Februari 2025.

#### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

#### C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk didalamnya penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, sampai dengan evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya. (menjadi satu di komponen 1 s.d. 4)

#### E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), survei target evaluasi (*target group*), penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non-parametrik, perbandingan (*benchmarking*), analisis lintas bagian (*cross section analysis*), analisis kronologis (*time series analysis*), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/symbol-simbol, dan sebagainya.

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:

1. Kedalaman evaluasi (instansi pemerintah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;

2. Tingkatan tataran/konteks yang dievaluasi dan bidang/konten permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

1. *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama.

3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

#### 4. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

#### F. Gambaran Umum BDI Medan

BDI Medan adalah badan diklat di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BDI Medan mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi tekstil dan produk tekstil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BDI Medan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang teknologi tekstil dan produk tekstil (TPT);
2. Pelaksanaan & pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi TPT;
3. Pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi serta pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;
5. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
6. Pengelolaan pabrik dalam sekolah (Teaching Factory);
7. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja serta peningkatan keterampilan tenaga kerja industri TPT;
8. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
9. Pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
10. Pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
11. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
12. Pelaksanaan pengawasan internal; dan
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP BDI Medan

Pada Evaluasi tahun sebelumnya, BDI Medan mendapatkan nilai 75,25, kategori BB dengan interpretasi Sangat Baik. Nilai di tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 4,10 poin di tahun 2025.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, BDI Medan telah direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan target di dokumen-dokumen perencanaan kinerja harus mempertimbangkan agar dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
2. Melakukan evaluasi berkala atas dokumen-dokumen perencanaan kinerja (Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja) untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan dari dokumen perencanaan kinerja tersebut.
3. Melakukan evaluasi berkala atas mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk menguji keandalan, kesesuaian, serta pemanfaatan data kinerja yang dilaporkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Melakukan reviu berjenjang dalam proses penyusunan dan finalisasi LAKIP untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, serta perbaikan/penyempurnaannya.
5. Memanfaatkan data dan informasi dalam SAKIP untuk perencanaan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja di tahun berikutnya.

#### H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Melakukan reviu renstra terhadap target indikator kinerja yang belum SMART dan dengan target yang tidak meningkat pada jangka menengah (menantang) maupun yang turun dari tahun sebelumnya	Telah dilakukan reviu Renstra oleh BDI Medan.	Sudah ditindaklanjuti

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
2	Merevisi atau Membuat SOP terpisah terkait pengumpulan data kinerja untuk kinerja satuan kerja yang didalamnya juga mengatur adanya instrumen form data kinerja yang divalidasi dalam melakukan pengumpulan data kinerja.	Telah dilakukan revisi SOP untuk pengumpulan data kinerja.	Sudah ditindaklanjuti
3	Melengkapi informasi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dibuat perhitungannya per kinerja serta penyajian penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja pada rekomendasi LAKIP.	LAKIP telah disusun berdasarkan PermenPAN RB 53 Tahun 2014	Sudah ditindaklanjuti
4	Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus-menerus dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Telah ada peningkatan dalam implementasi SAKIP, dibuktikan dengan nilai evaluasi SAKIP BDI Medan naik.	Sudah ditindaklanjuti

## BAB II HASIL EVALUASI

### A. Kondisi

#### 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai 23,70 dari 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	<b>Perencanaan Kinerja</b>	<b>30,00</b>	<b>23,70</b>
1a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40
1b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,30
1c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00

BDI Medan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja 2024 dan 2025, Rencana Kinerja 2024 dan 2025, KAK dan RAB dengan baik. Perencanaan Kinerja juga telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Berdasarkan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Sub Komponen 1a mendapatkan nilai A dengan kriteria penilaian yang ada telah dipenuhi dan terdokumentasi secara memadai untuk 1 tahun terakhir. Untuk mendapatkan nilai maksimal diharapkan BDI Medan bisa mempertahankan kondisinya untuk 5 tahun terakhir.
- b. Sub Komponen 1b mendapatkan nilai B dengan kondisi masih terdapat kriteria penilaian yang belum terpenuhi, yaitu target yang ditetapkan pada dokumen-dokumen perencanaan kinerja belum seluruhnya dipertimbangkan dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
- c. Sub Komponen 1c mendapatkan nilai BB dengan kondisi kriteria penilaian yang ada telah dipenuhi dan terdokumentasi secara memadai di tahun penilaian. Untuk mendapatkan nilai A BDI Medan harus

memiliki usaha yang dapat dihargai berupa aplikasi yang dipergunakan dalam perencanaan kinerja.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 24,60 dari 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
2	<b>Pengukuran Kinerja</b>	<b>30,00</b>	<b>24,60</b>
2a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40
2b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,20
2c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00

Pengukuran Kinerja dievaluasi dengan menggunakan data-data kinerja yang ada dan rutin dilakukan secara berkala (triwulanan), baik dengan menggunakan laporan PP39, rapat rutin secara berkala dan terdokumentasi, dan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Selain itu, Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian dalam mencapai kinerja. Berdasarkan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Sub Komponen 2a mendapatkan nilai A dengan kriteria penilaian yang ada telah dipenuhi dan terdokumentasi secara memadai untuk 1 tahun terakhir. Untuk mendapatkan nilai maksimal diharapkan BDI Medan bisa mempertahankan kondisinya untuk 5 tahun terakhir.
- b. Sub Komponen 2b mendapatkan nilai BB dengan kondisi kriteria penilaian yang ada telah dipenuhi dan terdokumentasi secara memadai di tahun penilaian. Untuk mendapatkan nilai A BDI Medan harus memiliki usaha yang dapat dihargai berupa penghargaan yang diterima dari unit eksternal (selain internal Kemenperin) untuk substansi pengukuran kinerja.

- c. Sub Komponen 2c mendapatkan nilai BB yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi SAKIP. Untuk mendapatkan nilai A BDI Medan harus memiliki usaha yang dapat dihargai berupa aplikasi yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 12,30 dari 15,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
<b>3</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	<b>15,00</b>	<b>12,30</b>
3a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70
3b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60
3c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00

Dokumen Laporan Kinerja telah melaporkan kinerja yang diperjanjikan antara Kepala BDI Medan dengan Kepala BPSDMI yang disusun, diformalkan, publikasi dan disampaikan tepat waktu. Laporan Kinerja BDI Medan secara kualitas dan sistematika telah berpedoman dan disusun sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Namun, Pelaporan Kinerja belum memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya. Berdasarkan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Sub Komponen 3a mendapatkan nilai A dengan kriteria penilaian yang ada telah dipenuhi dan terdokumentasi secara memadai untuk 1 tahun terakhir. Untuk mendapatkan nilai maksimal diharapkan BDI Medan bisa mempertahankan kondisinya untuk 5 tahun terakhir.
- b. Sub Komponen 3b mendapatkan nilai BB dengan kondisi Laporan kinerja BDI Medan telah disusun namun belum dilakukan reuiu LAKIP

yang berpedoman kepada Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk mendapatkan nilai A BDI Medan harus memiliki usaha yang dapat dihargai berupa penghargaan yang diterima dari unit eksternal (selain internal Kemenperin) untuk substansi pelaporan kinerja.

- c. Sub Komponen 3c mendapatkan nilai BB yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi SAKIP. Untuk mendapatkan nilai A BDI Medan harus memiliki usaha yang dapat dihargai berupa aplikasi yang dipergunakan dalam pelaporan kinerja.

#### 4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 18,75 dari 25,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
<b>4</b>	<b>Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	<b>25,00</b>	<b>18,75</b>
4a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00
4b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00
4c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan baik oleh sumber daya yang memadai. Rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, serta dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan evaluasi didapatkan hasil sebagai sbb:

- a. Penilaian untuk Sub Komponen 4a dan 4b disepakati nilai yang sama untuk hasil penilaian pada Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal tahun lalu yaitu BB. Ada perbaikan dokumen keberadaan dengan adanya Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2181 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian; dan

- b. Sub komponen 4c mendapatkan nilai B dengan catatan ada perbandingan capaian yang tidak meningkat dari tahun sebelumnya sehingga masih ada kriteria penilaian yang belum dipenuhi.

#### B. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pada kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, BDI Medan direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan target di dokumen-dokumen perencanaan kinerja harus mempertimbangkan agar target dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
2. Melakukan evaluasi berkala atas dokumen-dokumen perencanaan kinerja (Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja) untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan dari dokumen perencanaan kinerja tersebut.
3. Melakukan evaluasi berkala atas mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk menguji keandalan, kesesuaian, serta pemanfaatan data kinerja yang dilaporkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Melakukan reviu berjenjang dalam proses penyusunan dan finalisasi LAKIP untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, serta perbaikan/penyempurnaannya.
5. Memanfaatkan data dan informasi dalam SAKIP untuk perencanaan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja di tahun berikutnya.

### BAB III PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan evaluasi AKIP, BDI Medan memperoleh nilai total sebesar 79,35 atau BB dengan rincian per komponen sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja : 23,70
- b. Pengukuran Kinerja : 24,60
- c. Pelaporan Kinerja : 12,30
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 18,75

Hal ini berarti Evaluasi AKIP BDI Medan Sangat Baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level tim kerja.

#### B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Terima kasih atas kerjasama dan respon yang baik dari BDI Medan. Hasil dari Evaluasi AKIP diharapkan mampu untuk meningkatkan implementasi SAKIP yang lebih baik kedepannya dan rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan.



## LAMPIRAN

1. Lembar Kerja Evaluasi
2. Surat Tugas

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Nilai	Catatan Evaluasi
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		23,70	Jika ya = V, tidak =	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,4	100%	Data 5 tahun terakhir?
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				V	- SOP Penyusunan Perencanaan Kinerja - SOP Penyusunan RKAKL - SOP Rencana Kinerja Tahunan
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.					RIPIN 2015-2035
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				V	Renstra BDI Medan 2020-2024 Revisi 5
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				V	- Perkin 2024 - Rencana Kinerja 2024
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				V	- Matriks keterkaitan kinerja (lampiran Renstra) - Rencana Aksi 2024 - RAB 2024
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				V	POK 2024
7	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				V	Perkin 2025
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	B	6,3	91%	
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				V	oke

2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	V	ND penyampaian terlampir
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	V	IKU tidak terdapat pada Renstra namun ada pada ND peentapan IKU
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	V	IKU tidak terdapat pada Renstra namun ada pada ND peentapan IKU
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	V	sudah SMART
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable -	V	IKU tidak terdapat pada Renstra namun ada pada ND peentapan IKU
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	X	<p>Target IK Tersedianya SDM Industri yang Kompeten pada tahun 2023-2025 adalah 3280, 1912, 156 orang (menurun)</p> <p>Target IK Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi pada tahun 2023-2025 adalah 3250, 1900, 152 orang (menurun)</p> <p>Target IK Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh pada tahun 2024 adalah 4 tenant menjadi IK Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh sebanyak 2 tenant (menurun)</p> <p>Terdapat penurunan target pada IK Nilai SAKIP BDI dari 75 pada tahun 2023 menjadi 72 pada tahun 2024 (capaian pada tahun 2023 adalah 72,4 sehingga tidak menantang)</p> <p>Target IK Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti pada tahun 2024 tetap 92 sama dengan target pada tahun 2023</p> <p>Target IK Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian sebesar 92,2% pada tahun 2024 menjadi 50% pada tahun 2025</p>
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	V	SKP masing-masing pegawai sudah dilampirkan

9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				V	sudah melampirkan kertas kerja crosscutting
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				V	oke
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				V	oke
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12	100%	
Kriteria:						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				V	Matriks keterkaitan kinerja, anggaran, dan kegiatan
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				V	Matriks keterkaitan kinerja, anggaran, dan kegiatan
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .				V	
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				V	Terdapat monitoring rencana aksi 2024 dan notulensi rapat triwulan IV sebagai evaluasi tahunan BDI Medan
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.				V	Notulen reviu Renstra
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.				V	Notulen reviu Renstra
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				V	Notulen rapat pembahasan SKP 2025 beserta daftar hadir dan dokumentasi

8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				V	Notulen rapat pembahasan SKP 2025 beserta daftar hadir dan dokumentasi
2	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	30,00		24,60	Jika ya = v, Tidak =	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,4	100%	
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				V	
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				V	Lampiran pedoman kinerja pada Renstra
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				V	SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,2	100%	
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.				V	Daftar hadir dan Notulensi Rapat Monev rencana aksi dan penyusunan lakip (pimpinan hadir dalam rapat)
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				V	
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				V	
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				V	Laporan PP39 tiap triwulan
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				V	Notulen rapat PP39
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				V	
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				V	ok
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12	100%	
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.				V	ok
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.					
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.					

4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.				V	ok
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.				V	ok
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.				V	ok
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.				V	ok
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				V	Terdapat penjelasan efisiensi dalam LAKIP
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				V	Notulen dan undangan rapat PP39 sudah dilampirkan Daftar hadir rapat juga sudah dilampirkan
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				V	Notulen dan undangan rapat PP39 sudah dilampirkan Daftar hadir rapat juga sudah dilampirkan
3	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	15,00		12,30	Jika ya = V, tidak =	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,7	100%	
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				V	sudah disusun dan dipublikasikan di website
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				V	sudah disusun dan dipublikasikan di website

3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				V	sudah disusun dan dipublikasikan di website
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.				V	Bukti reviu LAKIP 2020-2022 belum ada
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				V	sudah disusun dan dipublikasikan di website
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				V	ND penyampaian LAKIP pada tanggal 30 Januari 2025
<b>3.b</b>	<b>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</b>	<b>4,50</b>	<b>BB</b>	<b>3,6</b>	<b>100%</b>	
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				V	oke
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				V	oke
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				V	oke
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				V	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				V	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).				V	Sudah ada Perbandingan nilai SAKIP dengan Badan Geologi ESDM
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				V	sudah
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				V	sudah
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				V	sudah
<b>3.c</b>	<b>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</b>	<b>7,50</b>	<b>BB</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	Aplikasi Pemeliharaan BMN (Barang Milik Negara) di Balai Diklat Industri (BDI) Medan adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang dirancang untuk mengelola pemeliharaan aset secara lebih terstruktur. Aplikasi ini membantu menyusun rencana pemeliharaan
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				V	Notulensi rapat Pembahasan Evaluasi AKIP BDI Medan Tahun 2024 beserta undangan, dokumentasi dan daftar hadir
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				V	Notulensi rapat Pembahasan Evaluasi AKIP BDI Medan Tahun 2024 beserta undangan, dokumentasi dan daftar hadir yang diisi oleh seluruh pegawai

3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				V	sudah dikonfirmasi
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				V	sudah dikonfirmasi dan diperbaiki terdapat arahan yang spesifik terkait penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				V	sudah dikonfirmasi
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				V	sudah dikonfirmasi
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				V	
4	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA</b>	25,00		18,75	Jika ya = v, tidak =	
4.a	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</b>	5,00	BB	4	100%	
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				v	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				v	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				v	
4.b	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</b>	7,50	BB	6	100%	
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				v	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				v	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				v	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				v	
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				v	
4.c	<b>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</b>	12,50	B	8,75	80%	
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.				v	

2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.	V	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	V	
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	V	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi menurun dikarenakan target menurun Dibawa ke pleno (2 dari 7 IK menurun)
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	X	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BDI Medan menurun Dibawa ke pleno (1 dari 7 IK menurun)
<b>NILAI SAKIP</b>		<b>79,35</b>	

**SURAT TUGAS**

Nomor 78/IJ-IND/ST/II/2025

- Menimbang** :
- bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia;
  - bahwa perlu dilakukan evaluasi SAKIP dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Dasar** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
  - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Inspektur Jenderal memberi perintah

- Kepada** :
- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Liliek Widodo                  | (Pengendali Mutu)   |
| 2. Afrizal Haris                  | (Pengendali Teknis) |
| 3. Hariadi Amri                   | (Pengendali Teknis) |
| 4. Kesumaning Hastuti             | (Ketua Tim)         |
| 5. Mohammad Adhi Rachmaidi        | (Ketua Tim)         |
| 6. Rachmat Muhbianto              | (Ketua Tim)         |
| 7. Rizki Aviandri                 | (Ketua Tim)         |
| 8. Arantxa Tiar                   | (Ketua Tim)         |
| 9. Noer Kristia Lestari Sitepu    | (Anggota)           |
| 10. Dinavita Rizkyanti            | (Anggota)           |
| 11. Hary Apriyandi Mulla Romadhon | (Anggota)           |
| 12. Aditya Gamma Mesakh S         | (Anggota)           |
| 13. Noer Dwi Rizkia Putri         | (Anggota)           |
| 14. Yon Handika Siregar           | (Anggota)           |
- Untuk** : Melakukan Evaluasi SAKIP pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal terhitung mulai tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025 (15 hari kerja).

Jakarta, 27 Februari 2025



**Tembusan:**

- Inspektur Jenderal
- Yang Bersangkutan

**TIM EVALUASI SAKIP BPSDMI DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
13 MARET - 11 APRIL 2025**

No	Tim	Satuan Kerja yang dinilai
<b>Pengendali Teknis: Afrizal Haris</b>		
1	Rizki Aviandri Aditya Gamma M Yon Handika S	1. Sekretariat Jenderal (Eselon I) 2. Biro Umum 3. Pusdiklat SDM Industri 4. Politeknik APP Jakarta 5. Politeknik ATI Makassar 6. SMK SMAK Padang 7. SMK SMTI Bandar Lampung 8. BDI Medan 9. BDI Denpasar
2	Arantxa Tiar Noer Dwi Rizkia Putri	1. Biro Hukum 2. Pusbinlat SDM Aparatur 3. Politeknik AKA Bogor 4. Politeknik Industri Logam Morowali 5. SMK SMAK Bogor 6. SMK SMTI Yogyakarta 7. BDI Jakarta 8. BDI Makassar
3	Kesumaning Hastuti Noer Kristia LS	1. Biro Perencanaan 2. Biro Humas 3. PTKI Medan 4. Politeknik STTT Bandung 5. Politeknik Petrokimia Banten 6. SMK SMAK Makassar 7. SMK SMTI Pontianak 8. BDI Yogyakarta
<b>Pengendali Teknis: Hariadi Amri</b>		
4	Rachmat Muhbianto Dinavita Rizkyanti	1. Biro Keuangan 2. Sekretariat BPSDMI 3. Politeknik ATI Padang 4. Politeknik IFPK Kendal 5. AK ITPT Surakarta 6. SMK SMTI Banda Aceh 7. SMK SMTI Makassar 8. BDI Surabaya
5	M. Adhi Rachmaidi Hary Apriyandi MR	1. BPSDMI (Eselon I) 2. Biro OSDM 3. Pusat PPVI 4. Politeknik STMI Jakarta 5. Politeknik ATK Yogyakarta 6. AK Industri Manufaktur Bantaeng 7. SMK SMTI Padang 8. BDI Padang

## **PERJANJIAN KERJASAMA**

**BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI  
DENGAN PT. ASIA SAKTI WAHID FOODS MANUFACTURE**

Nomor : B/ 8 /BPSDMI/BD1-Medan/HK/IV/2025  
Nomor :

### **TENTANG**

**Pengembangan sumber daya manusia industri/tenaga kerja industri pada industri pengolahan makanan melalui pelaksanaan Diklat 3in1 Operator Produksi Olahan Makanan Angkatan ke-1**

Pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Balai Diklat Industri Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Balai Diklat Industri Medan dan PT. Asia Sakti Wahid Foods Manufacture Nomor 19/BPSDMI/BD1Medan/NK/XI/2022 yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini tentang pengembangan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3in1, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Chairil Almy, ST, M.Si  
Jabatan : Kepala Balai Diklat Industri Medan  
Alamat :Jalan Medan - Tg. Morawa KM. 10/Jalan Damai No. 32  
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas,  
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Diklat Industri Medan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

- Nama : Suwandi  
Jabatan :Direktur Human Capital & General Affair  
PT. Asia Sakti Wahid Foods Manufacture  
Alamat :Jalan Pertahanan I No 7, Kelurahan Timbang Deli,  
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi  
Sumatera Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Asia Sakti Wahid Foods Manufacture, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- 1) bahwa PIHAK PERTAMA merupakan satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian RI yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten sesuai permintaan industri;
- 2) bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang produksi makanan dengan hasil produk biskuit, wafer dan coklat butir di Kota Medan;
- 3) bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk bersinergi dan kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten di industri pengolahan makanan bagi calon karyawan PIHAK KEDUA, dan;
- 4) bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri ini berdasarkan pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan ikatan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten adalah kegiatan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3in1 yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan kerja di industri.
2. Verifikasi TUK adalah proses penilaian dan persetujuan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memastikan bahwa sebuah Tempat Uji Kompetensi (TUK) memenuhi standar yang ditetapkan sehingga layak digunakan untuk pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Dalam hal ini lokasi TUK adalah di PT. Asia Sakti Wahid Foods Manufacture sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Diklat berbasis kompetensi dengan sistem 3in1 sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 (satu) diatas terdiri dari diklat skilling, diklat reskilling dan diklat upskilling pada spesialisasi industri pengolahan makanan.

4. Diklat skilling adalah diklat berbasis kompetensi dengan sistem 3in1 yang diselenggarakan Balai Diklat industri Medan bekerjasama dengan industri, atau asosiasi industri, atau pemerintah daerah, atau lembaga pelatihan kerja, atau mitra-mitra lainnya, dalam rangka penempatan tenaga kerja baru di industri.
5. Diklat upskilling adalah diklat berbasis kompetensi dengan sistem 3in1 yang diselenggarakan Balai Diklat industri Medan bekerjasama dengan industri, atau asosiasi industri, atau pemerintah daerah, atau lembaga pelatihan kerja, atau mitra mitra lainnya, dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja industri di bidang pekerjaan yang baru karena adanya peningkatan jabatan atau adanya promosi jabatan industri.
6. Diklat reskilling adalah diklat berbasis kompetensi dengan sistem 3in1 yang diselenggarakan Balai Diklat Industri Medan bekerjasama dengan industri, atau asosiasi industri, atau pemerintah daerah, atau lembaga pelatihan kerja, atau mitra lainnya, dalam rangka pembaharuan kompetensi kerja, baik yang disebabkan karena mutasi pada pekerjaan yang baru, maupun yang disebabkan karena adanya perubahan teknologi produksi di industri.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam rangka pengembangan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten di industri pengolahan makanan.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri agar mampu berproduksi dengan produktivitas dan daya saing tinggi. Pelatihan ini dimaksudkan bagi calon pekerja PIHAK KEDUA.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri di industri pengolahan makanan bagi calon pekerja PIHAK KEDUA.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang selanjutnya disebut diklat.

## PASAL 4

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA,
  - a. Menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi dengan sistem 3in1 yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Balai Diklat Industri Medan;
  - b. Menyusun kurikulum diklat sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku;
  - c. Menyediakan dan menugaskan tenaga instruktur/ pengajar yang kredibel dan relevan dengan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan;
  - d. Memastikan kelayakan tempat uji kompetensi melalui Verifikasi TUK, dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi peserta diklat;
  - e. Menyediakan dan menugaskan asesor untuk melakukan uji kompetensi;
  - f. Menerbitkan Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan dari Kementerian Perindustrian bagi semua peserta diklat dan Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi peserta yang dinyatakan "kompeten" sesuai dengan SKKNI yang berlaku;
  - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kinerja diklat pasca pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Monitoring dan evaluasi dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan diklat dengan cara survei, kunjungan lapangan, wawancara, yang akan dituangkan dalam laporan tertulis.
  
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA
  - a. Mengajukan permintaan diklat berbasis kompetensi dengan sistem 3in1 sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja industri;
  - b. Melakukan seleksi/ penyaringan calon peserta diklat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan diklat selama kegiatan tersebut berlangsung;
  - d. Menyediakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta yang telah mengikuti diklat;
  - e. Menyediakan tempat, sarana dan prasarana diklat serta peralatan pembelajaran;
  - f. Menempatkan lulusan diklat di PT. Asia Sakti Wahid Foods Manufacture melalui perusahaan ahli daya yang akan ditunjuk oleh PT. Asia Sakti Wahid Foods Manufacture.

## PASAL 5 LOKASI

Lokasi kegiatan yang tercakup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi wilayah kerja yang disepakati bersama PARA PIHAK.

PASAL 6  
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kewenangan PARA PIHAK.
2. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakil sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya, dan bertanggungjawab dalam teknis pelaksanaan kegiatan.
3. Setiap Perjanjian Kerjasama memuat Berita Acara Penyerahan Peserta yang telah mengikuti diklat dari Balai Diklat Industri Medan ke PT. Asia Sakti Wahid Foods Manufacture untuk dipekerjakan. PIHAK PERTAMA wajib Menyusun dan menyerahkan Berita Acara yang memuat daftar peserta yang telah mengikuti diklat kepada Pihak Kedua
4. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini secara jujur, transparan, dan profesional serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Para Para Pihak dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta hadiah, imbalan, komisi, suap, atau bentuk keuntungan lain yang tidak sah yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
6. Apabila salah satu Pihak mengetahui atau mencurigai adanya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau pelanggaran etika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak tersebut wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan/atau pihak yang berwenang
7. Dalam Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Klausul ini, Pihak yang melakukan pelanggaran wajib menanggung segala akibat hukum dan kerugian yang timbul.
8. Pihak yang dirugikan berhak untuk menghentikan pelaksanaan Perjanjian secara sepihak, tanpa kewajiban untuk membayar kompensasi apa pun kepada Pihak yang melakukan pelanggaran.
9. Pelanggaran terhadap klausul ini dapat dijadikan dasar pemutusan kontrak (termination for cause).
10. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PASAL 7  
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
4. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara terkait sepanjang mengenai dibutuhkan putusan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian, salah satu Pihak berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini setiap saat sebelum berakhirnya Jangka Waktu, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan berikut ini:
  - a. Dapat diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan kebijakannya sendiri apabila Pihak yang lain: (i) cedera janji dan/atau (ii) lalai; dan/atau (iii) tidak melaksanakan kewajiban(-kewajiban) yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa pihak yang cedera janji telah diberi jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk memperbaiki cedera janji yang dilakukannya. Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib menyampaikan pemberitahuan pengakhiran melalui e-mail dan/atau surat tertulis yang dikirimkan ke alamat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian;
  - b. segera diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini;
  - c. segera diakhiri apabila terdapat peraturan berdasarkan hukum yang berlaku yang tidak mengizinkan dilanjutkannya Perjanjian ini.
5. Dalam hal pengakhiran yang harus dilakukan segera sebagaimana pada ayat 1 huruf b dan c, pemberitahuan disampaikan segera setelah timbulnya keadaan yang menjadi dasar pengakhiran melalui e-mail dan/atau surat tertulis yang dikirimkan ke alamat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
6. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, seluruh hak dan/atau kewajiban Para Pihak yang telah timbul sebelum pengakhiran tersebut akan tetap berlaku terhadap Para Pihak dan PARA PIHAK wajib menyelesaikan segala kewajiban tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Perjanjian berakhir.
7. Dalam hal salah satu Pihak gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak Perjanjian berakhir, Pihak Lainnya berhak mengambil segala upaya hukum yang dianggap perlu, baik tuntutan pidana maupun gugatan.

PASAL 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 9  
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, keterangan, dan informasi yang bersifat rahasia dan/atau wajar dianggap rahasia, yang diperoleh dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ("Informasi Rahasia"), termasuk namun tidak terbatas pada data peserta diklat.
2. Informasi Rahasia mencakup seluruh data atau keterangan dalam bentuk tertulis, lisan, visual, elektronik, digital, atau bentuk lainnya yang tidak diketahui public
3. Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap informasi yang:
  - a. telah tersedia untuk umum tanpa pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
  - b. telah dimiliki secara sah oleh Pihak penerima sebelum diterima dari Pihak lainnya;
  - c. dikembangkan secara mandiri tanpa merujuk pada Informasi Rahasia Pihak lainnya; dan/atau
  - d. wajib diungkapkan berdasarkan perintah pengadilan atau ketentuan hukum yang berlaku.
4. Dalam hal salah satu Pihak diwajibkan oleh hukum, peraturan perundang-undangan, atau perintah pengadilan yang berwenang untuk mengungkapkan sebagian atau seluruh Informasi Rahasia, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja/kalender sebelum pengungkapan dilakukan dan hanya mengungkapkan bagian informasi yang secara tegas diwajibkan untuk diungkapkan.
5. Masing-masing Pihak hanya dapat menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, dan hanya dapat mengungkapkannya kepada direksi, karyawan, konsultan, penasihat hukum, atau penasihat profesional lainnya yang secara wajar memerlukan informasi tersebut, dengan tanggung jawab penuh atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.
6. Atas permintaan tertulis dari salah satu Pihak, Pihak penerima Informasi Rahasia wajib segera mengembalikan atau memusnahkan seluruh Informasi Rahasia berikut salinannya dalam bentuk apa pun, dan jika diminta, memberikan pernyataan tertulis bahwa pemusnahan telah dilakukan, kecuali salinan yang wajib disimpan berdasarkan hukum yang berlaku.
7. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan kerahasiaan dan/atau hak kekayaan intelektual ini, maka Pihak yang melanggar wajib:
  - a. bertanggung jawab penuh atas seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak lainnya;

- b. membayar penalti kepada Pihak lainnya dengan nominal yang akan didiskusikan untuk setiap pelanggaran, tanpa mengurangi hak Pihak lainnya untuk menuntut ganti rugi tambahan; dan
  - c. mengakui hak Pihak lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.
8. Kewajiban dan perlindungan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri dengan alasan apa pun.

#### PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui surat elektronik (surel/ e-mail) pada alamat berikut:

PIHAK PERTAMA:

BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN

Alamat : Jl. Medan — Tanjung Morawa / Jl. Damai No. 32  
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan  
Amplas, Kota Medan — Provinsi Sumatera Utara  
Telpon : 061-7865857  
e-mail : [diklatindustrimedan@gmail.com](mailto:diklatindustrimedan@gmail.com)

PIHAK KEDUA:

PT. ASIA SAKTI WAHID FOODS MANUFACTURE

Alamat : Jalan Pertahanan I No 7, Kelurahan Timbang Deli,  
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara  
Telpon : 061-7861008  
e-mail : [aswfood@aswfoods.com](mailto:aswfood@aswfoods.com)

#### PASAL 11 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 12  
KEADAAN KAHAR

1. Masing-masing Pihak tidak dapat dipersalahkan atas keterlambatan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, apabila kegagalan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya atau keadaan darurat ("Force Majeure"), yang meliputi peperangan, bencana alam, banjir besar, kebakaran, huru-hara, pemogokan buruh, embargo, ketiadaan listrik dan kebijakan Pemerintah yang menghalangi terpenuhinya kewajiban Para Pihak.
2. Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.
3. Apabila Pihak yang lain tidak dapat memberikan jawaban atau tanggapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan dari Pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure, Pihak Lainnya tersebut dianggap telah setuju untuk mengklasifikasikan peristiwa Force Majeure.
4. Pihak yang terdampak Force Majeure tidak dikenai tanggung jawab atas kegagalannya memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini selama Force Majeure tersebut masih terjadi dan berdampak pada Pihak tersebut, dengan Pihak yang terdampak tetap mengupayakan semaksimal mungkin pemenuhan kewajiban tersebut berdasarkan itikad baik.
5. Apabila Force Majeure dan/atau akibat yang ditimbulkan olehnya berlanjut sampai lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sejak pemberitahuan, maka Para Pihak harus merundingkan kembali kondisi-kondisi dan kewajiban-kewajiban yang muncul berdasarkan Perjanjian ini
6. Apabila tidak tercapai kesepakatan di antara Para Pihak, maka Pihak yang tidak mengalami Force Majeure dapat memutuskan Perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang mengalami Force Majeure dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum putusan Perjanjian
7. Masing-masing Pihak wajib menanggung risiko kerugian yang timbul karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik masing-masing sebagai akibat dari adanya Force Majeure.
8. Para Pihak sepakat bahwa Force Majeure tidak mengesampingkan segala beban dan tanggung jawab Pihak yang terkena Force Majeure yang belum diselesaikan kepada Pihak yang tidak terkena Force Majeure.

PASAL 13  
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam yurisdiksi tertentu, ketentuan tersebut hanya tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan sejauh hal tersebut saja atau tidak dapat dilaksanakan dalam yurisdiksi tertentu saja dan tidak meniadakan ketentuan lain dalam Perjanjian ini
3. Para Pihak tidak diperkenankan mengalihkan sebagian dan/atau seluruh hak maupun kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya.
4. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini

PASAL 14  
PERUBAHAN/ADDENDUM

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk perubahan/addendum.
2. Perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing- masing mempunyai kekuatan yang sama

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR HUMAN CAPITAL &  
GENERAL AFFAIR  
PT. Asia Sakti Wahid Foods Manufacture

PIHAK PERTAMA  
KEPALA  
Balai Diklat Industri Medan



SUWANDI

CHAIRIL ALMY, ST, M.Si, Ph.D

## **PERJANJIAN KERJASAMA**

**BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI  
DENGAN  
PT. SISIRAU - PMKS ALUR GANTUNG**

Nomor : B/85/BPSDMI/BDI-Medan/HK/XI/2025

Nomor : 169/PKS-SSR/XI/2025

### **TENTANG**

**Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri/Tenaga Kerja Industri  
pada Industri Pengolahan Kelapa Sawit Melalui Pelaksanaan  
Diklat Vokasi Industri Upskilling Material Handling Angkatan -1**

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Desa Sidodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Balai Diklat Industri Medan dan PT. Sisirau Nomor 28/BPSDMI/BDI-Medan/NK/X/2023 tentang pengembangan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan Vokasi Industri, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Chairil Almy, ST, M.Si, Ph.D  
Jabatan : Kepala Balai Diklat Industri Medan  
Alamat : Jalan Medan - Tg. Morawa KM. 10/Jalan Damai No. 32  
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas,  
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Diklat Industri Medan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Fadli Gunawan  
Jabatan : Mill Manager PMKS Alur Gantung, PT. Sisirau  
Alamat : Desa Sidodadi, Kecamatan Kejuruan Muda,  
Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sisirau - PMKS Alur Gantung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- 1) bahwa PIHAK PERTAMA merupakan satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian RI yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten sesuai permintaan industri;
- 2) bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan industri yang bergerak di Industri Perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Provinsi Aceh;
- 3) bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten di industri kelapa sawit, dan;
- 4) bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri ini berdasarkan pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan ikatan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten adalah kegiatan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem Vokasi Industri yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan kerja di industri.
2. Diklat berbasis kompetensi dengan sistem Vokasi Industri sebagaimana yang disebutkan pada point 1 (satu) diatas terdiri dari diklat *reskilling* dan diklat *upskilling* pada spesialisasi industri kelapa sawit.
3. Diklat *upskilling* adalah diklat Vokasi Industri yang diselenggarakan Balai Diklat industri Medan bekerjasama dengan industri, atau asosiasi industri, atau pemerintah daerah, atau lembaga pelatihan kerja, atau mitra mitra lainnya, dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja industri di bidang pekerjaan yang baru karena adanya peningkatan jabatan atau adanya promosi jabatan industri.
4. Diklat *reskilling* adalah diklat Vokasi Industri yang diselenggarakan Balai Diklat Industri Medan bekerjasama dengan industri, atau asosiasi industri, atau pemerintah daerah, atau lembaga pelatihan kerja, atau mitra lainnya, dalam rangka pembaharuan kompetensi kerja, baik yang disebabkan karena mutasi pada pekerjaan yang baru, maupun yang disebabkan karena adanya perubahan teknologi produksi di industri.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam rangka pengembangan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten di industri pengolahan kelapa sawit.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri agar mampu memproduksi dengan produktivitas dan daya saing tinggi.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri di industri pengolahan kelapa sawit.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang selanjutnya disebut diklat.

## Pasal 4

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA,
  - a. Menyelenggarakan diklat Vokasi industri yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Balai Diklat Industri Medan;
  - b. Menyusun kurikulum diklat sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku;
  - c. Menyediakan dan menugaskan tenaga instruktur/ pengajar yang kredibel dan relevan dengan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan;
  - d. Memastikan kelayakan tempat uji kompetensi melalui Verifikasi TUK, dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi peserta diklat;
  - e. Menyediakan dan menugaskan asesor untuk melakukan uji kompetensi;
  - f. Menerbitkan Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan dari Kementerian Perindustrian bagi semua peserta diklat dan Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi peserta yang dinyatakan "**kompeten**";
  - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kinerja diklat pasca pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA
  - a. Mengajukan permintaan diklat Vokasi industri sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja industri;
  - b. Melakukan seleksi/ penyaringan calon peserta diklat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;

- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan diklat selama kegiatan tersebut berlangsung;
- d. Menyediakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta yang telah mengikuti diklat;
- e. Menyediakan tempat, sarana dan prasarana diklat serta peralatan pembelajaran;
- f. Menyediakan bantuan transportasi lokal ke lokasi pelaksanaan diklat bagi panitia/instruktur/asesor selama kegiatan diklat berlangsung;

#### Pasal 5

##### LOKASI

Lokasi kegiatan yang tercakup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi wilayah kerja yang disepakati bersama PARA PIHAK.

#### Pasal 6

##### PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kewenangan PARA PIHAK.
2. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakil sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya, dan bertanggungjawab dalam teknis pelaksanaan kegiatan.
3. Setiap Perjanjian Kerjasama memuat Berita Acara Penyerahan Peserta yang telah mengikuti diklat dari Balai Diklat Industri Medan ke PT. Sisirau- PMKS Alur Gantung Aceh Tamiang

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

## Pasal 8

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada DIPA Balai Diklat Industri Medan sesuai anggaran yang tersedia.

## Pasal 9

### KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data, keterangan dan informasi yang bersifat rahasia dan/atau perlu dirahasiakan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Data, keterangan dan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

## Pasal 10

### KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui surat elektronik (*surel/e-mail*) pada alamat berikut:

#### PIHAK PERTAMA:

##### BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN

Alamat : Jl. Medan – Tanjung Morawa / Jl. Damai No. 32  
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan  
Amplas, Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara

Telpon : 061-7865857

e-mail : [diklatindustrimedan@gmail.com](mailto:diklatindustrimedan@gmail.com)

#### PIHAK KEDUA:

##### PT. SISIRAU

Alamat : Desa Sidodadi, Kecamatan Kejuruan Muda,  
Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh

Telpon : 082187471942 (Raja)

e-mail : -

## Pasal 11

### PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 12

PERUBAHAN/ADDENDUM

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk perubahan/addendum.
2. Perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MILL MANAGER

KEPALA

PT. Sisirau - PMKS Alur Gantung

Balai Diklat Industri Medan



**FADLI GUNAWAN**



**CHAIRIL ALMY, ST, M.Si, Ph.D**



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI  
DENGAN  
PT. ARYA RAMA PERSADA**

Nomor : B/80/BPSDMI/BDI-Medan/HK/XI/2025

Nomor : 021/HRD/ARP/XI/2025

### **TENTANG**

**Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri/Tenaga Kerja Industri  
pada Industri Pengolahan Kelapa Sawit Melalui Pelaksanaan  
Diklat Vokasi Industri *Upskilling* Pengoperasian Mesin dan Peralatan  
Produksi pada PMKS Angkatan ke-2**

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Balai Diklat Industri Medan dan PT. Arya Rama Persada Nomor 28/BPSDMI/BDI-Medan/NK/X/2023 tentang pengembangan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dengan jenis diklat *upskilling*, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Chairil Almy, ST, M.Si, Ph.D.  
Jabatan : Kepala Balai Diklat Industri Medan  
Alamat : Jalan Medan - Tg. Morawa KM. 10/Jalan Damai No. 32  
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas,  
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Diklat Industri Medan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Ns. Tengku Ahmad Jajuli  
Jabatan : Senior Manager HRGA & Sustainability PT. Arya Rama  
Persada  
Alamat : Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai,  
Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Arya Rama Persada, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- 1) bahwa PIHAK PERTAMA merupakan satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian RI yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten sesuai permintaan industri;
- 2) bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara;
- 3) bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten di industri pengolahan kelapa sawit, dan;
- 4) bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri ini berdasarkan pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan ikatan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten adalah kegiatan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi industri yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan kerja di industri.
2. Diklat berbasis kompetensi vokasi industri sebagaimana yang disebutkan pada point 1 (satu) diatas terdiri dari diklat *reskilling* dan diklat *upskilling* pada spesialisasi industri pengolahan kelapa sawit.
3. Diklat *upskilling* adalah diklat berbasis kompetensi yang diselenggarakan Balai Diklat industri Medan bekerja sama dengan industri, atau asosiasi industri, atau pemerintah daerah, atau lembaga pelatihan kerja, atau mitra mitra lainnya, dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja industri di bidang pekerjaan yang baru karena adanya peningkatan jabatan atau adanya promosi jabatan industri.

4. Diklat *reskilling* adalah diklat berbasis kompetensi yang diselenggarakan Balai Diklat Industri Medan bekerja sama dengan industri, atau asosiasi industri, atau pemerintah daerah, atau lembaga pelatihan kerja, atau mitra lainnya, dalam rangka pembaharuan kompetensi kerja, baik yang disebabkan karena mutasi pada pekerjaan yang baru, maupun yang disebabkan karena adanya perubahan teknologi produksi di industri.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam rangka pengembangan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten di industri pengolahan kelapa sawit.
2. Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri agar mampu memproduksi dengan produktivitas dan daya saing tinggi.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri di industri pengolahan kelapa sawit.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang selanjutnya disebut diklat.

## Pasal 4

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA,
  - a. Menyelenggarakan diklat vokasi industri yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran BDI Medan;
  - b. Menyusun kurikulum diklat sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku;
  - c. Menyediakan dan menugaskan tenaga instruktur/ pengajar yang kredibel dan relevan dengan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan;
  - d. Memastikan kelayakan tempat uji kompetensi melalui Verifikasi TUK, dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi peserta diklat;
  - e. Menyediakan dan menugaskan asesor untuk melakukan uji kompetensi;
  - f. Menerbitkan Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan dari Kementerian Perindustrian bagi semua peserta diklat dan Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi peserta yang dinyatakan "**kompeten**";

- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kinerja diklat pasca pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

## 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA

- a. Mengajukan permintaan diklat berbasis kompetensi vokasi industri sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja industri;
- b. Melakukan seleksi/ penyaringan calon peserta diklat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan diklat selama kegiatan tersebut berlangsung;
- d. Menyediakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta yang telah mengikuti diklat;
- e. Menyediakan tempat, sarana, dan prasarana diklat serta peralatan pembelajaran;
- f. Menyediakan bantuan transportasi lokal ke lokasi pelaksanaan diklat bagi panitia/instruktur/asesor selama kegiatan diklat berlangsung.

### Pasal 5

#### LOKASI

Lokasi kegiatan yang tercakup dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi wilayah kerja yang disepakati bersama PARA PIHAK.

### Pasal 6

#### PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan berdasarkan kewenangan PARA PIHAK.
2. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakil sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya, dan bertanggungjawab dalam teknis pelaksanaan kegiatan.
3. Setiap Perjanjian Kerja sama memuat Berita Acara Penyerahan Peserta yang telah mengikuti diklat dari Balai Diklat Industri Medan ke PT. Arya Rama Persada.

### Pasal 7

#### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja sama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian

Kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

#### Pasal 8

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada DIPA Balai Diklat Industri Medan, sesuai anggaran yang tersedia.

#### Pasal 9

##### KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data, keterangan, dan informasi yang bersifat rahasia dan/atau perlu dirahasiakan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.
2. Data, keterangan dan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja sama ini telah berakhir.

#### Pasal 10

##### KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui surat elektronik (surel/*e-mail*) pada alamat berikut:

##### PIHAK PERTAMA:

##### BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN

Alamat : Jl. Medan – Tanjung Morawa / Jl. Damai No. 32  
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas,  
Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara  
Telpon : 061-7865857  
e-mail : diklatindustrimedan@gmail.com

##### PIHAK KEDUA:

##### PT. ARYA RAMA PERSADA

Alamat : Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai,  
Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara  
Telpon/Wa : +62 822 6733 3398 (Ns. Tengku Ahmad Jajuli)  
e-mail : -

Pasal 11  
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja sama ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 12  
PERUBAHAN/ADDENDUM

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk perubahan/addendum.
2. Perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

SENIOR MANAGER HRGA &  
SUSTAINABILITY

PT. Arya Rama Persada



**NS. TENGKU AHMAD JAJULI**

PIHAK PERTAMA

KEPALA

Balai Diklat Industri Medan



**CHAIRIL ALMY, ST, M.Si, Ph.D.**

## **PERJANJIAN KERJASAMA**

**BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI  
DENGAN  
PT. SAHABAT SAWIT ROKAN SEJAHTERA – KAB. ROKAN HILIR**

Nomor : B/75/BPSDMI/BDI-Medan/HK/XI/2025

Nomor : 19/SSRS/MOU/XI/2025

### **TENTANG**

**Pengembangan sumber daya manusia industri/tenaga kerja industri  
pada industri pengolahan kelapa sawit melalui pelaksanaan  
Diklat Vokasi Industri Upskilling Pengoperasian Mesin Dan Peralatan  
Produksi Angkatan 1 Pada PMKS Tahun 2025**

Pada hari ini Senin, Sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Gedung Serbaguna PT. Sahabat Sawit Rokan Sejahtera Kabupaten Rokan Hilir- Provinsi Riau, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Balai Diklat Industri Medan dan PT. Sahabat Sawit Rokan Sejahtera Nomor B/70/BPSDMI/BDI-Medan/HK/XI/2025 dan Nomor MO-SSRS/395/1125 tentang pengembangan sumber daya manusia industri/tenaga kerja industri yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Chairil Almy, ST, M.Si  
Jabatan : Kepala Balai Diklat Industri Medan  
Alamat : Jalan Medan - Tg. Morawa KM. 10/Jalan Damai No. 32  
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas,  
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Diklat Industri Medan,  
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Siswaja Muljadi  
Jabatan : Direktur Utama PT. Sahabat Sawit Rokan Sejahtera  
Alamat : Jl. Lintas Medan, KM.1 RT/RW. 01/01, Kepenghuluan  
Sungai Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten  
Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sahabat Sawit Rokan  
Sejahtera, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- 1) bahwa PIHAK PERTAMA merupakan satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian RI yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten sesuai permintaan industri;
- 2) bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit di Provinsi Riau;
- 3) bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten di industri pengolahan kelapa sawit, dan;
- 4) bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri ini berdasarkan pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan ikatan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten adalah kegiatan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3in1
2. yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan kerja di industri.
3. Diklat vokasi industri sebagaimana yang disebutkan pada point 1 (satu) diatas terdiri dari diklat *reskilling* dan diklat *upskilling* pada spesialisasi industri pengolahan kelapa sawit.
4. Diklat *upskilling* adalah diklat vokasi industri yang diselenggarakan Balai Diklat industri Medan bekerjasama dengan industri, atau asosiasi industri, atau pemerintah daerah, atau lembaga pelatihan kerja, atau mitra mitra lainnya, dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja industri di bidang pekerjaan yang baru karena adanya peningkatan jabatan atau adanya promosi jabatan industri.

5. Diklat *reskilling* adalah diklat vokasi industri yang diselenggarakan Balai Diklat Industri Medan bekerjasama dengan industri, atau asosiasi industri, atau pemerintah daerah, atau lembaga pelatihan kerja, atau mitra lainnya, dalam rangka pembaharuan kompetensi kerja, baik yang disebabkan karena mutasi pada pekerjaan yang baru, maupun yang disebabkan karena adanya perubahan teknologi produksi di industri.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam rangka pengembangan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang kompeten di industri pengolahan kelapa sawit.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri agar mampu memproduksi dengan produktivitas dan daya saing tinggi.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri di industri pengolahan kelapa sawit.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri/ tenaga kerja industri yang selanjutnya disebut diklat.

## Pasal 4

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA,
  - a. Menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi dengan sistem 3in1 yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Balai Diklat Industri Medan;
  - b. Menyusun kurikulum diklat sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku;
  - c. Menyediakan dan menugaskan tenaga instruktur/ pengajar yang kredibel dan relevan dengan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan;
  - d. Memastikan kelayakan tempat uji kompetensi melalui Verifikasi TUK, dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi peserta diklat;
  - e. Menyediakan dan menugaskan asesor untuk melakukan uji kompetensi;
  - f. Menerbitkan Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan dari Kementerian Perindustrian bagi semua peserta diklat dan Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi peserta yang dinyatakan "**kompeten**";

- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kinerja diklat pasca pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

## 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA

- a. Mengajukan permintaan diklat vokasi industri sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja industri;
- b. Melakukan seleksi/ penyaringan calon peserta diklat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan diklat selama kegiatan tersebut berlangsung;
- d. Menyediakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta yang telah mengikuti diklat;
- e. Menyediakan tempat, sarana dan prasarana diklat serta peralatan pembelajaran;
- f. Menyediakan bantuan transportasi lokal ke lokasi pelaksanaan diklat bagi panitia/instruktur/asesor selama kegiatan diklat berlangsung;

### Pasal 5

#### LOKASI

Lokasi kegiatan yang tercakup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi wilayah kerja yang disepakati bersama PARA PIHAK.

### Pasal 6

#### PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kewenangan PARA PIHAK.
2. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakil sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya, dan bertanggungjawab dalam teknis pelaksanaan kegiatan.
3. Setiap Perjanjian Kerjasama memuat Berita Acara Penyerahan Peserta yang telah mengikuti diklat dari Balai Diklat Industri Medan ke PT. Sahabat Sawit Rokan Sejahtera.

### Pasal 7

#### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian

Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

#### Pasal 8

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada DIPA Balai Diklat Industri Medan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

#### Pasal 9

#### KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data, keterangan dan informasi yang bersifat rahasia dan/atau perlu dirahasiakan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Data, keterangan dan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

#### Pasal 10

#### KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui surat elektronik (surel/*e-mail*) pada alamat berikut:

#### PIHAK PERTAMA:

##### BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN

Alamat : Jl. Medan – Tanjung Morawa / Jl. Damai No. 32  
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan  
Amplas, Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara  
Telepon : 061-7865857  
e-mail : balaidiklatindustri Medan@gmail.com

#### PIHAK KEDUA:

##### PT. SAHABAT SAWIT ROKAN SEJAHTERA

Alamat : Jl. Lintas Medan, KM.1 RT/RW. 01/01, Kepenghuluan  
Sungai Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten  
Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983

Telepon : +62 853-6479-1103  
e-mail : myulianus@ssrs.co.id

Pasal 11  
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 12  
PERUBAHAN/ADDENDUM

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk perubahan/addendum.
2. Perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA

PT. Sahabat Sawit Rokan Sejahtera



**SISWAJA MULJADI**

PIHAK PERTAMA

KEPALA

Balai Diklat Industri Medan



**CHAIRIL ALMY, ST, M.Si, Ph.D**

Nomor : B/5217/SJ-IND.2/DL/X/2025  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Pelatihan  
Sistem Industri I Tahun 2025

Jakarta, 30 Oktober 2025

Yth.

Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian  
(daftar terlampir)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2014 tentang Pola Karier Pegawai Kementerian Perindustrian, salah satu syarat dalam menduduki jabatan karier muda adalah mengikuti pelatihan Sistem Industri I. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri akan menyelenggarakan 10 (sepuluh) Angkatan Pelatihan Sistem Industri secara klasikal (tatap muka) dengan mengacu pada pembagian jadwal berikut:

Angkatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan (Tahun 2025)		
		Check In	-Pembukaan -Pre-Post Test -Pembelajaran Kelas -Kunjungan Industri	-Presentasi -Penutupan -Check Out
1	BDI Yogyakarta	9 Nov	10 – 14 Nov	15 Nov
2	BDI Denpasar	9 Nov	10 – 14 Nov	15 Nov
3	BDI Jakarta	16 Nov	17 – 21 Nov	22 Nov
4	BDI Jakarta	16 Nov	17 – 21 Nov	22 Nov
5	BDI Yogyakarta	16 Nov	17 – 21 Nov	22 Nov
6	BDI Makassar	16 Nov	17 – 21 Nov	22 Nov
7	BDI Padang	16 Nov	17 – 21 Nov	22 Nov
8	BDI Jakarta	23 Nov	24 – 28 Nov	29 Nov
9	BDI Surabaya	23 Nov	24 – 28 Nov	29 Nov
10	BDI Medan	7 Des	8 – 12 Des	13 Des

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Saudara dapat menugaskan pegawai di lingkungan Unit Kerja Saudara (daftar terlampir pada Lampiran II) untuk mengikuti pelatihan dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan konfirmasi keikutsertaan peserta melalui Nota Dinas kepada Kepala Balai Diklat Industri (sesuai Angkatan pelatihan ybs) dengan Tembusan kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 5 November 2025;
2. Peserta yang tidak disampaikan konfirmasi keikutsertaannya sampai batas yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri;
3. Selama pelatihan berlangsung, peserta mengenakan pakaian Batik;
4. Peserta disediakan tempat menginap di Balai Diklat Industri sesuai lokasi pelaksanaan pelatihan. Bagi peserta yang menginap diharapkan *check in* mulai hari Minggu, dikarenakan agenda pembukaan pada hari pertama pelatihan akan dimulai jam 08.00 sesuai zona waktu di lokasi pelaksanaan masing-masing. Mohon menyampaikan konfirmasi menginap/tidak dalam Nota Dinas konfirmasi;
5. Penyelenggara menanggung akomodasi dan konsumsi peserta serta uang harian pelatihan (6 hari), sedangkan biaya transportasi PP (Pulang–Pergi) ditanggung oleh Unit Kerja asal peserta;
6. Konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung sesuai pembagian Tempat Pelaksanaan Pelatihan sebagai berikut:  
BDI Jakarta: Mochamad Ridwansyah (081214489488)  
BDI Medan: Indra Oloan Nainggolan (08126573315)  
BDI Padang: Sri Mulyati (08126757084)  
BDI Yogyakarta: Panji Wishnumurti (08562871763)  
BDI Surabaya: Evi Septiana Pane (08563042636)  
BDI Denpasar: Afif Rido Herlambang (085741065257)  
BDI Makassar: Fitra Ariansyah (081354948464)

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi, SDM dan  
Reformasi Birokrasi,



Feby Setyo Hariyono

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
3. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan
4. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Lampiran I Surat Kepala Biro Organisasi, SDM  
dan Reformasi Birokrasi

Nomor : B/5217/SJ-IND.2/DL/X/2025

Tanggal : 30 Oktober 2025

Yth.

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
2. Kepala Biro Keuangan
3. Kepala Biro Perencanaan
4. Kepala Biro Umum
5. Kepala Pusat Data dan Informasi
6. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
7. Kepala Pusat Industri Halal
8. Inspektur I
9. Inspektur IV
10. Inspektorat Investigasi
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro
12. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
13. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
14. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
15. Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka
17. Direktur Industri Aneka
18. Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan
19. Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut
20. Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan
21. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
22. Direktur Industri Kimia Hulu
23. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi
24. Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam
25. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki
26. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
27. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
28. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
29. Direktur Industri Elektronika dan Telematika
30. Direktur Industri Logam
31. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional
32. Direktur Akses Industri Internasional
33. Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional
34. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri
35. Direktur Perwilayahan Industri
36. Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

37. Kepala Pusat Industri Hijau
38. Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri
39. Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri
40. Kepala Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
41. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
42. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri
43. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri
44. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro
45. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik
46. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik
47. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim
48. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik
49. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
50. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan
51. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin
52. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa
53. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil
54. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri
55. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia
56. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon
57. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung
58. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru
59. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta
60. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado
61. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan
62. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang
63. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang
64. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru
65. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya
66. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak
67. Kepala Balai Diklat Industri Denpasar
68. Kepala Balai Diklat Industri Jakarta
69. Kepala Balai Diklat Industri Makassar
70. Kepala Balai Diklat Industri Padang
71. Kepala Balai Diklat Industri Surabaya
72. Kepala Balai Diklat Industri Medan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

73. Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta
74. Direktur Politeknik AKA Bogor
75. Direktur Politeknik APP Jakarta
76. Direktur Politeknik ATI Makassar
77. Direktur Politeknik ATI Padang
78. Direktur Politeknik ATK Yogyakarta
79. Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal
80. Direktur Politeknik Industri Logam Morowali
81. Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten
82. Direktur Politeknik STMI Jakarta
83. Direktur Politeknik STTT Bandung
84. Direktur Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
85. Direktur Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng
86. Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta
87. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor
88. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar
89. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh
90. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung
91. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang
92. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak
93. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta

Lampiran II Surat Kepala Biro Organisasi,  
SDM dan Reformasi Birokrasi

Nomor : B/5217/SJ-IND.2/DL/X/2025

Tanggal : 30 Oktober 2025

### DAFTAR CALON PESERTA DIKLAT SISTEM INDUSTRI

Angkatan : 1  
Tempat Pelaksanaan : BDI Yogyakarta  
Tanggal Pelaksanaan : 10 – 15 November 2025

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	198508042009112001	Rahma Mardiana Widiaswanti	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pembina Industri Ahli Muda
2	198603202009111003	Taufiq	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pembina Industri Ahli Muda
3	199310032018012002	Gita Asapuri	Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4	197712152008032002	Pinke Arfianti Dwihapsari	Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Pembina Industri Ahli Muda
5	198903072014022001	Ratna Ningsih	Balai Diklat Industri Yogyakarta	Pembina Industri Ahli Muda
6	197303252007011002	Edi Subagya	Politeknik ATK Yogyakarta	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
7	197809242008041001	Irfan	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
8	198509132009111001	Irvando Anto Verry Damanik	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
9	198304132010121001	Purnawan Nugroho	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
10	197304231994031002	Sarip Hidayat	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
11	197802082002121003	Sony Harbintoro	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
12	198006152003121002	Haris Nur Salam	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Pembina Industri Ahli Muda
13	197911122008032001	Ihda Novia Indrajati	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Pembina Industri Ahli Muda
14	198311092009112001	Dini Noor Hidayah	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Pembina Industri Ahli Pertama
15	198602122010122002	Alhygora Anggarani Febryana	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Pembina Industri Ahli Pertama
16	199105162022021001	Bayu Setiawan Arif Nugraha	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Pembina Industri Ahli Pertama
17	199201112018011002	Hafiedza Pradana Rakasiwi	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Pembina Industri Ahli Pertama
18	198411122010122001	Nova Retnawati	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Pembina Industri Ahli Muda
19	197804092002122001	Istihanah Nurul Eskani	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Pembina Industri Ahli Muda
20	198504152009111001	Muhammad Aji Wibowo	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Pembina Industri Ahli Pertama
21	198211242010121001	Yudi Satria	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Pembina Industri Ahli Pertama
22	199008132018012002	Tin Kusuma Arta	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Pembina Industri Ahli Pertama
23	198903192014022001	Rini Rarasati	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Muda
24	198704052009111001	Misbakhul Anam	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Muda
25	198609072006041001	Agastya Aji Pranayoga	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Muda

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
26	197912312008031003	Nur Zen	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Muda
27	199203282022021001	Sidqi Ahmad	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Pertama
28	199210112022021001	Abinubli Tariswafi Mawarid	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Pertama
29	199607172022021001	Nur Hamid	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Pertama
30	199702172022021001	Charis Achmad Tajuddin	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Pertama

Angkatan : 2  
Tempat Pelaksanaan : BDI Denpasar  
Tanggal Pelaksanaan : 10 – 15 November 2025

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	198706012010121003	Danang Krisna Yudha	Biro Perencanaan	Pembina Industri Ahli Muda
2	198709222014022001	Arini Ansyelika Pangaribuan	Biro Perencanaan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3	198402292009012003	Sry Rahayu Febriani	Biro Hubungan Masyarakat	Kepala Subbagian Tata Usaha
4	198808182015022001	Hakiki Nurmajesty	Biro Hubungan Masyarakat	Pembina Industri Ahli Muda
5	199302012019012001	Anindya Putri Pangriptaloka	Biro Umum	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Menteri
6	199703152019011001	Faisal Ammar	Biro Umum	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal
7	198709192010121001	Risky Dwi Cahyawan	Biro Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
8	198111292009111001	Novreza Utama Putra	Pusat Industri Halal	Pembina Industri Ahli Muda
9	199407302022021001	Abdul Aziz	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama
10	199410252022022001	Zanas Alaghfas	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama
11	198402252010012015	Puspita Renaning Tyas	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Pembina Industri Ahli Muda
12	197510252009101001	Heri Murjiono	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
13	198107242008042002	Enti Nurmaryati Utami	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	Pembina Industri Ahli Muda
14	198602032009112001	Sukma Paramita Dewi	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Pembina Industri Ahli Muda
15	198905122014021001	Pranandang Adi Laksana	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Pembina Industri Ahli Muda
16	199004282015021001	Iman Azharyadi	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Pembina Industri Ahli Muda
17	198801292014022001	Astrid	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Pembina Industri Ahli Muda
18	197711282005022001	Novida Kurniasih	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Pembina Industri Ahli Muda
19	198610122009112001	Pratiwi Dasaningtias Chondro	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Pembina Industri Ahli Muda
20	198809112010121003	Abdillah Enstein	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika	Pembina Industri Ahli Muda
21	198705182010122005	Rani Yudhiastari	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika	Pembina Industri Ahli Muda
22	198410192009112001	Norma Budiman	Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Pembina Industri Ahli Muda
23	199012102014021001	Boy Steven Silalahi	Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Pembina Industri Ahli Muda

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
24	198208032009111002	Bob Royant Wijaya	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	Pembina Industri Ahli Muda
25	198806122014021001	Wismoyo Hariri	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
26	199010292014022001	Zettira Amalia Zainudin	Direktorat Perwilayahan Industri	Pembina Industri Ahli Muda
27	199104182014022001	Elvira Silviani Putri Siswoyo	Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Pembina Industri Ahli Muda
28	197909302009011008	Eko Priyo Purnomo	Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Pembina Industri Ahli Muda
29	198704092010121001	Made Dwi Putra Wijaya	Balai Diklat Industri Denpasar	Pembina Industri Ahli Muda
30	198910062018011001	Shidiq Abdurrahman M	Balai Diklat Industri Denpasar	Pembina Industri Ahli Pertama

Angkatan : 3  
Tempat Pelaksanaan : BDI Jakarta  
Tanggal Pelaksanaan : 17 - 22 November 2025

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	199005182014022002	Bunga Anum Putriaji	Biro Keuangan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2	198402232010012001	Yurima Febiany Jusri	Biro Hubungan Masyarakat	Pembina Industri Ahli Muda
3	198904242014021001	Hari Ramadhan	Pusat Data dan Informasi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4	198703242014021001	Sondhy Kamesworo	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pembina Industri Ahli Muda
5	199103272015022003	Dessy Lusyana Br Lubis	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pembina Industri Ahli Muda

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
6	198405132009012004	Siti Chasanah	Pusat Industri Halal	Pembina Industri Ahli Muda
7	198608202010121002	Aditya Andika Wicaksono	Pusat Industri Halal	Pembina Industri Ahli Muda
8	198904192014021001	Arief Aditriandi Mohsin	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro	Pembina Industri Ahli Muda
9	198803082014021001	M. Ihsan Saputra	Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Pembina Industri Ahli Muda
10	199207172018011001	Afdhal	Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
11	199606302019011001	Tommy Kagin Barus	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
12	198404042009112001	Ita Kurnia Sholihah	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	Pembina Industri Ahli Muda
13	198501302010121002	Hamid Rizali Siregar	Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Pembina Industri Ahli Muda
14	198505262010121001	Rivano Pollax Rantung	Direktorat Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan	Pembina Industri Ahli Muda
15	199206042015022001	Soraya Ayu Chumaira	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Pembina Industri Ahli Muda
16	198707132010121002	Muhamad Dwi Purbo Kuncoro	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Muda
17	198211192009112001	Gunarsih	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
18	198312162009112001	Aisha Miladia Pramudawardani	Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki	Pembina Industri Ahli Muda
19	198504282009111002	Rudy Wahyu Apriyanto	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Pembina Industri Ahli Muda
20	198406012009111001	Welldy	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Pembina Industri Ahli Muda
21	199012132014022001	Priska Windayani	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Pembina Industri Ahli Muda

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
22	198305162008031002	Antonius Fernando	Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Pembina Industri Ahli Muda
23	198407242009111001	Isman Anshori	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	Pembina Industri Ahli Muda
24	198507272008031001	Ari Yulianto	Politeknik APP Jakarta	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
25	199012202014021001	Yoga Pratama	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
26	198410182009111001	Okta Fajar Gunawan	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
27	197911152008111001	Riki Rizki	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
28	198012232009101001	Iskandar	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
29	197809042009101001	Ngainun Ibnu Setiawan	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
30	198012212009101002	Supriyadi	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda

Angkatan : 4  
Tempat Pelaksanaan : BDI Jakarta  
Tanggal Pelaksanaan : 17 - 22 November 2025

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	198604152009111001	Murboyudo Joyosuyono	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Muda
2	200001062022021001	Hansel Millen Santosa	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama
3	200004282022022003	Mutiara Tri Wahyuni	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
4	198509102010122003	Ceci Hani Handayani	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Pembina Industri Ahli Muda
5	199801152022021002	Daffa Rifqi Pratama	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Pembina Industri Ahli Pertama
6	198803202020121001	Muhammad Reza Pahlevi	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Pembina Industri Ahli Pertama
7	198809162015021001	Muhammad Syahlendra M.W	Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
8	198409212009011003	Priyanto Setiawan	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Pembina Industri Ahli Muda
9	198310262009012005	Bunga Layung Sari	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Pembina Industri Ahli Muda
10	198903252010122001	Noor Fitri Maryani	Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Pembina Industri Ahli Muda
11	199101042019011001	Rensyaputra Dinan Pranata	Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
12	198301212010121002	Sungkono	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	Pembina Industri Ahli Muda
13	198104032009011005	Burhanudin	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
14	198601302009111001	Pratama Rizqi Ariawan	Direktorat Industri Logam	Pembina Industri Ahli Muda
15	198706012010121004	Fajar Budi Satriyo	Direktorat Industri Logam	Pembina Industri Ahli Muda
16	197310272005021001	Arief Riyanto	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	Pembina Industri Ahli Muda
17	198408142010122001	Dewi Fatimah	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	Pembina Industri Ahli Muda
18	198512302010122002	Rhoito Frista Silitonga	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	Pembina Industri Ahli Muda
19	199112212015022001	Herlina Damayanti	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	Pembina Industri Ahli Muda

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
20	197806032002122004	Rr. Srie Gustiani	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	Pembina Industri Ahli Muda
21	197906042002122003	Emma Yuniar Rakhmatiara	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	Pembina Industri Ahli Muda
22	198404092009012010	Cica Kasipah	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	Pembina Industri Ahli Muda
23	197405232007012002	Greida Frista	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
24	198405062009011006	Gunadi Katon	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
25	198409042009011010	Hasanudin	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
26	198010032008032002	Devi Oktiani	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	Pembina Industri Ahli Muda
27	198609282009111001	Karim Abdullah	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
28	198310072010121001	Rizki Adrianto	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	Pembina Industri Ahli Muda
29	198412062010121001	Hamdani Ridwan	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
30	198106182007011002	Yuni Dwi Kurniawan	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Angkatan : 5  
Tempat Pelaksanaan : BDI Yogyakarta  
Tanggal Pelaksanaan : 17 - 22 November 2025

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	198611242014021001	Arthur Sopar	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pembina Industri Ahli Muda

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
2	198711092014021001	Cecep Saepul Rahman	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	Pembina Industri Ahli Muda
3	198305142009011010	Uki Krisnawan	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Muda
4	198804162019011001	Slamet Budiyanto	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5	198505302009012002	Dona Rahmawati	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Pembina Industri Ahli Muda
6	198308062009111001	Eko Sulistiyo Wibowo	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Pembina Industri Ahli Muda
7	198604042010122001	Titis Wahyu Utami	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Pembina Industri Ahli Pertama
8	197901142006041002	Sugeng Supardal	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Pembina Industri Ahli Pertama
9	198611062015022001	Umi Reza Lestari	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Pembina Industri Ahli Pertama
10	199808232022022001	Ara Delaniera Wiharto	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Pembina Industri Ahli Pertama
11	197811012009011004	Agung Eko Sucahyono	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Pembina Industri Ahli Muda
12	198412092009011002	Demas YogoPranoto	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Pembina Industri Ahli Muda
13	198711212010122001	Mutiara Triwiswara	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Pembina Industri Ahli Muda
14	199009292014021001	I Made Arya Utamaningrat	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Pembina Industri Ahli Pertama
15	198202252008042002	Farida Crisnaningtyas	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Muda
16	198106012009011009	Adi Prasetyo	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Muda
17	198701012009111001	Januar Arif Fatkhurrahman	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Muda

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
18	198208032009111003	Agus Purwanto	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Muda
19	199706022022021001	Erwin Setya Kurniawan	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Pertama
20	199706162022021001	Surya Aji Prassetya	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Pertama
21	198506242010121002	Sanyoto Widagdo	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Pertama
22	198905282018022001	Karlina Noordiningsih	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Pembina Industri Ahli Pertama
23	199001312015022001	Widha Dintariana	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	Pembina Industri Ahli Muda
24	198402222008042003	Tristania Pranasari	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	Pembina Industri Ahli Muda
25	197210271994032004	Frida Suteki	Balai Diklat Industri Yogyakarta	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
26	199108312014022001	Cynthia Puji Astuti	Balai Diklat Industri Yogyakarta	Pembina Industri Ahli Muda
27	198503272018011001	Rido Kurnianto	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
28	199011122014021001	Moh. Mustakim Fauzan	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
29	199209272019011001	Sepbian Mahardhika Nusantoro	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
30	196710011990031002	Sutrisno	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Angkatan : 6  
Tempat Pelaksanaan : BDI Makassar  
Tanggal Pelaksanaan : 17 - 22 November 2025

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	198208192009112001	Naili Sofiyaningsih	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	Pembina Industri Ahli Muda
2	198911052014022003	Rizka Tri Wardhani	Pusat Industri Hijau	Pembina Industri Ahli Muda
3	198604082010122002	Hapsari Pradana Iswari	Pusat Industri Hijau	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4	198108182005022001	Andalia Gustari	Pusat Industri Hijau	Pembina Industri Ahli Muda
5	198412312010121002	Manda Pratomo	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	Pembina Industri Ahli Muda
6	198507292010121003	Dwi Yulianto	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	Pembina Industri Ahli Muda
7	198404152010121003	Afrizal Amir	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	Pembina Industri Ahli Muda
8	197310032002122001	Wahyuni	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	Pembina Industri Ahli Muda
9	198408102003121005	Ardiansyah	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	Pembina Industri Ahli Muda
10	197906032011011005	Wiyanto Phillipus Tangkin	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	Pembina Industri Ahli Muda
11	199005192014022001	Andi Nur Amalia A	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	Pembina Industri Ahli Muda
12	198704212014022001	Shinta Wahyu Apriyani	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	Pembina Industri Ahli Muda
13	199006282019011001	Yanto Karaseran	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
14	199009182014021001	Ardi Kurniawan Makalalag	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	Pembina Industri Ahli Muda
15	197505152002121005	Frelly Reinold Marselino Kaunang	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	Pembina Industri Ahli Muda
16	197902062006042001	Sjamsiwarni Reny Sjarif	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	Pembina Industri Ahli Muda
17	198004252009012004	Ivone Ohoitimur	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
18	197209052002122001	Marni Kaimudin	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	Pembina Industri Ahli Muda
19	197606252003122005	Joice Patrecia Margaretha Kolanus	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	Pembina Industri Ahli Muda
20	197607052005021004	Sumarsana	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	Pembina Industri Ahli Muda
21	198112152008031002	Sugeng Hadi Noto	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	Pembina Industri Ahli Muda
22	197207132005021002	Edward Julys Dompeipen	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	Pembina Industri Ahli Muda
23	199303312019011001	Angga Rendra Saputra	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
24	197502102003121006	Sutan Sinar Situmorang	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	Pembina Industri Ahli Muda
25	198212162009112001	Dwihandayani	Balai Diklat Industri Makassar	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
26	198702192019011001	Kusnadi Abdillah	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
27	198006022008031003	Yuriadi	Politeknik ATI Makassar	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
28	198406202010121002	Hendriko Rajagukguk	Politeknik Industri Logam Morowali	Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
29	197107182002121002	Muhammad Rusli Djalil	Politeknik Industri Logam Morowali	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
30	197912252006041002	Zainal Abidin M	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Angkatan : 7  
Tempat Pelaksanaan : BDI Padang  
Tanggal Pelaksanaan : 17 - 22 November 2025

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	198506162009111001	Davitra Fajar Maulana	Biro Umum	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus
2	198504262009111002	Sony Afriyanto	Biro Umum	Kepala Subbagian Protokol
3	197901252005021001	Silvano Armada A.	Biro Umum	Pembina Industri Ahli Muda
4	198603292010121001	Minang Ichsan Saridam	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	Pembina Industri Ahli Muda
5	198810222014021001	Ardi Pratama	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Pembina Industri Ahli Muda
6	198311032010121001	Antonius Khonan Galing Gumilang	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Pembina Industri Ahli Muda
7	198805172014022002	Supartika	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Pembina Industri Ahli Muda
8	198306232011011001	M. Dinul Kholis	Direktorat Industri Aneka	Kepala Subbagian Tata Usaha
9	198501212009112001	Lia Puji Lestari	Direktorat Industri Aneka	Pembina Industri Ahli Muda
10	198805312014022001	Meita Triana Indah Puri	Direktorat Industri Aneka	Pembina Industri Ahli Muda

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
11	198203202009011009	Dudi Sentana Iskandar	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	Pembina Industri Ahli Muda
12	198303172009111001	I Gusti Ngurah Agung A.W.N	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Pembina Industri Ahli Muda
13	198305262010122005	Parentina Meinawaty	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
14	196810251993032001	Wilsa Hermianti	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
15	197206071993031003	Ahmad Susanto	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	Pembina Industri Ahli Muda
16	198302052010121002	Tony Setiawan	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	Pembina Industri Ahli Muda
17	198212092010121001	Rizal Fahrurroji	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	Pembina Industri Ahli Muda
18	198412142015022001	Sri Eva Maya Sari	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	Pembina Industri Ahli Muda
19	198501142009012003	Titi Rachmawati	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	Pembina Industri Ahli Muda
20	198305162009111001	Mas'ud Adhi Saputra	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	Pembina Industri Ahli Muda
21	198908122015021001	Udhik Pandu Tunggal Rahargo	Balai Diklat Industri Jakarta	Pembina Industri
22	197212051994032004	Nilla Diana	Balai Diklat Industri Padang	Pembina Industri Ahli Muda
23	198512162010121002	Imran Nazar	Politeknik ATI Padang	Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama
24	198101162009102001	Roswita	Politeknik ATI Padang	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
25	198312032005021001	Samsudin	Politeknik STMI Jakarta	Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
26	198507222009112001	Choiriah	Politeknik STMI Jakarta	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
27	197606032005012007	Herny Lina	Politeknik STTT Bandung	Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama
28	198210272009012009	Ima Helmi Wihyani	Politeknik STTT Bandung	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
29	198205172009011009	Joko Rahadi Slamet	Politeknik APP Jakarta	Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama
30	198909042014021001	Haris Seprianto	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Angkatan : 8  
Tempat Pelaksanaan : BDI Jakarta  
Tanggal Pelaksanaan : 24 – 29 November 2025

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	198611062022021001	Miftahurohman	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Pembina Industri Ahli Pertama
2	198802242022021001	Wahyu Arie Wibowo Siaroto	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Pembina Industri Ahli Pertama
3	198310142009011004	Deni Cahyadi	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pembina Industri Ahli Muda
4	199005242014021001	Gery Andhika	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kepala Subbagian Tata Usaha
5	197905122003121003	Mohammad Rifky Kenedy	Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Pembina Industri Ahli Muda
6	198312182009112001	RR Setyo Tulousia Ibnusantosa	Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Pembina Industri Ahli Muda

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
7	198902282014021001	Bayang Dwi Kusumadito	Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Pembina Industri Ahli Muda
8	198603092014021001	Roni Toga Perdana	Direktorat Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
9	198103312008032001	Rizke Anggarani	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Pembina Industri Ahli Muda
10	198611282015022001	Nunsi Bella Pranatiwi	Direktorat Industri Kimia Hulu	Pembina Industri Ahli Muda
11	198312102010121004	Andreas Alfredo Sigalingging	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	Pembina Industri Ahli Muda
12	198608122009112001	Juwita Puteri Nuraisyah	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika	Pembina Industri Ahli Muda
13	199207242015022001	Yulianita Latifah	Direktorat Industri Logam	Pembina Industri Ahli Muda
14	198112282008031002	Candra Bachtiyar	Direktorat Industri Logam	Pembina Industri Ahli Muda
15	198408172009011012	Ginangjar Mardhikatama	Direktorat Industri Logam	Pembina Industri Ahli Muda
16	199803182022022001	Irvanida Syazwaniyya Maudya Ihsani	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama
17	199812202022022001	Yolanda Natalia	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama
18	200001042022022002	Prinsislamsheeny Brilliantidiany Ebelarastra	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama
19	198305062009111001	Arif Wibi Sana	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	Pembina Industri Ahli Muda
20	198110032009111001	Rudi Burnama	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	Pembina Industri Ahli Muda
21	198707012010122002	Rizka Yulina	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	Pembina Industri Ahli Muda
22	199010192015021001	Arief Rakhman	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	Pembina Industri Ahli Muda

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
23	198006052005021001	Husen Taufiq	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
24	197704232006042020	Eva Afrilinda	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Pembina Industri Ahli Muda
25	198204272003122005	Erna Susilawati	Politeknik AKA Bogor	Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama
26	199306042018011002	Ridho Befandri	Politeknik AKA Bogor	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
27	196903032008111001	Ugih Sugia	Politeknik Industri Petrokimia Banten	Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama
28	197803022001122003	Evi Maryati	Politeknik Industri Petrokimia Banten	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
29	197009222003122001	Susi Heryani	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	Pembina Industri Ahli Muda
30	197803192003122002	Amelia Sari	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	Pembina Industri Ahli Muda

Angkatan : 9  
Tempat Pelaksanaan : BDI Surabaya  
Tanggal Pelaksanaan : 24 – 29 November 2025

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	199504132020121005	Helmy Mubarak	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama
2	199506102022021002	Ardi Kelana Putra	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama
3	198607152014022001	Yuli Puspita Sari	Direktorat Industri Kimia Hulu	Pembina Industri Ahli Muda

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
4	199210022019012001	Avia Enggar Tyasti	Direktorat Industri Kimia Hulu	Pembina Industri Ahli Muda
5	199201262015022001	Adinda Nurussakinah	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Pembina Industri Ahli Muda
6	198305012010121003	Angga Walesa Yudha	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Pembina Industri Ahli Muda
7	198207182008111001	Taufiq Hidayat	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	Pembina Industri Ahli Muda
8	198801232014021001	Bondan Sutiarmo	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	Pembina Industri Ahli Muda
9	198207242008031002	Dimas Kusumaatmadja	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	Pembina Industri Ahli Muda
10	198701032015022002	Nina Nurmawati	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Pembina Industri Ahli Muda
11	199105142018012002	Nur Maimunita Fitriah	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
12	198802072014021001	Dian Amru Damanik	Direktorat Akses Industri Internasional	Pembina Industri Ahli Muda
13	198605222009111001	Mahammad Khadafi	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Pembina Industri Ahli Muda
14	199309192018012002	Omega Yashinta Loka	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
15	197910212003121002	Yossy Okta Angga Ryananta	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
16	198706112010122003	Farida Indri Rachmawati	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	Pembina Industri Ahli Muda
17	198812012014021001	Masmulki Daniro Jyoti	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	Pembina Industri Ahli Muda
18	197312242002121005	Mangatas Siregar	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	Pembina Industri Ahli Muda
19	199008122019011001	Muhammad Khairul Dzakirin	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
20	198512222009012006	Nurhidayati	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	Pembina Industri Ahli Muda
21	197602202002121006	Anhar Firdaus	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	Pembina Industri Ahli Muda
22	197606062002121007	Farid Salahudin	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
23	196908312002121001	Agus Sri Mulyono	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	Pembina Industri Ahli Muda
24	198108132006041004	Pramono Putro Utomo	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	Pembina Industri Ahli Muda
25	198304152009112001	Ariantini	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	Pembina Industri Ahli Muda
26	198801132015022001	Irmaduta Fahmiari	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	Pembina Industri Ahli Muda
27	198412232009112001	Desiana Trisnati	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	Pembina Industri Ahli Muda
28	198610012009112001	Linda Fitriani	Balai Diklat Industri Surabaya	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
29	199005012014021001	Abdul Rasyid Musthafa Nasution	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
30	199610232019012002	Farichatus Syarifah	Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	Pembina Industri Ahli Pertama

Angkatan : 10  
Tempat Pelaksanaan : BDI Medan  
Tanggal Pelaksanaan : 8 - 13 Desember 2025

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	198203032010011024	Ratno Adi Hartanto	Inspektorat I	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
2	198011132009111001	Zuan Andri Wijayanto	Inspektorat IV	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3	199004212014022001	Ira Sukmayanti	Inspektorat Investigasi	Kepala Subbagian Tata Usaha
4	198204192009111001	Rahadi Sri Rahmanto	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Pembina Industri Ahli Muda
5	198408032009101001	Agust Supriyadi	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Pembina Industri Ahli Muda
6	198805102015022001	Anita Kumala Sari	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Pembina Industri Ahli Muda
7	198605042008032003	Maria Ulfah	Direktorat Akses Industri Internasional	Pembina Industri Ahli Muda
8	199001242014022001	Dwi Duma Christina Rina	Direktorat Akses Industri Internasional	Pembina Industri Ahli Muda
9	198803092010122003	Dita Endah Khumalasari	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Pembina Industri Ahli Muda
10	198604292014022001	Saida Rahmawati BS	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Pembina Industri Ahli Muda
11	197311152007012002	Pastiah	Direktorat Perwilayahan Industri	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
12	198603252010122002	Rizki Triana Putri	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika	Pembina Industri Ahli Muda
13	198610062009112001	Lina Astuti	Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Pembina Industri Ahli Muda
14	198503062015021001	Patia Jungjungan Monangdo	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	Pembina Industri Ahli Muda
15	199605082022021002	David Gresando	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama
16	199704052022022001	Amelina Dewi	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama
17	199705222022022002	Meisy Radhista	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

No	NIP	Nama	Unit Kerja	Jabatan
18	199709222022022003	Shabrina Sekar Tresnannisa	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Pembina Industri Ahli Pertama
19	198306232010121006	Agus Juniawan Khairi	Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Pembina Industri Ahli Muda
20	198303152008041001	Martin Doloksaribu	Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Pembina Industri Ahli Muda
21	199008182014021001	Agustinus Cook Siallagan	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	Pembina Industri Ahli Muda
22	198907292014021001	Adityo Murdiarto	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	Pembina Industri Ahli Muda
23	198708052010122002	Syarifa Arum Kusumastuti	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	Pembina Industri Ahli Muda
24	198904252015021001	Aidil Kurniawan	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
25	196903252002121003	Edwin Harianto Sipahutar	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	Pembina Industri Ahli Muda
26	198204262009011006	Yufriza Wannur Azah	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	Pembina Industri Ahli Muda
27	198212112006041003	Vetrio Monandes	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	Pembina Industri Ahli Muda
28	198506192014021002	Irfan Rusmar	Balai Diklat Industri Medan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
29	197010102006042030	Mahyana	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
30	197504162006041002	Mulyadi	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi : 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja : 579340 BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 1 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>7,721,786,000</b>	<b>0</b>	<b>6,617,842,704</b>	<b>1,090,579,918</b>	<b>7,708,422,622</b>	<b>99.83 %</b>	<b>13,363,378</b>
DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1,128,000,000	0	641,711,918	483,201,209	1,124,913,127	99.73 %	3,086,873
DL.4957 Pelatihan Vokasi Industri	1,128,000,000	0	641,711,918	483,201,209	1,124,913,127	99.73 %	3,086,873
FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	40,000,000	0	37,627,290	2,200,000	39,827,290	99.57 %	172,710
FAI.001 Dokumen Pendidikan Non Formal Industri Berbasis Kompetensi	40,000,000	0	37,627,290	2,200,000	39,827,290	99.57 %	172,710
052 Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan Non Formal dengan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Lembaga Non-Pendidikan	40,000,000	0	37,627,290	2,200,000	39,827,290	99.57 %	172,710
052.OA Penyusunan Program Kurikulum Diklat 3 In 1 Bidang Pengelesan, Barista	13,225,000	0	13,225,000	0	13,225,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,465,000	0	3,465,000	0	3,465,000	100.00	0
000019. Spanduk (1 Unit)	165,000	0	165,000	0	165,000	100.00	0
000242. Makan Konsumsi Diklat (Sumatera Utara)	2,280,000	0	2,280,000	0	2,280,000	100.00	0
000243. Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000	100.00	0
000026. Narasumber (6 OR X 8 OJ)	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00	0
000029. Transport peserta	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00	0
052.OB Recognition Current Competencies (RCC) Asesor BDI Medan	26,775,000	0	24,402,290	2,200,000	26,602,290	99.35 %	172,710
521211 Belanja Bahan	4,793,000	0	4,627,200	124,000	4,751,200	99.13 %	41,800
000275. Spanduk	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000276. Konsumsi Makan Peserta, Panitia, Narasumber, Penguji	3,000,000	0	2,962,000	0	2,962,000	98.73 %	38,000
000277. Konsumsi Makan Peserta, Panitia, Narasumber, Penguji	876,000	0	876,000	0	876,000	100.00	0
000340. Kertas A4 Penyusunan Dokumen RCC	459,000	0	455,600	0	455,600	99.26 %	3,400
000341. Pencetakan Bahan Uji Kompetensi	184,000	0	183,600	0	183,600	99.78 %	400
000398. Pencetakan dan Penjilitan Laporan	124,000	0	0	124,000	124,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0
000278. Narasumber	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi : 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja : 579340 BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 2 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000279. Penguji	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,182,000	0	8,975,090	2,076,000	11,051,090	98.83 %	130,910
000280. Transport Narasumber dan Penguji	8,976,000	0	8,975,090	0	8,975,090	99.99 %	910
000281. Uang Harian	740,000	0	0	610,000	610,000	82.43 %	130,000
000283. Hotel	1,466,000	0	0	1,466,000	1,466,000	100.00	0
<b>QDJ Fasilitas dan Pembinaan Start Up</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>89,263,289</b>	<b>10,608,000</b>	<b>99,871,289</b>	<b>99.87 %</b>	<b>128,711</b>
<b>QDJ.001 Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>89,263,289</b>	<b>10,608,000</b>	<b>99,871,289</b>	<b>99.87 %</b>	<b>128,711</b>
<b>051 Menyelenggarakan Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>89,263,289</b>	<b>10,608,000</b>	<b>99,871,289</b>	<b>99.87 %</b>	<b>128,711</b>
051.0A Inkubator Bisinis	100,000,000	0	89,263,289	10,608,000	99,871,289	99.87 %	128,711
521211 Belanja Bahan	58,992,000	0	55,185,369	3,760,000	58,945,369	99.92 %	46,631
000033. Perlengkapan Peserta (8 OR)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000035. Spanduk ( 1 Unit)	260,000	0	260,000	0	260,000	100.00	0
000036. Penjilitan Laporan dan Pencetakan Juknis (2 Laporan)	748,000	0	8,000	740,000	748,000	100.00	0
000037. Belanja Bahan Praktek (3 Tahap)	39,968,000	0	39,964,419	0	39,964,419	99.99 %	3,581
000038. Konsumsi Makan Peserta,Validator, Klasikal I-III Validasi Produk	10,944,000	0	10,920,000	0	10,920,000	99.78 %	24,000
000039. Konsumsi Makan Peserta,Validator, Klasikal I-III Validasi Produk	1,751,000	0	1,736,000	0	1,736,000	99.14 %	15,000
000284. Souvenir Pameran	396,000	0	394,450	0	394,450	99.61 %	1,550
000285. Souvenir Pelepasan/ Celemek ( 4 Unit)	620,000	0	617,500	0	617,500	99.60 %	2,500
000332. Banner tenant 2025	85,000	0	85,000	0	85,000	100.00	0
000411. Belanja Bahan Praktek	3,020,000	0	0	3,020,000	3,020,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
000337. Biaya Sewa Tempat Pameran	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	12,800,000	0	12,800,000	0	12,800,000	100.00	0
000044. Honor Nasumber dan Coaching	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00	0
000046. Honor Narasumber dan Coaching dan Validator	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	100.00	0
000048. Honor Narasumber dan Coaching Dan Validator	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi : 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja : 579340 BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 3 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191 Belanja Jasa Lainnya	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000	100.00	0
000339. Uji Proksimat	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,222,000	0	0	5,148,000	5,148,000	98.58 %	74,000
000400. SPPD Monev Inkubis	5,222,000	0	0	5,148,000	5,148,000	98.58 %	74,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,406,000	0	18,697,920	1,700,000	20,397,920	99.96 %	8,080
000049. Transport Tenant	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
000050. Uang Harian Verifikasi Tenat dan Narsum	4,888,000	0	4,880,000	0	4,880,000	99.84 %	8,000
000051. Tiket PP Narsum	3,558,000	0	3,557,920	0	3,557,920	100.00	80
000334. Transport Lokal	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
000336. Transport Lokal	3,060,000	0	1,360,000	1,700,000	3,060,000	100.00	0
<b>SCH Pelatihan Bidang Industri</b>	<b>988,000,000</b>	<b>0</b>	<b>514,821,339</b>	<b>470,393,209</b>	<b>985,214,548</b>	<b>99.72 %</b>	<b>2,785,452</b>
<b>SCH.001 Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)</b>	<b>292,500,000</b>	<b>0</b>	<b>230,903,129</b>	<b>61,497,271</b>	<b>292,400,400</b>	<b>99.97 %</b>	<b>99,600</b>
<b>051 Pelatihan Industri (Skilling, Reskilling, Upskilling) Sistem 3 in 1 Sektor Industri Makanan dan Minuman</b>	<b>292,500,000</b>	<b>0</b>	<b>230,903,129</b>	<b>61,497,271</b>	<b>292,400,400</b>	<b>99.97 %</b>	<b>99,600</b>
<b>051.0A Diklat Three in one Angkatan 1 - 3 Calon Tenaga Kerja Produk Olahan Makanan</b>	<b>214,920,000</b>	<b>0</b>	<b>179,565,780</b>	<b>35,331,620</b>	<b>214,897,400</b>	<b>99.99 %</b>	<b>22,600</b>
521211 Belanja Bahan	45,499,000	0	44,472,400	1,004,000	45,476,400	99.95 %	22,600
000054. Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Diklat ( 15 OR X 2 X 1 AKT)	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	100.00	0
000055. Konsumsi Makan Peserta (45 OR x 10 HR x 1 AKT)	42,142,000	0	42,120,000	0	42,120,000	99.95 %	22,000
000057. Pelaporan (3 Laporan)	1,113,000	0	1,112,400	0	1,112,400	99.95 %	600
000058. Spanduk (1AKT X 1 )	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
000401. P3K Peserta Diklat	1,004,000	0	0	1,004,000	1,004,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	100.00	0
000067. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara (1 AKT x 80 OJ)	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
000070. Asesor (3 AKT x 50 OR)	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	157,471,000	0	123,143,380	34,327,620	157,471,000	100.00	0
000074. Tiket Medan-Jakarta (2 OR x 18 )	45,696,000	0	34,446,213	11,249,787	45,696,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi : 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja : 579340 BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 4 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000075. Uang Harian (2 OR x 2 HR x 2 )	2,960,000	0	1,080,000	1,880,000	2,960,000	100.00	0
000076. Taksi PP (2 OR x 18 )	18,000,000	0	7,077,100	10,922,900	18,000,000	100.00	0
000077. Hotel (2 OR x 8 x 2 HR)	16,000,000	0	7,402,309	8,597,691	16,000,000	100.00	0
000078. Tiket PP	74,815,000	0	73,137,758	1,677,242	74,815,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	850,000	0	850,000	0	850,000	100.00	0
000079. Transport Panitia, Instruktur, Asesor (3 AKT x 12 OR x 10 HR)	850,000	0	850,000	0	850,000	100.00	0
051.0B Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Diklat BDI Medan	31,100,000	0	26,750,600	4,349,400	31,100,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,100,000	0	26,750,600	4,349,400	31,100,000	100.00	0
000083. Uang Harian (20OR X 3 HR)	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000	100.00	0
000084. Taksi PP (20 AKT x 2 HR)	10,000,000	0	8,898,000	1,102,000	10,000,000	100.00	0
000085. Hotel (20 OR x 2 HR)	10,000,000	0	6,752,600	3,247,400	10,000,000	100.00	0
051.0C Pengembangan SDM Industri	46,480,000	0	24,586,749	21,816,251	46,403,000	99.83 %	77,000
521211 Belanja Bahan	5,490,000	0	1,223,000	4,190,000	5,413,000	98.60 %	77,000
000236. Penggandaan fotocopy dan pembuatan laporan	1,000,000	0	585,000	410,000	995,000	99.50 %	5,000
000237. Spanduk	500,000	0	463,000	33,000	496,000	99.20 %	4,000
000238. Konsumsi Rapat Makan - Kudapan (Snack) (35 OR x 2 Keg)	2,990,000	0	0	2,947,000	2,947,000	98.56 %	43,000
000240. Spanduk	1,000,000	0	175,000	800,000	975,000	97.50 %	25,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	36,490,000	0	23,363,749	13,126,251	36,490,000	100.00	0
000235. Kontribusi Pelatihan	36,490,000	0	23,363,749	13,126,251	36,490,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	100.00	0
000239. Narasumber (1 OR X 5 OJ)	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	100.00	0
<b>SCH.002 Pelatihan Vokasi Industri Upskilling dan Reskilling</b>	<b>695,500,000</b>	<b>0</b>	<b>283,918,210</b>	<b>408,895,938</b>	<b>692,814,148</b>	<b>99.61 %</b>	<b>2,685,852</b>
<b>058 Pelatihan Vokasi Industri Upskilling dan Reskilling Sektor Agro</b>	<b>695,500,000</b>	<b>0</b>	<b>283,918,210</b>	<b>408,895,938</b>	<b>692,814,148</b>	<b>99.61 %</b>	<b>2,685,852</b>
058.0A Pelatihan Pengoperasian Mesin dan Peralatan Produksi Pada Pabrik Minyak Kelapa Sawit	561,448,000	0	270,165,210	290,994,538	561,159,748	99.95 %	288,252
521211 Belanja Bahan	316,338,000	0	111,560,440	204,677,468	316,237,908	99.97 %	100,092
000342. Kardus Packing ATK Diklat (10 Kotak X 3 AKT)	750,000	0	0	750,000	750,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 019 **KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi** : 10 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja** : 579340 **BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 5 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000343. Konsumsi Makan Peserta (38 OR x 10 HR x 3 AKT X 3)	124,690,000	0	87,246,000	37,444,000	124,690,000	100.00	0
000344. Konsumsi Kudapan Peserta (38 OR X 10 HR X 2 X 3 AKT)	32,242,000	0	9,990,000	22,216,000	32,206,000	99.89 %	36,000
000345. Pelaporan (3 Laporan)	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	100.00	0
000346. Spanduk (3AKT X 3 )	620,000	0	132,000	488,000	620,000	100.00	0
000348. Buku Pedoman (3 AKT x 38 OR)	3,420,000	0	3,402,150	0	3,402,150	99.48 %	17,850
000349. Plakat	30,525,000	0	0	30,525,000	30,525,000	100.00	0
000350. P3K	4,500,000	0	1,533,500	2,964,500	4,498,000	99.96 %	2,000
000351. Bahan Praktek dan Uji Kompetensi	10,886,000	0	9,256,790	1,627,500	10,884,290	99.98 %	1,710
000352. Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Diklat ( 15 OR X 2 X 3 AKT)	3,420,000	0	0	3,390,000	3,390,000	99.12 %	30,000
000409. Belanja Keperluan Peserta /Handuk, sendal, Sajadah, Perlengkapan Mandi	103,785,000	0	0	103,772,468	103,772,468	99.99 %	12,532
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000353. Pengiriman Sertifikat Peserta Diklat	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34,870,000	0	18,864,640	15,917,200	34,781,840	99.75 %	88,160
000354. Perlengkapan Peserta /Tas, Baju Praktek, Buku, Pulpen, Helm, Shower Cap ID Card (3 AKT x 50 OR)	18,880,000	0	18,864,640	0	18,864,640	99.92 %	15,360
000355. Alat Tulis Kegiatan Diklat	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	100.00	0
000356. Map (3 AKT x 50 OR)	3,990,000	0	0	3,917,200	3,917,200	98.18 %	72,800
522151 Belanja Jasa Profesi	78,600,000	0	78,600,000	0	78,600,000	100.00	0
000358. Asesor yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara (3 AKT x 38 OR)	16,800,000	0	16,800,000	0	16,800,000	100.00	0
000359. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara (3 AKT x 80 OJ)	61,800,000	0	61,800,000	0	61,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131,540,000	0	61,140,130	70,399,870	131,540,000	100.00	0
000364. Tiket Medan- PKU (10 OR x 3 )	84,240,000	0	61,140,130	23,099,870	84,240,000	100.00	0
000365. Uang Harian (10 OR x 2 HR x 2 )	14,800,000	0	0	14,800,000	14,800,000	100.00	0
000366. Taksi PP (3 OR x 10 )	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	100.00	0
000367. Hotel (2 OR x 8 x 2 HR)	17,500,000	0	0	17,500,000	17,500,000	100.00	0
058.0B Penyusunan Modul Diklat	114,152,000	0	13,753,000	100,341,400	114,094,400	99.95 %	57,600

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi : 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja : 579340 BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 6 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	28,152,000	0	13,753,000	14,341,400	28,094,400	99.80 %	57,600
000368. Spanduk	156,000	0	156,000	0	156,000	100.00	0
000369. Penggandaan fotocopy dan pembuatan laporan	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	100.00	0
000370. Konsumsi Kudapan ( 42 OR X 2 HR X 2)	17,000	0	0	0	0	0.00 %	17,000
000371. Konsumsi Rapat Makan (42 OR X 2 HR X 2)	4,371,000	0	0	4,341,400	4,341,400	99.32 %	29,600
000392. ATK, Perlengkapan Peserta	13,608,000	0	13,597,000	0	13,597,000	99.92 %	11,000
522151 Belanja Jasa Profesi	86,000,000	0	0	86,000,000	86,000,000	100.00	0
000372. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	100.00	0
000373. Narasumber (10 OR X 4 OJ)	36,000,000	0	0	36,000,000	36,000,000	100.00	0
058.0C Pengembangan SDM Industri	19,900,000	0	0	17,560,000	17,560,000	88.24 %	2,340,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,900,000	0	0	17,560,000	17,560,000	88.24 %	2,340,000
000410. Kontribusi Pelatihan	19,900,000	0	0	17,560,000	17,560,000	88.24 %	2,340,000
WA Program Dukungan Manajemen	6,593,786,000	0	5,976,130,786	607,378,709	6,583,509,495	99.84 %	10,276,505
WA.6043 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	6,443,786,000	0	5,976,130,786	458,509,789	6,434,640,575	99.86 %	9,145,425
<b>CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,232,340</b>	<b>760,000</b>	<b>19,992,340</b>	<b>99.96 %</b>	<b>7,660</b>
<b>CCL.001 Layanan Pemeliharaan Jaringan Komputer dan TIK</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,232,340</b>	<b>760,000</b>	<b>19,992,340</b>	<b>99.96 %</b>	<b>7,660</b>
<b>051 Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,232,340</b>	<b>760,000</b>	<b>19,992,340</b>	<b>99.96 %</b>	<b>7,660</b>
051.0A Pemeliharaan Peralatan komputer dan Jaringan	20,000,000	0	19,232,340	760,000	19,992,340	99.96 %	7,660
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	19,232,340	760,000	19,992,340	99.96 %	7,660
000086. Peralatan Komputer dan Jaringan	10,000,000	0	9,232,340	760,000	9,992,340	99.92 %	7,660
000087. Printer	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>6,357,456,000</b>	<b>0</b>	<b>5,903,144,830</b>	<b>451,529,789</b>	<b>6,354,674,619</b>	<b>99.96 %</b>	<b>2,781,381</b>
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>6,357,456,000</b>	<b>0</b>	<b>5,903,144,830</b>	<b>451,529,789</b>	<b>6,354,674,619</b>	<b>99.96 %</b>	<b>2,781,381</b>
<b>001 Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4,903,694,000</b>	<b>0</b>	<b>4,613,458,755</b>	<b>289,688,104</b>	<b>4,903,146,859</b>	<b>99.99 %</b>	<b>547,141</b>
001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,105,349,000	0	3,870,079,283	234,728,270	4,104,807,553	99.99 %	541,447
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,366,696,000	0	1,366,695,260	0	1,366,695,260	100.00	740

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 019 **KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi** : 10 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja** : 579340 **BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 7 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000088. Gaji Pokok PNS (30 OR X12 BLN)	1,366,696,000	0	1,366,695,260	0	1,366,695,260	100.00	740
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	0	19,375	0	19,375	96.88 %	625
000089. Belanja Pembulatan Gaji (30 OR X12 BLN)	20,000	0	19,375	0	19,375	96.88 %	625
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	100,618,000	0	100,617,414	0	100,617,414	100.00	586
000090. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (30 OR X12 BLN)	100,618,000	0	100,617,414	0	100,617,414	100.00	586
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	28,196,000	0	28,195,642	0	28,195,642	100.00	358
000091. Belanja Tunjangan Anak (30 OR X12 BLN)	28,196,000	0	28,195,642	0	28,195,642	100.00	358
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	24,660,000	0	24,660,000	0	24,660,000	100.00	0
000092. Belanja Struktural PNS (30 OR X12 BLN)	24,660,000	0	24,660,000	0	24,660,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	170,521,000	0	170,521,000	0	170,521,000	100.00	0
000093. Belanja Tunjangan Fungsional (30 OR X12 BLN)	170,521,000	0	170,521,000	0	170,521,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	13,250,000	0	13,249,261	0	13,249,261	99.99 %	739
000094. Belanja Tunjangan PPh (30 OR X12 BLN)	13,250,000	0	13,249,261	0	13,249,261	99.99 %	739
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	76,114,000	0	76,113,420	0	76,113,420	100.00	580
000095. Belanja Tunjangan Beras PNS (30 OR X12 BLN)	76,114,000	0	76,113,420	0	76,113,420	100.00	580
511129 Belanja Uang Makan PNS	194,503,000	0	178,237,000	16,266,000	194,503,000	100.00	0
000096. Belanja Uang Makan (30 OR X12 BLN)	194,503,000	0	178,237,000	16,266,000	194,503,000	100.00	0
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	29,425,000	0	29,425,000	0	29,425,000	100.00	0
000097. Belanja Tunjangan Umum PNS (30 OR X12 BLN)	29,425,000	0	29,425,000	0	29,425,000	100.00	0
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,101,346,000	0	1,882,345,911	218,462,270	2,100,808,181	99.97 %	537,819
000098. Belanja Tunjangan Kinerja PNS (30 OR X12 BLN)	2,101,346,000	0	1,882,345,911	218,462,270	2,100,808,181	99.97 %	537,819
001.0B Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	798,345,000	0	743,379,472	54,959,834	798,339,306	100.00	5,694
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	294,180,000	0	294,176,199	0	294,176,199	100.00	3,801
000099. Belanja Gaji Induk PPPK	294,180,000	0	294,176,199	0	294,176,199	100.00	3,801
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	4,721	0	4,721	94.42 %	279
000100. Belanja Gaji Pembulatan PPPK	5,000	0	4,721	0	4,721	94.42 %	279

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 019 **KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi** : 10 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja** : 579340 **BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 8 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	27,158,000	0	27,157,269	0	27,157,269	100.00	731
000101. Belanja Tunjangan Suami/ Istri PPPK	27,158,000	0	27,157,269	0	27,157,269	100.00	731
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,241,000	0	6,240,745	0	6,240,745	100.00	255
000102. Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,241,000	0	6,240,745	0	6,240,745	100.00	255
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	39,865,000	0	39,865,000	0	39,865,000	100.00	0
000103. Belanja tunjangan Fungsional PPPK	39,865,000	0	39,865,000	0	39,865,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	20,586,000	0	20,585,385	0	20,585,385	100.00	615
000104. Belanja Tunjangan Beras PPPK	20,586,000	0	20,585,385	0	20,585,385	100.00	615
511628 Belanja Uang Makan PPPK	48,844,000	0	41,798,000	7,046,000	48,844,000	100.00	0
000105. Belanja Uang Makan PPPK	48,844,000	0	41,798,000	7,046,000	48,844,000	100.00	0
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	100.00	0
000255. Tunjangan Umum PPPK	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	100.00	0
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	358,226,000	0	310,312,153	47,913,834	358,225,987	100.00	13
000106. Tunjangan Kinerja PPPK	358,226,000	0	310,312,153	47,913,834	358,225,987	100.00	13
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>1,453,762,000</b>	<b>0</b>	<b>1,289,686,075</b>	<b>161,841,685</b>	<b>1,451,527,760</b>	<b>99.85 %</b>	<b>2,234,240</b>
002.OA Operasional Perkantoran	71,340,000	0	59,342,000	11,994,000	71,336,000	99.99 %	4,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	71,340,000	0	59,342,000	11,994,000	71,336,000	99.99 %	4,000
000107. Pengurus Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang (2 OR X 10 OB)	3,600,000	0	3,240,000	360,000	3,600,000	100.00	0
000109. Pejabat Pengadaan (1 OR x 10 Bln)	3,540,000	0	2,992,000	544,000	3,536,000	99.89 %	4,000
000111. KPA (1 OR X 12 BLN)	18,600,000	0	15,500,000	3,100,000	18,600,000	100.00	0
000112. PPK (1 OR X 12 BLN)	18,120,000	0	15,100,000	3,020,000	18,120,000	100.00	0
000113. SPM (1 OR X 12 BLN)	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
000114. Bendahara Pengeluaran	6,240,000	0	5,200,000	1,040,000	6,240,000	100.00	0
000115. Staff Keuangan (3 OR x 12 OB)	14,040,000	0	11,310,000	2,730,000	14,040,000	100.00	0
002.OB Layanan Daya dan Jasa	145,485,000	0	127,543,956	17,863,664	145,407,620	99.95 %	77,380
522111 Belanja Langganan Listrik	134,868,000	0	119,050,312	15,815,629	134,865,941	100.00	2,059

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi : 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja : 579340 BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 9 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000116. Langganan Daya Listrik	134,868,000	0	119,050,312	15,815,629	134,865,941	100.00	2,059
522112 Belanja Langganan Telepon	2,637,000	0	2,361,574	203,571	2,565,145	97.28 %	71,855
000117. Langganan Telepon dan Fax	2,637,000	0	2,361,574	203,571	2,565,145	97.28 %	71,855
522113 Belanja Langganan Air	7,980,000	0	6,132,070	1,844,464	7,976,534	99.96 %	3,466
000118. Langganan Air PAM	7,980,000	0	6,132,070	1,844,464	7,976,534	99.96 %	3,466
002.0C Operasional Perkantoran Sehari-hari	227,790,000	0	200,945,710	26,402,300	227,348,010	99.81 %	441,990
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	124,400,000	0	100,807,000	23,311,800	124,118,800	99.77 %	281,200
000119. Air Minum Aqua Galon (50 Galon x 12 BLN)	20,600,000	0	15,022,000	5,521,800	20,543,800	99.73 %	56,200
000120. Langganan Internet	102,000,000	0	84,360,000	17,640,000	102,000,000	100.00	0
000250. Kebersihan sampah	1,800,000	0	1,425,000	150,000	1,575,000	87.50 %	225,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	970,000	0	673,650	191,500	865,150	89.19 %	104,850
000121. Pengiriman Surat Kedinasan	970,000	0	673,650	191,500	865,150	89.19 %	104,850
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63,420,000	0	60,465,060	2,899,000	63,364,060	99.91 %	55,940
000122. Keperluan Perkantoran Sehari-hari (Memiliki Lebih dari 40 Pegawai/Sumut) 42Pegawai	63,420,000	0	60,465,060	2,899,000	63,364,060	99.91 %	55,940
522141 Belanja Sewa	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000	100.00	0
000123. Sewa Rumah Pimpinan	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000	100.00	0
002.0D Perawatan Sarana dan Prasarana Diklat	199,379,000	0	120,958,249	77,833,407	198,791,656	99.71 %	587,344
521211 Belanja Bahan	952,000	0	628,000	324,000	952,000	100.00	0
000252. Minyak genset	952,000	0	628,000	324,000	952,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66,179,000	0	40,717,919	24,894,700	65,612,619	99.14 %	566,381
000126. Pemeliharaan Gedung Kantor	65,153,000	0	40,257,919	24,894,700	65,152,619	100.00	381
000127. Pemeliharaan Pos Satpam	1,026,000	0	460,000	0	460,000	44.83 %	566,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132,248,000	0	79,612,330	52,614,707	132,227,037	99.98 %	20,963
000128. Roda Empat (2 unit)	62,342,000	0	37,226,200	25,115,800	62,342,000	100.00	0
000129. Double Gardan (1 Unit)	31,655,000	0	12,700,452	18,952,057	31,652,509	99.99 %	2,491
000130. Roda Dua (2 Unit)	2,400,000	0	2,392,961	0	2,392,961	99.71 %	7,039

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi : 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja : 579340 BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 10 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000131. Perawatan AC (43 unit)	17,178,000	0	17,175,697	0	17,175,697	99.99 %	2,303
000132. Genset	7,190,000	0	7,117,020	72,000	7,189,020	99.99 %	980
000251. Pompa Air	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000402. Pemeliharaan CCTV	3,560,000	0	0	3,552,000	3,552,000	99.78 %	8,000
000403. Pemeliharaan Apar	4,923,000	0	0	4,922,850	4,922,850	100.00	150
002.0E Rapat dan Undangan Lainnya dengan Kemenperin/BPSDMI/Stacholder	52,728,000	0	44,015,412	8,444,054	52,459,466	99.49 %	268,534
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	17,630,000	0	12,147,590	5,404,054	17,551,644	99.56 %	78,356
000133. Konsumsi Rapat Makan dan Kudapan (42 OR X 10 KEG)	17,630,000	0	12,147,590	5,404,054	17,551,644	99.56 %	78,356
522151 Belanja Jasa Profesi	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	100.00	0
000134. Honorarium Narasumber (10 Kegiatan x 8 OJ)	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,998,000	0	28,767,822	3,040,000	31,807,822	99.41 %	190,178
000135. Tiket Pesawat (18 OR)	11,685,000	0	9,783,966	1,900,000	11,683,966	99.99 %	1,034
000136. Akomodasi (18 OR x 5 HR)	8,153,000	0	7,153,856	990,000	8,143,856	99.89 %	9,144
000137. Uang Harian (18 OR x 4 HR)	4,430,000	0	4,430,000	0	4,430,000	100.00	0
000138. Taksi PP (18 OR)	7,070,000	0	7,070,000	0	7,070,000	100.00	0
000139. Tiket PP	660,000	0	330,000	150,000	480,000	72.73 %	180,000
002.0F Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional	733,292,000	0	726,498,370	6,390,380	732,888,750	99.95 %	403,250
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	223,000,000	0	216,208,978	6,390,380	222,599,358	99.82 %	400,642
000140. Pramubakti (4 OR x 13 Bln)	185,600,000	0	178,808,978	6,390,380	185,199,358	99.78 %	400,642
000141. Supir	37,400,000	0	37,400,000	0	37,400,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	510,292,000	0	510,289,392	0	510,289,392	100.00	2,608
000142. Pengadaan Keamanan Gedung Kantor	311,292,000	0	311,291,136	0	311,291,136	100.00	864
000143. Pramubakti	143,334,000	0	143,333,064	0	143,333,064	100.00	936
000144. Supir Kantor	55,666,000	0	55,665,192	0	55,665,192	100.00	808
002.0H Pengelolaan Asrama	15,352,000	0	2,756,800	12,283,400	15,040,200	97.97 %	311,800
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,352,000	0	2,756,800	12,283,400	15,040,200	97.97 %	311,800

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 019 **KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi** : 10 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja** : 579340 **BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 11 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000145. Laundry Set (12 BLN x 50 SET)	15,352,000	0	2,756,800	12,283,400	15,040,200	97.97 %	311,800
002.01 Langganan Lisensi Aplikasi	8,396,000	0	7,625,578	630,480	8,256,058	98.33 %	139,942
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	8,396,000	0	7,625,578	630,480	8,256,058	98.33 %	139,942
000146. Langganan Lisensi Aplikasi Vid Com (500.000 X 12 BLN)	3,588,000	0	3,587,719	0	3,587,719	99.99 %	281
000147. Langganan Google drive, aplikasi prabayar	312,000	0	29,859	192,030	221,889	71.12 %	90,111
000148. Langganan Lisensi Aplikasi Canva, Capcut	1,496,000	0	1,011,000	438,450	1,449,450	96.89 %	46,550
000253. Pemeliharaan Website	3,000,000	0	2,997,000	0	2,997,000	99.90 %	3,000
<b>EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>66,330,000</b>	<b>0</b>	<b>53,753,616</b>	<b>6,220,000</b>	<b>59,973,616</b>	<b>90.42 %</b>	<b>6,356,384</b>
<b>EBD.004 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat Industri</b>	<b>66,330,000</b>	<b>0</b>	<b>53,753,616</b>	<b>6,220,000</b>	<b>59,973,616</b>	<b>90.42 %</b>	<b>6,356,384</b>
<b>051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
051.0B Penyusunan Rencana Kerja, SAKIP, Renstra,LAKIP, PP39,	30,000	0	30,000	0	30,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	30,000	0	30,000	0	30,000	100.00	0
000166. Penggandaan fotocopy dan pembuatan laporan	30,000	0	30,000	0	30,000	100.00	0
<b>052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi</b>	<b>29,704,000</b>	<b>0</b>	<b>29,373,177</b>	<b>330,000</b>	<b>29,703,177</b>	<b>100.00</b>	<b>823</b>
052.0A Koordinasi Dengan Kemenperin/BPSDMI	8,232,000	0	8,231,220	0	8,231,220	99.99 %	780
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,232,000	0	8,231,220	0	8,231,220	99.99 %	780
000173. Tiket Medan- Jakarta (6 OR X 1 KEG)	1,752,000	0	1,751,220	0	1,751,220	99.96 %	780
000174. Uang Harian (6 OR X 2 HR)	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000	100.00	0
000175. Taksi PP (6 OR X 1 KEG)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000176. Hotel (6 OR X 1 HR)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
052.0C Pengelolaan SMM ISO 9001 : 2015	21,472,000	0	21,141,957	330,000	21,471,957	100.00	43
521211 Belanja Bahan	330,000	0	0	330,000	330,000	100.00	0
000404. Pencetakan dan Penjilitan Laporan	330,000	0	0	330,000	330,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	16,650,000	0	16,650,000	0	16,650,000	100.00	0
000193. Jasa Sertifikasi SMM ISO 9009 : 2015	16,650,000	0	16,650,000	0	16,650,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,492,000	0	4,491,957	0	4,491,957	100.00	43

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi : 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja : 579340 BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 12 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000194. Tiket Medan- Jakarta (3 OR X 1 KEG)	4,492,000	0	4,491,957	0	4,491,957	100.00	43
<b>053 Pengelolaan keuangan</b>	<b>6,040,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>82.78 %</b>	<b>1,040,000</b>
053.0B Pelaksanaan PIPK di BDI Medan	6,040,000	0	0	5,000,000	5,000,000	82.78 %	1,040,000
521211 Belanja Bahan	990,000	0	0	0	0	0.00 %	990,000
000405. Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) (30 OR x 4 Keg)	990,000	0	0	0	0	0.00 %	990,000
522151 Belanja Jasa Profesi	5,050,000	0	0	5,000,000	5,000,000	99.01 %	50,000
000215. Narasumber (2 OR X 8 OJ)	5,050,000	0	0	5,000,000	5,000,000	99.01 %	50,000
<b>054 Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>30,556,000</b>	<b>0</b>	<b>24,350,439</b>	<b>890,000</b>	<b>25,240,439</b>	<b>82.60 %</b>	<b>5,315,561</b>
054.0A Pengiriman Peserta Diklat, Sosialisasi dan Undangan Lainnya	25,606,000	0	24,350,439	890,000	25,240,439	98.57 %	365,561
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,000,000	0	5,706,075	0	5,706,075	95.10 %	293,925
000216. Kontribusi Pelatihan	6,000,000	0	5,706,075	0	5,706,075	95.10 %	293,925
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,606,000	0	18,644,364	890,000	19,534,364	99.63 %	71,636
000217. Tiket PP Medan- Jakarta (1 OR)	15,456,000	0	14,494,364	890,000	15,384,364	99.54 %	71,636
000218. Uang Harian (3 OR X 5 HR)	1,590,000	0	1,590,000	0	1,590,000	100.00	0
000219. Hotel (3 OR X 4 HR)	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000	100.00	0
000220. Taksi PP (3 OR X 2 KEG)	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	100.00	0
054.0B Seminar Hilirisasi Industri	4,950,000	0	0	0	0	0.00 %	4,950,000
521211 Belanja Bahan	1,350,000	0	0	0	0	0.00 %	1,350,000
000393. Seminar KIT	630,000	0	0	0	0	0.00 %	630,000
000394. Spanduk	165,000	0	0	0	0	0.00 %	165,000
000395. Penggandaan fotocopy dan pembuatan laporan	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
000396. Konsumsi Peserta, Pengajar, Panitia	255,000	0	0	0	0	0.00 %	255,000
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	0	0	0	0.00 %	3,600,000
000397. Narasumber	3,600,000	0	0	0	0	0.00 %	3,600,000
WA.6893 Peningkatan Kompetensi ASN	150,000,000	0	0	148,868,920	148,868,920	99.25 %	1,131,080
<b>EBC Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,868,920</b>	<b>148,868,920</b>	<b>99.25 %</b>	<b>1,131,080</b>

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**Unit Organisasi : 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**  
**Satuan Kerja : 579340 BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**

Hal 13 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>EBC.051 SDM Aparatur Lulusan Diklat Struktural, Fungsional, dan Teknis Industri</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,868,920</b>	<b>148,868,920</b>	<b>99.25 %</b>	<b>1,131,080</b>
<b>051 Menyelenggarakan Diklat Struktural</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,868,920</b>	<b>148,868,920</b>	<b>99.25 %</b>	<b>1,131,080</b>
051.0A Diklat Sistem Industri	150,000,000	0	0	148,868,920	148,868,920	99.25 %	1,131,080
521211 Belanja Bahan	97,376,000	0	0	96,439,670	96,439,670	99.04 %	936,330
000382. Spanduk	550,000	0	0	468,000	468,000	85.09 %	82,000
000383. Penggandaan fotocopy dan pembuatan laporan	2,070,000	0	0	1,960,000	1,960,000	94.69 %	110,000
000384. Konsumsi Kudapan ( 38 OR X 6 HR X 3)	9,576,000	0	0	9,489,000	9,489,000	99.09 %	87,000
000385. Konsumsi Makan Diklat (38 OR X 6 HR X 3)	25,992,000	0	0	25,992,000	25,992,000	100.00	0
000388. Bahan dan Perlengkapan Peserta 30 ORG x 1 AKT	30,000,000	0	0	29,999,970	29,999,970	100.00	30
000389. Pencetakan Sertifikat dan Map(30 Org x 1 Keg)	1,200,000	0	0	1,198,800	1,198,800	99.90 %	1,200
000390. ATK	2,000,000	0	0	1,933,900	1,933,900	96.70 %	66,100
000391. Penggandaan Modul (30 Org x 1 Keg)	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	100.00	0
000406. Penggandaan dan Penjilidan Laporan	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
000407. P3K (obat-obatan)	1,396,000	0	0	1,393,500	1,393,500	99.82 %	2,500
000412. Konsumsi Kudapan Praktek Kunjungan Industri ( 12 OR X 1 HR X 1)	168,000	0	0	168,000	168,000	100.00	0
000413. Konsumsi Makan Praktek Kunjungan Industri (12 OR X 1 HR X 1)	456,000	0	0	456,000	456,000	100.00	0
000414. Cinder Mata Kunjungan Industri	2,400,000	0	0	2,385,200	2,385,200	99.38 %	14,800
000418. Perlengkapan asrama untuk peserta	6,068,000	0	0	5,995,300	5,995,300	98.80 %	72,700
522141 Belanja Sewa	6,124,000	0	0	6,100,000	6,100,000	99.61 %	24,000
000415. Sewa Bus Sedang	6,124,000	0	0	6,100,000	6,100,000	99.61 %	24,000
522151 Belanja Jasa Profesi	15,900,000	0	0	15,900,000	15,900,000	100.00	0
000387. Narasumber Praktisi	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	100.00	0
000416. Honor Pengajar dari Luar satuan kerja	8,700,000	0	0	8,700,000	8,700,000	100.00	0
000417. Honorarium Pengajar dari Dalam satuan kerja penyelenggara	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,600,000	0	0	30,429,250	30,429,250	99.44 %	170,750
000377. Uang Harian Diklat (30 OR X 6 HR)	19,800,000	0	0	19,800,000	19,800,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
**Unit Organisasi** : 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI  
**Satuan Kerja** : 579340 BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN

Hal 14 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000378. Uang Harian Pengajar (2 OR x 2 HR x 2 )	1,480,000	0	0	1,419,250	1,419,250	95.90 %	60,750
000379. Taksi PP ( 2OR x 1 )	1,000,000	0	0	890,000	890,000	89.00 %	110,000
000380. Tiket PP	6,320,000	0	0	6,320,000	6,320,000	100.00	0
000381. Hotel Pengajar ( 2 OR X 2 HR)	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**



**BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN**  
**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI**  
**TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

<b>LAPORAN</b>	<b>1</b>
<b>PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	1
1.3 Metode Pengumpulan Data	2
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM	3
1.5 Penentuan Jumlah Responden	3
<b>BAB II</b>	<b>4</b>
<b>ANALISIS DATA SKM</b>	<b>4</b>
2.1 Analisis Responden	4
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	6
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	7
2.4 Tren Nilai SKM	8
<b>BAB III</b>	<b>10</b>
<b>HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA</b>	<b>10</b>
<b>BAB IV</b>	<b>12</b>
<b>KESIMPULAN</b>	<b>12</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>14</b>
1. Kuesioner	14
2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Balai Diklat Industri Medan Kementerian Perindustrian RI menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

### **1.2 Tujuan dan Manfaat**

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

### 1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Balai Diklat Industri Medan Kementerian Perindustrian RI. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan WEBSITE [skm.surveiku.com](http://skm.surveiku.com) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Balai Diklat Industri Medan Kementerian Perindustrian RI yaitu :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

#### **1.4 Waktu Pelaksanaan SKM**

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 12 (dua belas) bulan.

#### **1.5 Penentuan Jumlah Responden**

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 200 orang dan sampel sebanyak 123 responden.

## BAB II

### ANALISIS DATA SKM

#### 2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 123 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	77	63%
		Perempuan	46	37%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/Sederajat	0	0%
		SMP/Sederajat	1	0.8%
		SMA/Sederajat	74	60.1%
		D1/D2/D3	3	2.43%
		D4/S1	32	26%
		S2	13	10.5%
		S3	0	0%
3	Pekerjaan	ASN	14	11.3%
		TNI		
		POLRI		
		Swasta	78	63.41%
		Wirausaha	31	25.20%
		Ibu Rumah Tangga		
		Pelajar/Mahasiswa		
		Petani/Nelayan		
		Pekerja Lepas/Freelance		
		Pensiunan		
Lainnya				

4	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas		
		Disabilitas		
5	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik		
		Disabilitas Intelektual		
		Disabilitas Mental		
		Disabilitas Sensorik		

## 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon den	Persyar atan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perila ku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Pelatihan atau Diklat	106	<b>89.15</b>	<b>87.50</b>	<b>90.57</b>	<b>100.00</b>	<b>93.40</b>	<b>90.09</b>	<b>90.09</b>	<b>89.86</b>	<b>92.22</b>	86.44
2.	Pendampingan	3	<b>83.33</b>	<b>83.33</b>	<b>83.33</b>	<b>100.00</b>	<b>83.33</b>	<b>91.67</b>	<b>83.33</b>	<b>83.33</b>	<b>83.33</b>	86.11
3.	Konsultasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kemitraan	14	<b>89.29</b>	<b>92.86</b>	<b>91.07</b>	<b>100.00</b>	<b>91.07</b>	<b>92.86</b>	<b>91.07</b>	<b>100.00</b>	<b>92.86</b>	90.87
Rerata IKM Per Unsur			<b>89.02</b>	<b>88.01</b>	<b>90.45</b>	<b>100.00</b>	<b>92.89</b>	<b>90.45</b>	<b>90.04</b>	<b>90.85</b>	<b>92.07</b>	87.80
IKM Unit Layanan			91.53									
Mutu Unit Layanan			A									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



### 2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek Produk dan Aduan merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 88.01. Selanjutnya persyaratan yang mendapatkan nilai 89.02 adalah nilai terendah kedua.

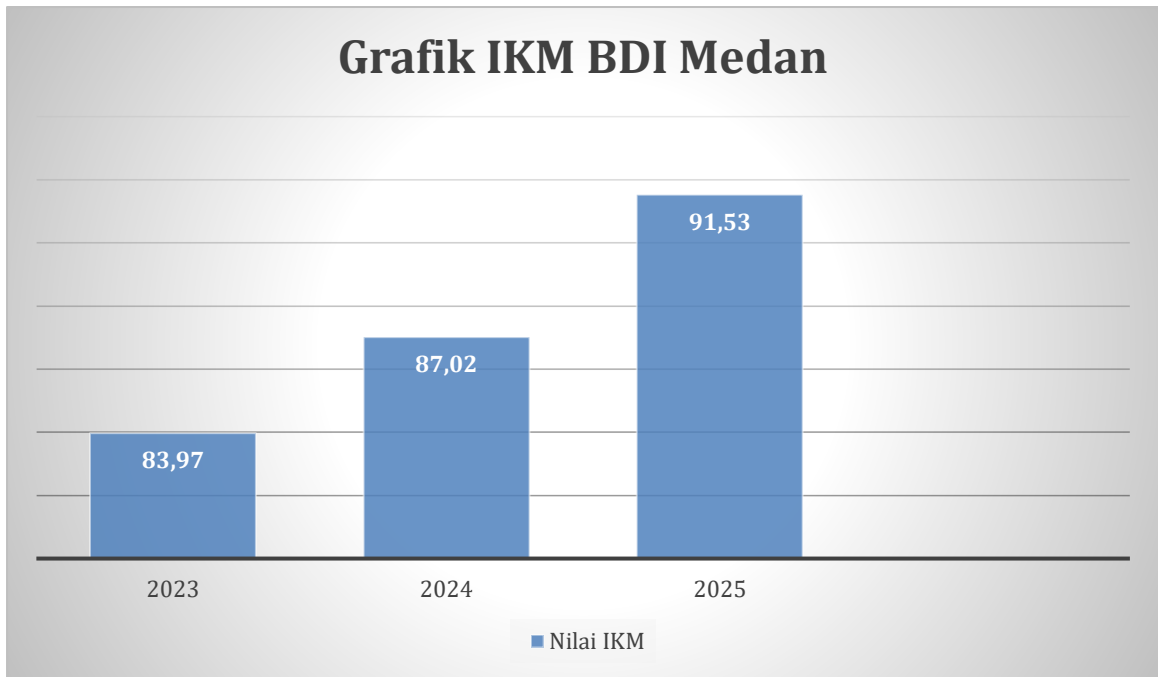
Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan bahwa saran dan prasana yang ada dalam program layanan yang ditawarkan oleh BDI Medan masih perlu ditingkatkan, seperti fasilitas kamar mandi, tisu toilet.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan penyederhanaan alur layanan, sehingga dapat mempersingkat waktu penyelesaian meningkatkan keterampilan komunikasi petugas, serta memperbaiki alur pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan kedepan

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Produk	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>	Maret 2026	TIM Penyelenggara Diklat, TU, TIM Kerjasama
		Melakukan <i>benchmarking</i> dengan instansi lebih lain dengan tipe pelayanan serupa	Mei 2026	TIM Penyelenggara Diklat, TU, TIM Kerjasama
2	Aduan	Menyelenggarakan forum konsultasi publik untuk mereviu standar pelayanan	Mei 2026	TIM Penyelenggara Diklat, TU, TIM Kerjasama
		Menerapkan sistem reward & punishment berbasis umpan balik pengguna	Mei 2026	TIM Penyelenggara Diklat, TU, TIM Kerjasama

## 2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Diklat Industri Medan dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Balai Diklat Industri Medan Kementerian Perindustrian RI telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

### BAB III

#### HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA




Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Diklat Industri Medan Kementerian Perindustrian periode (sebelumnya) menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)**

No	Unsur	IKM	Nilai Konversi
1	Persyaratan	3.56	89.02
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.52	88.01
3	Waktu Penyelesaian	3.62	90.45
4	Biaya/Tarif	4.00	100.00
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3.72	92.89
6	Kompetensi Pelaksana	3.62	90.45
7	Perilaku Pelaksana	3.60	90.04
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.63	90.85
9	Sarana dan Prasarana	3.68	92.07

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Balai Diklat Industri Medan Kementerian Perindustrian RI telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode (sebelumnya). Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:



No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Melaksanakan rapat internal perihal penyempurnaan pelaksanaan diklat	sudah	-	
	Melakukan kunjungan ke industry melakukan penawaran diklat dan melalui surat.	sudah	Adanya penolakan oleh beberapa industri	
	Posting jenis layanan di sosmed	sudah	-	

2	Melakukan rivui SOP secara audit internal	sudah	Setiap pegawai membentuk kelompok dan menilai Kembali beberapa SOP yang dapat disederhanakan	
3	Melakukan pengadaan HP, WA, TAB HUMAS	Sudah		

	<p>Secara aktif membalas setiap pengaduan, saran dan masukan</p>	<p>Sudah</p>	<p>Membalas chat Masyarakat yang masuk melalui wa, ig, fb dll</p>	
	<p>Melakukan tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan</p>	<p>Sudah</p>	<p>Melaporkan setiap pengaduan, saran dan masukan kepada PIC</p>	

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 123 orang mengisi SKM pada Balai Diklat Industri Medan Kementerian Perindustrian RI di Tahun 2025. Layanan Pelatihan atau Diklat menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah *sampel* yang mengisi survei yaitu 106 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Diklat Industri Medan Kementerian Perindustrian RI, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91.53.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Prosedur dan Persyaratan
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Balai Diklat Industri Medan Kementerian Perindustrian RI telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%

Kota Medan, 2 Desember 2025

**Kepala Balai Diklat Industri Medan**

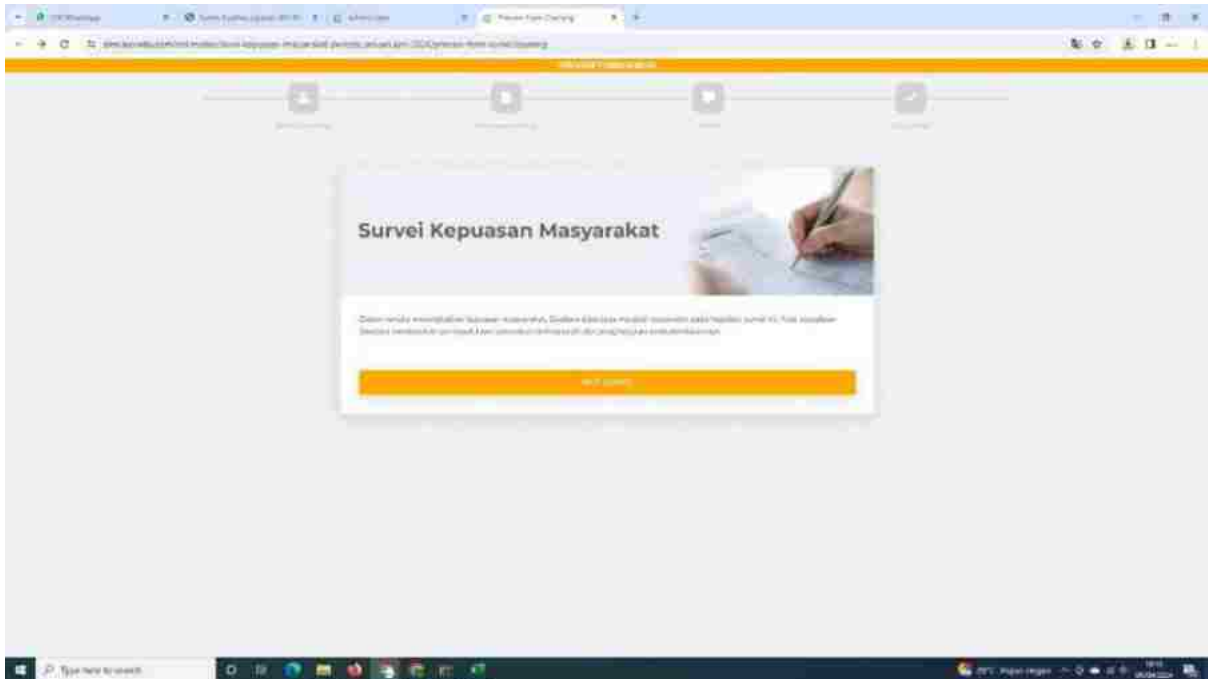


Chairil Almy

NIP. 197503212005021001

# LAMPIRAN

## 1. Kuesioner



## 2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



## Data Responden

Nama Lengkap	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Status	No HP
Teuku Gofar Adam	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	81361053258
RUSSEL ABIA SIBORO	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82213849315
Dwi Atika Naysarah	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	87760351711
Renaldi	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perorangan	83845214418
Sri Wahyuni	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	81370820447
Ririn febriani	26 - 35 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	85831033405
Dedek wahyu pradana hrp	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perorangan	82272335481
ALDINI	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	895326490212
Alwi Tr Sihombing	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perorangan	81271831715
Syahwalia khairunnisa	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	83804742171
Ririn	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	82393307139
Julianti Hutasoit	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	82162673371
LARA OKTAVIA BR TAMPUBOLON	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	81262265155
Juli Karina Sinurat	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	82274987781
Indah Lestari	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	82162610100
Aprilia	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	859191692531
Jafar Muldin	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	85275415251
Perawati sitompul	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	8136371656
Melinda Silitonga	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	85184175296
Rahayu	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	83191409509
RAULINA GULTOM	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	82349253225
febry yola simamora	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	82277934883
Adelia apriani Sembiring	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	85668965207
Kiki Adelia	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	89523062650
Fiqih ardian kas fahri	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82178015224
Rizkan afandy	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perorangan	85668091252

sabilla anggraini	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	82286650391
Suerwin	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	83829717017
Daniel sitorus	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perorangan	83184239666
Dewi Sripani	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	83843173936
Depti Haniwa Harahap	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	83809320627
Dwi Ramadhani	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	83140328975
Nuraini siregar	16 - 25 Tahun	Perempuan	S-1	Perusahaan Industri	89699999244
M.abdul azri	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perorangan	81265438643
Siti aspita harahap	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	81263045296
Syahril	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	89651587272
Mhd. Adittia prasetio	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perorangan	85931077869
Micael Lamhot Saputra pasaribu	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82211760022
Irhamni Harahap	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	82286061881
Muhammad Yusuf Renaldi	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perorangan	81362480050
Lilis permata sani daulay	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	81376270667
Andini syahputri	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perusahaan Industri	83821114663
Fernanda saragih	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82339182648
Suerwin	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	83829717017
Agnesia Alexsa Pardede	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	81284715008
ZULKARANAEN. S.T	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	81375656360
Surya aswanda	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perorangan	82272577424
Raja sakti Nasution	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	82187471942
Raja sakti Nasution	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	82187471942
MUHAMMAD YULIANUS	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	82299411788
Fatmawati lubis	46 - 55 Tahun	Perempuan	S-1	Perorangan	81362358711
MOHAMMAD WILDAN HAFIDZ	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	D1-D2-D3-D4	Perusahaan Industri	819865940
Husaini Ali Lubis	36 - 45 Tahun	Laki-Laki	S-1	Non Industri	82361999997
Hendrawan Manurung	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	82167450108

Ernita triana	46 - 55 Tahun	Perempuan	S-1	Non Industri	8116558669
Cut Evarafika	36 - 45 Tahun	Perempuan	S-2 keatas	Instansi/Lembaga	8116810081
Arisman Al Faridzi	36 - 45 Tahun	Laki-Laki	S-2 keatas	Instansi/Lembaga	81169499800
Mariadi Eprianto Sipayung	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	S-1	Instansi/Lembaga	85285673301
Sedi Eli gulo	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	85261522225
Siska Hasibuan	46 - 55 Tahun	Perempuan	S-2 keatas	Non Industri	81260993706
AFISI SABRI	46 - 55 Tahun	Perempuan	S-2 keatas	Instansi/Lembaga	82288584666
Yersi Hartati	46 - 55 Tahun	Perempuan	S-1	Perusahaan Industri	82366521939
Edhie Catur prayitno	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-2 keatas	Instansi/Lembaga	85296261477
ibu Nila	46 - 55 Tahun	Perempuan	S-1	Perusahaan Industri	82160851122
Sabaria hsb	36 - 45 Tahun	Perempuan	SMP kebawah	Perusahaan Industri	82277110128
SAMRI SAMUEL SIHOMBING	36 - 45 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perorangan	82272308318
NILA KESUMA SARAGIH	46 - 55 Tahun	Perempuan	S-2 keatas	Perorangan	82160851122
Ivo selvia agusti	36 - 45 Tahun	Perempuan	S-2 keatas	Perusahaan Industri	8116360308
Mahnizar	46 - 55 Tahun	Perempuan	D1-D2-D3-D4	Perorangan	82361504895
Meishanda Tabina Ankhamul	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Perorangan	85373736363
rudy h.r purba	36 - 45 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	81360872766
Henri Subroto Tampubolon	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	81274681486
TRI ATMOJO	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perorangan	82375645258
Rizka Rahmah Hidayati	36 - 45 Tahun	Perempuan	S-2 keatas	Instansi/Lembaga	81263548181
Yunita Anggrainj	46 - 55 Tahun	Perempuan	S-2 keatas	Instansi/Lembaga	85277277218
Christina Grace F. Hutaeruk	36 - 45 Tahun	Perempuan	S-1	Instansi/Lembaga	81375942829
Simon Petrus Sebayang	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-2 keatas	Instansi/Lembaga	81396183181
Raja sakti Nasution	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	82187471942
Muhammad Arief Syahputra Harahap	36 - 45 Tahun	Laki-Laki	S-1	Instansi/Lembaga	81370726927
Indra Oloan Nainggolan	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-2 keatas	Instansi/Lembaga	8126573315
Elisabeth Nainggolan	26 - 35 Tahun	Perempuan	S-1	Instansi/Lembaga	8127915337
Husni	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-2 keatas	Perusahaan Industri	8116145122

Nazliana	56 - 65 Tahun	Perempuan	D1-D2-D3-D4	Perorangan	82167421264
Hendrawan Manurung	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	82167450108
Bagaz albar	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	81973762647
RORY SYAHPUTRA	56 - 65 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	85261018404
Andika Syofyan	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-2 keatas	Instansi/Lembaga	8127639675
Fuadi	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	8126443816
Irwan	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	82289249136
Ricard Ricardo	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82288503363
Nabil imam putra iswoyo	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	83141771677
Riski nuansanyah	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	85374484799
EDUARD JAMES FERNANDO PARDEDE	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82258877376
Wilson Efendi sitanggung	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82211484116
Ajay pakpahan	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	81372740024
GUNAWAN	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	81378770756
Ade rohman	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82252668096
Rizky akbar nasution	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	85263968013
Iboy dahnia	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	85313941663
DAVAIRWANSYAH	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82288148779
Riki prayuda	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82167663985
muhamad roy martin	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82378936306
Henry Atmajaya	56 - 65 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82287402589
Henry Atmajaya	56 - 65 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82287402589
Yuhendri	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	81365917111
Matralanta simbolon	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	81222226197
Rahmat robbani	36 - 45 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	85134130060
Maju Hottua Nababan	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	81263336199
RIZKY FIRDAUS	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	81275481211

Andreansyahputra	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82295144356
Yuhendti	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	81365917111
Agung sedayu	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82277852821
Ahsanul arif ihza Ananda	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82289137624
Raby rizky	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	82398251861
Echa septi audilla	16 - 25 Tahun	Perempuan	SMA	Instansi/Lembaga	82128569894
Yuhendri	46 - 55 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	81365917111
HELMI	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	82269563916
Boby abdi gunawan	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	S-1	Perusahaan Industri	82261039465
M. ILHAM	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	85384813269
Deki putrawan	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	82287841671
M ALDHO FEBRIANSYAH	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	83160501740
Dedi prasetia	26 - 35 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	81264889519
Riki marsel	16 - 25 Tahun	Laki-Laki	SMA	Perusahaan Industri	85274598064



## INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	004	019	579340	BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN	Nilai	100.00	90.10	94.67	100.00	100.00	99.98	100.00	97.45	100%	0.00	97.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.52	18.93	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.05		98.66				100.00				

## NOTA DINAS

NOMOR 96/SJ-IND.2/KP/I/2026

Yth. : (terlampir)  
Dari : Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi  
Hal : Penyampaian Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Tahun 2025  
di Lingkungan Kementerian Perindustrian  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Tanggal : 12 Januari 2026

Sehubungan dengan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) tahun 2025 Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi telah mengembangkan perhitungan IPASN Mandiri, yang merupakan nilai indeks atas kondisi *real-time*, artinya IPASN tahun 2025 menggambarkan kondisi pada tahun 2025.
2. Dasar perhitungan IPASN Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
3. Capaian IPASN Mandiri pada Intranew merupakan dasar pengukuran capaian perjanjian kinerja tahun anggaran berkenaan.
4. Capaian IPASN setiap unit kerja Kementerian Perindustrian tahun 2025 dapat dilihat pada intranew > Sistem Informasi Kepegawaian > IPASN > IPASN Mandiri.
5. Penghitungan IPASN dilakukan dengan batas waktu (*cut off*) data per tanggal 31 Desember 2025.
6. Terlampir hasil akhir pengukuran IPASN unit kerja Kementerian Perindustrian tahun 2025 (lampiran 2).

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi, SDM,  
dan Reformasi Birokrasi



Feby Setyo Haryono

Lampiran 1 Surat Dinas Kepala Biro  
Organisasi, SDM, dan  
Reformasi Birokrasi

Nomor : 96/SJ-IND.2/KP/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Kepada Yth.

1. Para Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
  2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
  3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
  4. Sekretaris BSKJI;
  5. Sekretaris BPSDMI;
  6. Para Kepala Balai Besar;
  7. Para Kepala BSPJI;
  8. Para Kepala Balai Diklat Industri;
  9. Para Pimpinan Unit Pendidikan;
  10. Kepala BPIPI; dan
  11. Kepala BPIFK.
- di lingkungan Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Organisasi, SDM, dan  
Reformasi Birokrasi



Feby Setyo Haryono

Lampiran 2 Surat Dinas Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 96/SJ-IND.2/KP/II/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Rata-rata nilai IPASN Unit Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1	Sekretariat Jenderal	436	21,88	29,31	25,68	4,97	81,84
2	Biro Perencanaan	47	23,19	27,81	26,28	4,89	82,17
3	Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi	38	22,24	30,53	26,97	5,00	84,74
4	Biro Keuangan	37	23,11	31,08	25,00	5,00	84,19
5	Biro Hukum	40	21,63	28,63	25,88	5,00	81,13
6	Biro Hubungan Masyarakat	32	21,88	29,16	25,31	4,81	81,16
7	Biro Umum	137	21,20	28,20	25,37	5,00	79,77
8	Pusat Data dan Informasi	44	21,14	33,39	25,11	5,00	84,64
9	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	33	21,82	27,85	25,61	5,00	80,27
10	Pusat Industri Halal	29	22,59	29,55	26,38	5,00	83,52
11	Direktorat Jenderal Industri Agro	126	22,58	27,46	26,43	4,97	81,44
12	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro	44	22,27	27,82	26,70	4,91	81,70
13	Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	21	22,62	26,95	26,43	5,00	81,00
14	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	22	22,50	25,09	27,27	5,00	79,86
15	Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	22	22,95	31,59	26,36	5,00	85,91
16	Direktorat Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan	17	22,94	24,88	24,71	5,00	77,53
17	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	156	21,92	26,74	27,02	4,99	80,67
18	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	33	21,36	22,58	26,21	5,00	75,15
19	Direktorat Industri Kimia Hulu	31	22,74	32,61	28,87	5,00	89,23
20	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	32	22,19	26,88	26,56	4,94	80,56

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
21	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	30	21,50	28,03	26,33	5,00	80,87
22	Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki	29	21,72	23,97	27,24	5,00	77,93
23	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	189	22,46	26,46	28,25	4,98	82,15
24	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	53	22,64	27,42	29,06	5,00	84,11
25	Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	36	22,36	27,47	29,44	4,92	84,19
26	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	31	22,90	27,74	29,52	5,00	85,16
27	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika	34	22,35	25,82	25,88	5,00	79,06
28	Direktorat Industri Logam	35	22,00	23,43	27,00	5,00	77,43
29	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	178	22,19	28,18	25,98	4,99	81,34
30	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	46	21,96	28,17	26,85	5,00	81,98
31	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	29	22,41	27,76	26,21	5,00	81,38
32	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	27	22,22	27,22	25,93	5,00	80,37
33	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	25	22,40	27,40	25,60	5,00	80,40
34	Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	36	21,67	29,72	25,00	4,94	81,33
35	Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya	2	25,00	30,00	25,00	5,00	85,00
36	Direktorat Industri Aneka	13	23,08	28,08	26,15	5,00	82,31
37	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	160	22,59	26,57	25,63	4,96	79,75
38	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	47	22,55	27,36	25,21	4,94	80,06
39	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	34	22,94	27,85	25,29	4,91	81,00

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
40	Direktorat Perwilayahan Industri	27	22,41	26,48	26,11	5,00	80,00
41	Direktorat Akses Industri Internasional	29	21,90	24,21	25,86	5,00	76,97
42	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	23	23,26	26,13	26,09	5,00	80,48
43	Inspektorat Jenderal	105	22,81	29,58	24,81	4,95	82,15
44	Sekretariat Inspektorat Jenderal	34	22,79	29,03	25,74	5,00	82,56
45	Inspektorat I	16	22,81	30,75	25,00	5,00	83,56
46	Inspektorat II	15	22,67	31,47	25,00	5,00	84,13
47	Inspektorat III	13	23,46	31,85	25,00	4,85	85,15
48	Inspektorat IV	15	23,00	29,27	24,67	5,00	81,93
49	Inspektorat Investigasi	12	22,08	25,17	21,67	4,75	73,67
50	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	2001	21,69	30,25	25,36	5,00	82,30
51	Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	41	22,93	28,17	25,85	5,00	81,95
52	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	23	22,17	25,87	25,65	5,00	78,70
53	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	27	22,22	25,85	25,56	5,00	78,63
54	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	25	22,40	28,76	28,20	5,00	84,36
55	Pusat Industri Hijau	23	22,83	25,87	25,00	5,00	78,70
56	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	107	21,96	31,22	25,05	5,00	83,23
57	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	122	21,48	26,64	24,92	5,00	78,03
58	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	82	22,38	32,48	27,38	5,00	87,23
59	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	88	21,42	29,64	25,85	5,00	81,91
60	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	124	21,49	31,48	25,32	5,00	83,30

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
61	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	92	21,96	30,25	25,00	5,00	82,21
62	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	114	20,57	28,80	24,87	5,00	79,24
63	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	109	22,29	32,47	25,64	5,00	85,40
64	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	106	21,75	32,79	25,09	5,00	84,63
65	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	101	21,53	31,69	25,20	5,00	83,43
66	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	81	21,79	30,43	26,48	5,00	83,70
67	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh	56	21,07	27,05	25,36	5,00	78,48
68	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	67	21,49	25,39	25,22	5,00	77,10
69	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	58	22,59	31,02	25,00	5,00	83,60
70	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	67	22,01	34,48	25,37	5,00	86,87
71	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	55	21,73	31,55	25,00	5,00	83,27
72	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	86	21,80	33,08	25,06	4,98	84,92
73	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	72	21,18	34,19	24,65	5,00	85,03
74	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	50	20,50	29,60	25,00	4,96	80,06
75	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	53	21,70	28,64	25,19	5,00	80,53

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
76	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	54	21,30	27,57	25,00	5,00	78,87
77	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	40	21,25	23,68	25,00	5,00	74,93
78	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	45	22,33	30,93	25,11	5,00	83,38
79	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	34	20,88	32,03	25,15	5,00	83,06
80	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	2178	21,54	29,16	25,56	4,99	81,26
81	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	43	22,67	24,35	26,63	5,00	78,65
82	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	29	22,59	22,79	25,34	5,00	75,72
83	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	27	22,04	23,59	25,19	5,00	75,81
84	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur	24	23,13	23,33	25,00	5,00	76,46
85	Balai Diklat Industri Medan	31	21,77	27,90	26,94	5,00	81,61
86	Balai Diklat Industri Padang	26	21,15	28,54	25,19	5,00	79,88
87	Balai Diklat Industri Jakarta	28	22,50	30,21	26,61	4,93	84,25
88	Balai Diklat Industri Yogyakarta	32	22,66	32,25	29,38	5,00	89,28
89	Balai Diklat Industri Surabaya	31	22,26	31,03	25,97	5,00	84,26
90	Balai Diklat Industri Makassar	31	22,42	30,68	25,16	5,00	83,26
91	Balai Diklat Industri Denpasar	25	22,20	33,56	28,00	5,00	88,76
92	Politeknik STMI Jakarta	101	20,99	31,03	25,50	5,00	82,51
93	Politeknik STTT Bandung	117	21,37	30,42	24,91	5,00	81,70
94	Politeknik AKA Bogor	134	20,86	26,10	24,89	5,00	76,84
95	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	100	21,40	28,50	26,35	5,00	81,25
96	Politeknik ATI Padang	121	21,20	27,45	25,04	5,00	78,69
97	Politeknik ATK Yogyakarta	120	21,08	32,63	25,38	5,00	84,08
98	Politeknik APP Jakarta	79	21,14	28,41	25,38	5,00	79,92
99	Politeknik ATI Makassar	111	21,31	28,96	26,35	5,00	81,62
100	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor	105	20,86	33,63	25,05	5,00	84,53

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
101	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Padang	88	21,70	27,69	25,11	5,00	79,51
102	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar	68	21,54	34,12	25,51	5,00	86,18
103	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh	73	22,53	25,99	25,21	5,00	78,73
104	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Makassar	100	21,55	34,80	26,20	5,00	87,55
105	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta	77	22,27	31,96	24,87	5,00	84,10
106	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung	77	22,66	21,16	25,45	5,00	74,27
107	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang	55	22,73	27,13	25,00	5,00	79,85
108	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak	75	21,00	26,61	25,67	4,79	78,07
109	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	55	21,55	29,60	25,45	5,00	81,60
110	Politeknik Industri Logam Morowali	56	21,16	28,13	25,09	5,00	79,38
111	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	51	20,98	31,75	25,10	4,94	82,76
112	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	55	21,09	30,05	26,18	5,00	82,33
113	Politeknik Industri Petrokimia Banten	33	20,61	27,88	26,06	4,91	79,45
<b>Kementerian Perindustrian</b>		<b>5532</b>	<b>21,76</b>	<b>29,27</b>	<b>25,65</b>	<b>4,99</b>	<b>81,67</b>

Nomor : B/1088/SJ-IND.3/KU/IX/2025  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Laporan  
Keuangan Tingkat Satker dan Unit Eselon I

Jakarta, 4 September 2025

Yth.  
(daftar terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan kewajiban penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 yang mengamanatkan bahwa laporan keuangan harus disusun secara andal, relevan, dapat dipahami, dan disajikan secara wajar, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2020 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, khususnya Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 9 yang menegaskan kewajiban satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP, maka dipandang perlu dilakukan evaluasi terhadap kualitas laporan keuangan pada tingkat satuan kerja dan unit eselon I.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi dimaksud, Biro Keuangan telah menyelenggarakan Workshop Penilaian Laporan Keuangan pada tanggal 25 Agustus 2025 dengan melibatkan 57 satuan kerja dan 9 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan informasi, efektivitas pengendalian internal, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bersama surat ini, kami sampaikan hasil Penilaian Laporan Keuangan TA 2024 tingkat Satuan Kerja dan Eselon I sebagai bahan evaluasi agar kualitas laporan keuangan dapat semakin ditingkatkan guna mendukung pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian.

Khusus bagi Unit Eselon I yang membawahi satuan kerja, kami harapkan dapat menyampaikan hasil penilaian ini kepada satker di lingkungannya sebagai bahan perbaikan dan tindak lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

↓ Plh. Kepala Biro Keuangan



Riefky Yuswandi

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal.

Lampiran I Surat : Penyampaian Hasil  
Penilaian Laporan Keuangan  
Tingkat Satker dan Unit Eselon  
Nomor : B/1088/SJ-IND.3/KU/IX/2025  
Tanggal : 4 September 2025

#### DAFTAR LAMPIRAN

1. Kepala Pusdatin;
2. Kepala Pusat P3DN;
3. Kepala Pusat Industri Halal;
4. Sekretaris Ditjen Industri Agro;
5. Sekretaris Ditjen IKFT;
6. Sekretaris Ditjen ILMATE;
7. Sekretaris Ditjen IKMA;
8. Sekretaris Itjen;
9. Sekretaris BSKJI;
10. Sekretaris Ditjen KPAIL;
11. Sekretaris BPSDMI.

Plh. Kepala Biro Keuangan



Riefky Yuswandi

Lampiran II Surat : Penyampaian Hasil  
Penilaian Laporan Keuangan  
Tingkat Satker dan Unit Eselon I  
Nomor : B/1088/SJ-IND.3/KU/IX/2025  
Tanggal : 4 September 2025

**NILAI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT ESELON I  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

<b>No.</b>	<b>NAMA UNIT ESELON 1</b>	<b>NILAI</b>
1	ITJEN	92.00
2	SETJEN	91.00
3	DITJEN IKMA	91.00
4	DITJEN ILMATE	90.00
5	BSKJI	89.90
6	DITJEN KPAII	89.25
7	BPSDMI	87.63
8	DITJEN IKFT	86.75
9	DITJEN IA	86.25

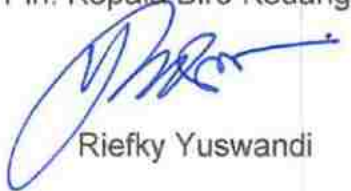
**NILAI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATUAN KERJA  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA SATUAN KERJA</b>	<b>NILAI</b>
1	BDI YOGYAKARTA	98.00
2	SMK SMAK PADANG	98.00
3	ATK YOGYAKARTA	98.00
4	BSPJI BANJARBARU	97.00
5	STTT BANDUNG	97.00
6	SMTI YOGYAKARTA	96.75
7	BSPJI SURABAYA	96.75
8	PUSAT INDUSTRI HALAL	96.50
9	BSPJI BANDA ACEH	96.50
10	BDI SURABAYA	96.00
11	BBSPJI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM DAN MARITIM	96.00
12	BSPJI MEDAN	95.90
13	SMK SMTI BANDAR LAMPUNG	95.50
14	BDI MEDAN	95.50

<b>NO.</b>	<b>NAMA SATUAN KERJA</b>	<b>NILAI</b>
15	ATI PADANG	95.25
16	BBSPJI KERAJINAN DAN BATIK	95.00
17	BSPJI PALEMBANG	95.00
18	BBSPJI SELULOSA	95.00
19	AKOM SURAKARTA	94.90
20	BBSPJI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI	94.75
21	BSPJI AMBON	94.25
22	BSPJI PONTIANAK	94.25
23	BBSPJI KULIT KARET DAN PLASTIK	94.00
24	BDI JAKARTA	94.00
25	BDI MAKASSAR	93.75
26	ATI MAKASSAR	93.40
27	BSPJI BANDAR LAMPUNG	93.40
28	AKOM BANTAENG	93.25
29	BBSPJI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN	93.25
30	BBSPJI AGRO	93.00
31	PTKI MEDAN	93.00
32	BBSPJI LOGAM DAN MESIN	92.50
33	SMAK BOGOR	92.40
34	BSPJI PEKANBARU	92.25
35	BDI DENPASAR	92.25
36	BBSPJI TEKSTIL	92.00
37	BSPJI SAMARINDA	92.00
38	SMTI BANDA ACEH	92.00
39	SMK SMTI PADANG	91.50
40	POLTEK KENDAL	91.00
41	BBSPJI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	91.00
42	BPIPI Sidoarjo	90.90
43	AKA BOGOR	90.75
44	BBSPJI KERAMIK & MINERAL NON LOGAM	90.25
45	POLTEK STMI JAKARTA	90.00
46	POLTEK LOGAM MOROWALI	89.40
47	BSPJI MANADO	88.55
48	BSPJI PADANG	88.25
49	SMTI PONTIANAK	87.75
50	BDI PADANG	87.25
51	SMTI MAKASSAR	86.75
52	BSPJI JAKARTA	86.50
53	APP JAKARTA	85.00
54	PUSAT P3DN	84.50

NO.	NAMA SATUAN KERJA	NILAI
55	SMAK MAKASSAR	83.40
56	PUSDATIN	80.00
57	POLTEK BANTEN	75.00

↓ Plh. Kepala Biro Keuangan



Riefky Yuswandi

NOTA DINAS  
NOMOR 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026

Yth. : (Daftar Terlampir)  
Dari : Kepala Pusat Data dan Informasi  
Hal : Hasil Akhir Penilaian Perkin SPBE Tahun 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 2 Januari 2026

Sehubungan dengan penilaian Perkin SPBE tahun 2025 di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan Nilai Sementara Perkin SPBE Tahun 2025 pada hari, Senin 22 Desember 2025.
2. Telah dilaksanakan klarifikasi dan perbaikan data dukung LKE SPBE Tahun 2025 pada hari Senin – Rabu, 22 – 24 Desember 2025.
3. Periode revisi dan perbaikan data dukung dilaksanakan pada tanggal 22 – 30 Desember 2025.
4. Hasil akhir penilaian Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektorial Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran II.
5. Hasil akhir penilaian Tingkat Penerapan SPBE Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran III.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ikhsan Pranoto (HP. 087792099908)

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Informasi



Bambang Riznanto

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal.

Lampiran I Nota Dinas

Nomor : 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG MENERIMA NOTA DINAS

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional
7. Sekretaris Badan Standardsasi dan Kebijakan Jasa Industri
8. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
9. Kepala Biro Perencanaan
10. Kepala Biro Umum
11. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
12. Kepala Biro Hukum
13. Kepala Biro Keuangan
14. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi
15. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
16. Kepala Pusat Industri Halal
17. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
18. Kepala Pusat Industri Halal
19. Para Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
20. Para Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
21. Para Kepala Balai Diklat Industri
22. Para Direktur Politeknik dan Akademik Komunitas
23. Para Kepala Unit Pendidikan
24. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia
25. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya

Kepala Pusat Data dan Informasi



Bambang Riznanto

Lampiran II Nota Dinas

Nomor : 2/SJ-IND.7/TIK/II/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**Hasil Akhir Penilaian Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral  
Tahun 2025**

No	Unit Organisasi	Nilai Sementara	Nilai Akhir
1	Direktorat Jenderal Industri Agro	15,96	73,56
2	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil	28,10	44,19
3	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika	20,19	54,62
4	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Dan Aneka	76,82	83,24
5	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan Dan Akses Industri Internasional	13,81	69,18
6	Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri	74,44	91,40
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	71,06	86,35

Kepala Pusat Data dan Informasi



Bambang Riznanto

Lampiran III Nota Dinas

Nomor : 2/SJ-IND.7/TIK/II/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**Hasil Akhir Penilaian Tingkat Penerapan SPBE Tahun 2025**

No	Unit Organisasi	Nilai Sementara	Nilai Akhir
1	Inspektorat Jenderal	22	82,50
2	Biro Perencanaan	0	0
3	Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi	79,5	79,50
4	Biro Keuangan	15	68,00
5	Biro Hukum	0	33,00
6	Biro Hubungan Masyarakat	84,8	84,80
7	Biro Umum	0	13,50
8	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0
9	Pusat Industri Halal	72,79	81,54
10	Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	77,34	83,87
11	Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya	64,50	78,77
12	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	69,88	87,85
13	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	37,60	78,30
14	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	62,88	77,58
15	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	70,41	94,43
16	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	31,45	67,17
17	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	44,26	99,32
18	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	25,89	81,58
19	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	0	66,20
20	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	73,91	91,18
21	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	57,21	88,81
22	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	25,94	82,26
23	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh	56,9	85,08
24	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	59,1	88,22
25	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	75,96	86,50

No	Unit Organisasi	Nilai Sementara	Nilai Akhir
26	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	75,12	92,22
27	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	37,25	82,87
28	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	72,4	90,81
29	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	63,27	91,82
30	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	49,98	68,28
31	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	54,48	87,19
32	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	39,69	71,04
33	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	18,58	44,55
34	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	9,54	40,65
35	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	64,22	84,72
36	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	42,58	63,25
37	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	58,11	83,28
38	Politeknik ATI Padang	29,8	59,87
39	Politeknik ATI Makassar	63,03	100,00
40	Politeknik AKA Bogor	22,19	61,23
41	Politeknik ATK Yogyakarta	51,18	78,50
42	Politeknik APP Jakarta	0	12,04
43	Politeknik STMI Jakarta	55,53	88,90
44	Politeknik STTT Bandung	16,75	55,50
45	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	0	49,07
46	Politeknik Industri Logam Morowali	80,08	83,65
47	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	20,54	75,05
48	Politeknik Industri Petrokimia Banten	0	7,92
49	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor	57,36	70,43
50	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Padang	37,68	75,78
51	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar	0	49,53
52	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh	0	3,04
53	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Makassar	0	20,78
54	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta	70,74	80,74
55	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung	46,51	73,21
56	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang	0	24,79
57	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak	42,86	76,06
58	Balai Diklat Industri Medan	64,98	83,28
59	Balai Diklat Industri Padang	66,7	87,63
60	Balai Diklat Industri Jakarta	0	40,17
61	Balai Diklat Industri Yogyakarta	56,76	87,03
62	Balai Diklat Industri Surabaya	60,37	75,51

No	Unit Organisasi	Nilai Sementara	Nilai Akhir
63	Balai Diklat Industri Makassar	0	82,32
64	Balai Diklat Industri Denpasar	13,7	79,15

Keterangan:

\*Nilai 0 karena tidak ada bukti dukung yang diupload

Kepala Pusat Data dan Informasi



Bambang Riznanto

NOTA DINAS  
Nomor **41** /SJ-IND.4/HK/1/2026

Yth. : Daftar Terlampir  
Dari : Kepala Biro Hukum  
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Nomor 5405 tahun 2025 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : **12** Januari 2026.

Sehubungan dengan telah ditetapkan keputusan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 5405 tahun 2025 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025

Bersama ini terlampir kami sampaikan salinan sesuai dengan aslinya dari Keputusan Menteri dimaksud untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

Lampiran

Nomor : A1/SJ-IND.4/HK/1/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

#### Daftar Terlampir

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
3. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
4. Politeknik APP Jakarta
5. Politeknik ATK Yogyakarta
6. Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
7. Politeknik AKA Bogor
8. Balai Diklat Industri Medan
9. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh
10. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon
11. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5405 TAHUN 2025

TENTANG

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi, terutama terkait pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima, perlu dibangun zona integritas pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa dengan adanya perwujudan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu diberikan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah memenuhi syarat dan kriteria penetapan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, tim penilai internal Kementerian Perindustrian telah melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang membangun zona integritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025.

KEDUA : Pimpinan dan seluruh pegawai pada unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan

pembangunan zona integritas dan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) serta melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan unit kerja masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perindustrian sesuai bidang tugasnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5405 TAHUN 2025  
TENTANG  
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

1. Politeknik APP Jakarta
2. Politeknik ATK Yogyakarta
3. Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
4. Politeknik AKA Bogor
5. Balai Diklat Industri Medan
6. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh
7. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon
8. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



*Ikana Yossye Ardianingsih*

NOTA DINAS  
NOMOR 855/SJ-IND.6/KR/XII/2025

Yth. : Daftar Terlampir  
Dari : Kepala Biro Umum  
Hal : Penyampaian Pengumuman Nilai Hasil Pengawasan  
Kearsipan Internal Pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah  
Satuan Kerja Daerah Tahun 2025  
Lampiran : 9 (Sembilan) Lembar  
Tanggal : 18 Desember 2025

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kearsipan, dengan ini kami informasikan bahwa Unit Kearsipan I Kementerian Perindustrian telah menyelesaikan pengawasan kearsipan internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Daerah Tahun 2025. Adapun rata-rata hasil penilaiannya adalah sebagai berikut:

NO	Nilai	Jumlah Satker	
		UP	UK
1	<60	2	0
2	60,1 - 70	3	3
3	70,1 - 80	16	14
4	80,1 - 90	19	18
5	90,1 - 100	15	19
	Total	55	54

Terkait hasil penilaian, jumlah Unit Pengolah Satker Daerah dengan nilai di bawah 60 mengalami penurunan signifikan menjadi 3,64%, jauh berkurang dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 36% (18 unit). Tren positif ini juga terlihat pada Unit Kearsipan Satker Daerah tahun 2025, di mana seluruh unit berhasil mencapai nilai di atas 60. Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan nilai Perjanjian Kinerja pada Unit Kerja Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 beserta catatan tindak lanjut untuk unit Saudara. Hasil ini merupakan gambaran menyeluruh atas penyelenggaraan kearsipan yang mencakup aspek penerapan aplikasi Srikandi, penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan arsip, serta kesiapan SDM dan sarana prasarana, baik pada lokus Unit Kearsipan maupun Unit Pengolah Arsip.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Umum,



Arnes Lukman

Tembusan:

Sekretaris Jenderal

Lampiran Nota Dinas  
Nomor : 855/SJ-IND.6/KR/XII/2025  
Tanggal : 18 Desember 2025

Yth.

1. Sekretaris BSKJI;
2. Sekretaris BPSDMI;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA;
4. Para Kepala BBSPJI;
5. Para Kepala BSPJI;
6. Para Direktur Politeknik/Akom;
7. Para Kepala SMK – SMAK/SMTI;
8. Para Kepala Balai Diklat Industri;
9. Kepala BPIPI Sidoarjo; dan
10. Kepala BPIFK Denpasar.

Kepala Biro Umum,



Arnes Lukman

**PENGUMUMAN**

**NOMOR 55 /SJ-IND/KR/XII/2025**

**TENTANG**

**NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL  
PADA UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH SATUAN KERJA DAERAH  
TAHUN 2025**

Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan serta Peraturan Arsip Nasional No 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, serta Berita Acara Verifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pada Unit Kearsipan Dan Unit Pengolah Satuan Kerja Daerah NOMOR 805/SJ-IND.6/KR/XI/2025, bersama ini kami sampaikan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pada Unit Kearsipan Dan Unit Pengolah Satuan Kerja Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
A	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI)	
1	BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan- Jakarta (UK)	89.40
2	BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan- Jakarta (UP)	65.27
3	BBSPJI Agro Bogor (UK)	89.50
4	BBSPJI Agro Bogor (UP)	90.25
5	BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam Bandung (UK)	93.67
6	BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam Bandung (UP)	89.62
7	BBSPJI Selulosa Bandung (UK)	92.90

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
8	BBSPJI Selulosa Bandung (UP)	89.04
9	BBSPJI Tekstil Bandung (UK)	91.50
10	BBSPJI Tekstil Bandung (UP)	73.45
11	BBSPJI Logam dan Mesin Bandung (UK)	86.20
12	BBSPJI Logam dan Mesin Bandung (UP)	80.66
13	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik Bandung (UK)	93.00
14	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik Bandung (UP)	90.92
15	BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri Semarang (UK)	86.47
16	BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri Semarang (UP)	78.53
17	BBSPJI Kerajinan dan Batik Jogja (UK)	97.00
18	BBSPJI Kerajinan dan Batik Jogja (UP)	96.70
19	BBSPJI Kulit, Karet dan Plastik Jogja (UK)	95.77
20	BBSPJI Kulit, Karet dan Plastik Jogja (UP)	96.73
21	BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim Makassar (UK)	91.60
22	BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim Makassar (UP)	98.80
B	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI)	
1	BSPJI Surabaya (UK)	82.83
2	BSPJI Surabaya (UP)	78.35
3	BSPJI Medan (UK)	75.67
4	BSPJI Medan (UP)	90.16
5	BSPJI Padang (UK)	86.20
6	BSPJI Padang (UP)	76.20
7	BSPJI Lampung (UK)	84.80
8	BSPJI Lampung (UP)	70.05

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
9	BSPJI Palembang (UK)	93.97
10	BSPJI Palembang (UP)	94.70
11	BSPJI Samarinda (UK)	100
12	BSPJI Samarinda (UP)	94.78
13	BSPJI Pontianak (UK)	81.47
14	BSPJI Pontianak (UP)	70.44
15	BSPJI Banjar Baru (UK)	91.60
16	BSPJI Banjar Baru (UP)	84.25
17	BSPJI Pekanbaru (UK)	93.97
18	BSPJI Pekanbaru (UP)	92.33
19	BSPJI Jakarta (UK)	94.27
20	BSPJI Jakarta (UP)	87.11
21	BSPJI Manado (UK)	97.60
22	BSPJI Manado (UP)	80.25
23	BSPJI Ambon (UK)	72.10
24	BSPJI Ambon (UP)	80.80
25	BSPJI Banda Aceh (UK)	91.00
26	BSPJI Banda Aceh (UP)	84.55
C	Politeknik	
1	Politeknik STMI Jakarta (UK)	62.70
2	Politeknik STMI Jakarta (UP)	76.80
3	Politeknik APP Jakarta (UK)	83.40
4	Politeknik APP Jakarta (UP)	83.47
5	Politeknik AKA Bogor (UK)	92.10

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
6	Politeknik AKA Bogor (UP)	95.01
7	Politeknik STTT Bandung (UK)	81.30
8	Politeknik STTT Bandung (UP)	80.77
9	Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal (UK)	74.17
10	Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal (UP)	81.02
11	Politeknik ATK Jogja (UK)	82.57
12	Politeknik ATK Jogja (UP)	85.90
13	Politeknik ATI Padang (UK)	75,70
14	Politeknik ATI Padang (UP)	71.40
15	Politeknik ATI Makasar (UK)	85.30
16	Politeknik ATI Makasar (UP)	88.54
17	AKOM Ind Manuf Bantaeng (UK)	78.17
18	AKOM Ind Manuf Bantaeng (UP)	84.35
19	Politeknik Ind Morowali (UK)	61.47
20	Politeknik Ind Morowali (UP)	57.82
21	Akom Solo (UK)	75.77
22	Akom Solo (UP)	80.82
23	PTKI Medan (UK)	82.63
24	PTKI Medan (UP)	83.05
25	Politeknik Petrokimia Cilegon (UK)	78.82
26	Politeknik Petrokimia Cilegon (UP)	59.91
D	Balai Diklat Industri (BDI)	
1	BDI Jakarta (UK)	96.67
2	BDI Jakarta (UP)	92.60

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
3	BDI Yogyakarta (UK)	86.80
4	BDI Yogyakarta (UP)	84.50
5	BDI Surabaya (UK)	75.10
6	BDI Surabaya (UP)	90.70
7	BDI Makassar (UK)	88.67
8	BDI Makassar (UP)	92.51
9	BDI Denpasar (UK)	96.67
10	BDI Denpasar (UP)	96.04
11	BDI Padang (UK)	90.67
12	BDI Padang (UP)	87.23
13	BDI Medan (UK)	93.67
14	BDI Medan (UP)	95.63
E	Sekolah Menengah	
1	SMK-SMAK Bogor (UK)	88.00
2	SMK-SMAK Bogor (UP)	90.03
3	SMK-SMTI Yogyakarta (UK)	76.30
4	SMK-SMTI Yogyakarta (UP)	79.45
5	SMK- SMAK Padang (UK)	66.60
6	SMK- SMAK Padang (UP)	76.93
7	SMK-SMTI Banda Aceh (UK)	75.27
8	SMK-SMTI Banda Aceh (UP)	60.16
9	SMK-SMTI Pontianak (UK)	73.17
10	SMK-SMTI Pontianak (UP)	73.41
11	SMK-SMAK Makassar (UK)	77.23

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
12	SMK-SMAK Makassar (UP)	74.38
13	SMK-SMTI Makassar (UK)	82.30
14	SMK-SMTI Makassar (UP)	78.66
15	SMK-SMTI Padang (UK)	71.77
16	SMK-SMTI Padang (UP)	78.87
17	SMK-SMTI Lampung (UK)	75.67
18	SMK-SMTI Lampung (UP)	70.92
F	Satker Ditjen. IKMA	
1	BPIPI Sidoarjo (UK)	85.30
2	BPIPI Sidoarjo (UP)	76.00
3	BPIKFK (UP)	78.42

Catatan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Catatan yang harus dipertahankan:
  - a. Koordinasi penyelenggaraan kearsipan dengan Unit Kearsipan I;
  - b. Ketersediaan ruang pengolahan arsip yang terpisah dari ruang kerja;
  - c. Ketersediaan media dan ruang penyimpanan arsip yang dilengkapi sarana dan prasarana sesuai ketentuan.
2. Catatan yang harus diperbaiki :
  - a. Memperhatikan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja untuk menjamin tersusunnya dokumen pelaksanaan program dan kegiatan, agar informasi substantif dan fasilitasi mudah diperoleh;
  - b. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pembuatan naskah dinas (konvensional maupun elektronik) untuk penciptaan arsip;
  - c. Penggunaan aplikasi Srikandi mencakup seluruh siklus hidup arsip, mulai dari Penciptaan hingga Penyusutan;

- d. Tersedia arsip aktif dan inaktif serta sistem pencatatan layanan arsip (konvensional dan elektronik) untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal. Pengelolaan arsip tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Klasifikasi dan Keamanan Arsip Dinamis sesuai dengan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Bidang Fasilitatif di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- e. Pengelolaan arsip aktif (konvensional dan elektronik) dilakukan dengan pemberkasan berdasarkan kegiatan substansi unit kerja, dengan output menyusun Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas sesuai format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- f. Melaporkan Daftar Arsip Aktif (konvensional maupun elektronik) kepada Unit Kearsipan sesuai kewenangan masing-masing, yang dilakukan setiap enam bulan sekali;
- g. Memperhatikan masa retensi arsip aktif sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip.
- h. Pengelolaan arsip vital melalui penyusunan daftar arsip vital dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- i. Melaksanakan alih media arsip aktif dan inaktif yang permanen sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018;
- j. Pengelolaan arsip inaktif, termasuk penyusunan Daftar Arsip Inaktif, dilaksanakan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- k. Mengoptimalkan fungsi record center untuk menyimpan arsip inaktif dan memenuhi persyaratan peralatan kearsipan yang diperlukan;
- l. Memperhatikan masa retensi arsip inaktif sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
- m. Penyusutan arsip dilaksanakan secara berkala melalui penyusunan Daftar Arsip Usul Musnah dan Daftar Arsip Usul Serah, sesuai dengan Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA);

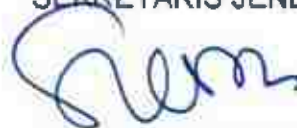
- n. Mengikutsertakan Arsiparis dalam kegiatan pengembangan kompetensi, seperti Sertifikasi Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional dan Teknis;
- o. Mengajukan rekrutmen pengadaan CPNS untuk unit kerja yang belum memenuhi kebutuhan Arsiparis di Unit Pengolah dan Unit Kearsipan;
- p. Memastikan semua sarana dan prasarana pengelolaan arsip dapat berfungsi dengan baik.

Sehubungan dengan pengumuman ini, kami mengharapkan seluruh Pimpinan Unit Kerja Daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian menyelenggarakan pengelolaan arsip secara berkelanjutan. Pengelolaan tersebut harus mencakup seluruh siklus hidup arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan. Penyelenggaraan kearsipan yang akuntabel sangat penting untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL, 



EKO S. A. CAHYANTO

Tembusan:

- 1. Para Pimpinan Tinggi Madya
- 2. Ses. Ditjen IKMA
- 3. Ses. BPSDMI
- 4. Ses. BSKJI

NOTA DINAS

NOMOR 55/SJ-IND.3/KU/II/2026

Yth. : Daftar Terlampir  
Dari : Kepala Biro Keuangan  
Hal : Penyampaian Realisasi Nilai IKPA dan Hasil Penilaian Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025  
Tanggal : 15 Januari 2026  
Lampiran : 3 (tiga) Berkas

Dalam rangka pengukuran sasaran kinerja nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Penilaian Laporan Keuangan Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian realisasi nilai IKPA pada level Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja bersumber dari *website* SPAN Kemenkeu dengan batas waktu (*cut-off*) per 15 Januari 2025.
2. Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja juga dapat mengakses *update* capaian nilai IKPA pada *website* SPAN melalui akun Unit Kerja Eselon I atau satuan kerja masing-masing.
3. Capaian realisasi tahun 2025 pada indikator Penilaian Laporan Keuangan tingkat Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja sesuai dengan hasil Workshop Penilaian Laporan Keuangan pada tanggal 25 Agustus 2025 dengan melibatkan 57 satuan kerja dan 9 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Terlampir hasil akhir capaian realisasi nilai IKPA dan Penilaian Laporan Keuangan pada Lampiran II dan III.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan



Abdulah

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan

Lampiran I

Nomor : 55/SJ-IND.1/KU/I/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Yth.

1. Para Kepala Pusat Sekretariat Jenderal
  2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
  3. Sekretaris Inspektorat Jenderal
  4. Sekretaris BSKJI
  5. Sekretaris BPSDMI
  6. Para Kepala Balai Besar
  7. Para Kepala BSPJI
  8. Para Kepala Balai Diklat Industri
  9. Para Pimpinan Unit Pendidikan
  10. Kepala BPIPI
  11. Kepala BPIFK
- di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kepala Biro Keuangan



Abdulah



**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	01907	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	Nilai	100.00	89.78	99.61	90.72	100.00	96.12	100.00	97.07	100%	0.75	96.32
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.47	19.92	9.07	10.00	9.61	25.00				
			Nilai Aspek	94.89		96.61				100.00				
2	01909	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional	Nilai	100.00	89.64	99.00	80.00	100.00	99.21	100.00	96.17	100%	0.00	96.17
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.45	19.80	8.00	10.00	9.92	25.00				
			Nilai Aspek	94.82		94.55				100.00				
3	01906	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	77.31	100.00	94.67	100.00	99.94	100.00	96.06	100%	0.00	96.06
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.60	20.00	9.47	10.00	9.99	25.00				
			Nilai Aspek	88.66		98.65				100.00				
4	01901	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	84.67	96.19	100.00	97.98	92.40	99.31	95.81	100%	0.00	95.81
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.70	19.24	10.00	9.80	9.24	24.83				
			Nilai Aspek	92.34		96.64				99.31				
5	01910	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	Nilai	100.00	89.05	93.20	89.08	100.00	95.50	99.61	95.36	100%	0.75	94.61
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.36	18.64	8.91	10.00	9.55	24.90				
			Nilai Aspek	94.53		94.44				99.61				



6	01902	Ditjen Industri Agro	Nilai	100.00	76.52	88.56	82.00	100.00	100.00	100.00	92.39	100%	0.00	92.39
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.48	17.71	8.20	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	88.26		92.64				100.00				
7	01904	DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	Nilai	100.00	70.07	91.26	89.00	98.53	89.10	100.00	91.43	100%	0.00	91.43
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	10.51	18.25	8.90	9.85	8.91	25.00				
			Nilai Aspek	85.04		91.97				100.00				
8	01903	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL	Nilai	100.00	59.40	88.12	96.67	100.00	85.19	100.00	89.72	100%	0.00	89.72
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	8.91	17.62	9.67	10.00	8.52	25.00				
			Nilai Aspek	79.70		92.50				100.00				
9	01905	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	93.33	58.88	80.08	84.00	100.00	97.15	100.00	87.30	100%	0.00	87.30
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.33	8.83	16.02	8.40	10.00	9.71	25.00				
			Nilai Aspek	76.11		90.31				100.00				



## INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	028	019	579352	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.72	100.00	99.77	100%	0.00	99.77
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.43				100.00				
2	030	019	579334	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	98.31	96.00	100.00	100.00	100.00	99.26	100%	0.00	99.26
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.66	9.60	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.58				100.00				
3	054	019	579335	POLITEKNIK ATI MAKASSAR	Nilai	100.00	90.73	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.61	100%	0.00	98.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.61	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.37		100.00				100.00				
4	135	019	247211	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	93.47	0.00	0.00	98.94	97.23	49.31	50%	0.00	98.61
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.31				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				97.23				
5	014	019	248920	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG	Nilai	100.00	94.23	100.00	0.00	100.00	95.39	100.00	88.67	90%	0.00	98.53
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	10.00	9.54	25.00				
					Nilai Aspek	97.12		98.46				100.00				



6	135	019	579344	BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	93.38	100.00	100.00	97.67	100.00	98.44	100%	0.00	98.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.68	10.00	10.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.76				100.00				
7	001	019	579345	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDA ACEH	Nilai	100.00	93.45	98.94	0.00	0.00	98.88	100.00	78.69	80%	0.00	98.37
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	19.79	0.00	0.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	96.73		98.91				100.00				
8	054	019	247403	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM, DAN MARITIM	Nilai	100.00	93.44	96.84	0.00	100.00	100.00	100.00	59.02	60%	0.00	98.36
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.72		100.00				100.00				
9	182	019	248035	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	Nilai	100.00	91.66	98.01	100.00	100.00	99.41	100.00	98.29	100%	0.00	98.29
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.75	19.60	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	95.83		99.35				100.00				
10	026	019	579349	POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU KENDAL	Nilai	100.00	89.61	99.37	0.00	100.00	100.00	100.00	88.32	90%	0.00	98.13
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.44	19.87	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.81		99.79				100.00				
11	054	019	579336	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI MAKASSAR	Nilai	100.00	91.17	100.00	0.00	0.00	97.42	100.00	78.42	80%	0.00	98.02
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.68	20.00	0.00	0.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	95.59		98.71				100.00				



12	010	019	579358	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK PADANG	Nilai	100.00	90.30	98.43	0.00	100.00	99.32	100.00	88.16	90%	0.00	97.96
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.55	19.69	0.00	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	95.15		99.25				100.00				
13	010	019	579355	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI PADANG	Nilai	100.00	93.02	100.00	0.00	100.00	91.77	100.00	88.13	90%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.95	20.00	0.00	10.00	9.18	25.00				
					Nilai Aspek	96.51		97.26				100.00				
14	017	019	579356	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDAR LAMPUNG	Nilai	100.00	91.33	98.72	100.00	100.00	94.62	100.00	97.91	100%	0.00	97.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	19.74	10.00	10.00	9.46	25.00				
					Nilai Aspek	95.67		98.33				100.00				
15	182	019	579351	POLITEKNIK APP JAKARTA	Nilai	100.00	92.81	97.11	0.00	0.00	97.65	100.00	48.92	50%	0.00	97.84
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.41		100.00				100.00				
16	045	019	247232	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU	Nilai	100.00	89.71	100.00	100.00	100.00	89.60	100.00	68.46	70%	0.00	97.80
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.86		100.00				100.00				
17	182	019	579354	ATASE PERINDUSTRIAN DI TOKYO (JEPANG)	Nilai	100.00	88.49	100.00	0.00	0.00	98.26	100.00	78.10	80%	0.00	97.62
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.27	20.00	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	94.25		99.13				100.00				



18	001	019	248124	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEH	Nilai	100.00	94.33	100.00	88.00	100.00	95.11	100.00	97.46	100%	0.00	97.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.15	20.00	8.80	10.00	9.51	25.00				
					Nilai Aspek	97.17		95.78				100.00				
19	004	019	579340	BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN	Nilai	100.00	90.10	94.67	100.00	100.00	99.98	100.00	97.45	100%	0.00	97.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.52	18.93	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.05		98.66				100.00				
20	182	019	579360	BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA	Nilai	100.00	83.16	100.00	100.00	100.00	99.59	100.00	97.43	100%	0.00	97.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.47	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	91.58		99.90				100.00				
21	030	019	579339	BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	92.64	92.40	100.00	100.00	100.00	100.00	97.38	100%	0.00	97.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.90	18.48	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.32		98.10				100.00				
22	023	019	579332	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK BOGOR	Nilai	100.00	86.23	100.00	100.00	100.00	93.96	100.00	97.33	100%	0.00	97.33
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	20.00	10.00	10.00	9.40	25.00				
					Nilai Aspek	93.12		98.49				100.00				
23	182	019	579353	ATASE PERINDUSTRIAN DI BRUSSEL (BELGIA)	Nilai	100.00	87.92	100.00	0.00	0.00	95.88	100.00	77.78	80%	0.00	97.22
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	0.00	0.00	9.59	25.00				
					Nilai Aspek	93.96		97.94				100.00				



24	022	019	248042	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL	Nilai	100.00	88.54	99.29	0.00	100.00	83.61	100.00	58.28	60%	0.00	97.14
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.28	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.27		100.00				100.00				
25	023	019	247136	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO	Nilai	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	0.00	100.00	68.00	70%	0.00	97.14
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	8.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
26	008	019	417912	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU	Nilai	100.00	86.21	99.83	93.33	100.00	97.11	100.00	96.94	100%	0.00	96.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	19.97	9.33	10.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	93.11		97.57				100.00				
27	023	019	579331	POLITEKNIK AKA BOGOR	Nilai	100.00	89.60	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	48.44	50%	0.00	96.88
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.80		100.00				100.00				
28	010	019	579359	POLITEKNIK ATI PADANG	Nilai	100.00	86.81	98.67	88.00	100.00	100.00	100.00	96.56	100%	0.00	96.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.02	19.73	8.80	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.41		96.67				100.00				
29	020	019	619101	POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN	Nilai	100.00	80.19	100.00	100.00	100.00	94.09	100.00	96.44	100%	0.00	96.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.03	20.00	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	90.10		98.52				100.00				



30	182	019	579350	POLITEKNIK STMI JAKARTA	Nilai	100.00	83.21	100.00	100.00	100.00	90.57	100.00	67.48	70%	0.00	96.40
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.48	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.61		100.00				100.00				
31	049	019	247246	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO	Nilai	100.00	81.05	99.32	100.00	100.00	92.99	100.00	96.32	100%	0.00	96.32
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.16	19.86	10.00	10.00	9.30	25.00				
					Nilai Aspek	90.53		98.08				100.00				
32	182	019	248039	DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL	Nilai	100.00	90.08	98.92	80.00	100.00	99.46	100.00	96.24	100%	0.00	96.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.51	19.78	8.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	95.04		94.60				100.00				
33	017	019	539060	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LAMPUNG	Nilai	100.00	84.91	97.98	0.00	100.00	0.00	100.00	57.74	60%	0.00	96.23
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.74	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.46		100.00				100.00				
34	004	019	247225	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN	Nilai	100.00	88.23	96.25	0.00	100.00	82.01	97.98	57.73	60%	0.00	96.22
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.23	0.00	0.00	10.00	0.00	24.50				
					Nilai Aspek	94.12		100.00				97.98				
35	182	019	247885	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Nilai	100.00	77.31	100.00	94.67	100.00	99.94	100.00	96.06	100%	0.00	96.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.60	20.00	9.47	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	88.66		98.65				100.00				



36	010	019	539053	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PADANG	Nilai	100.00	85.86	98.63	0.00	0.00	99.10	100.00	77.52	80%	1.00	95.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.88	19.73	0.00	0.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	92.93		98.87				100.00				
37	182	019	247101	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	83.95	97.01	100.00	97.80	91.14	100.00	95.89	100%	0.00	95.89
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.59	19.40	10.00	9.78	9.11	25.00				
					Nilai Aspek	91.98		96.49				100.00				
38	030	019	579333	POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA	Nilai	100.00	91.34	99.54	73.33	100.00	98.98	100.00	95.84	100%	0.00	95.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	19.91	7.33	10.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	95.67		92.96				100.00				
39	004	019	579346	POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN	Nilai	100.00	84.16	98.46	93.33	100.00	91.32	100.00	95.78	100%	0.00	95.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.62	19.69	9.33	10.00	9.13	25.00				
					Nilai Aspek	92.08		95.78				100.00				
40	052	019	579347	POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI	Nilai	100.00	82.18	97.53	100.00	100.00	87.90	100.00	95.62	100%	0.00	95.62
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.33	19.51	10.00	10.00	8.79	25.00				
					Nilai Aspek	91.09		96.36				100.00				
41	030	019	247204	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KERAJINAN DAN BATIK	Nilai	100.00	88.47	99.27	84.00	100.00	100.00	100.00	96.52	100%	1.00	95.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.27	19.85	8.40	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.24		95.82				100.00				



42	046	019	539081	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA	Nilai	100.00	83.27	94.09	93.33	100.00	0.00	100.00	66.82	70%	0.00	95.46
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.49	0.00	9.33	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.64		100.00				100.00				
43	037	019	579342	BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR	Nilai	100.00	80.14	96.88	100.00	100.00	100.00	100.00	96.40	100%	1.00	95.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.02	19.38	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.07		99.22				100.00				
44	022	019	248060	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN	Nilai	100.00	89.23	99.18	87.20	100.00	83.36	100.00	95.28	100%	0.00	95.28
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.38	19.84	8.72	10.00	8.34	25.00				
					Nilai Aspek	94.62		92.43				100.00				
45	182	019	412528	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	63.33	100.00	92.26	100.00	66.33	70%	0.00	94.76
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	6.33	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
46	030	019	247199	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK	Nilai	100.00	100.00	97.82	63.33	100.00	100.00	100.00	66.33	70%	0.00	94.76
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	6.33	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
47	022	019	247157	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KERAMIK DAN MINERAL NONLOGAM	Nilai	100.00	79.05	97.55	88.00	100.00	92.39	100.00	94.41	100%	0.00	94.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.86	19.51	8.80	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	89.53		94.49				100.00				



48	022	019	248056	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA	Nilai	100.00	72.94	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	65.94	70%	0.00	94.20
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.94	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	86.47		100.00				100.00				
49	022	019	579338	POLITEKNIK STTT BANDUNG	Nilai	100.00	88.13	91.74	0.00	0.00	0.00	93.63	46.63	50%	0.00	93.25
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41				
					Nilai Aspek	94.07		91.74				93.63				
50	182	019	247960	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	Nilai	100.00	76.52	92.64	82.00	100.00	100.00	100.00	93.21	100%	0.00	93.21
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.48	18.53	8.20	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.26		93.66				100.00				
51	182	019	579320	PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL	Nilai	100.00	76.02	92.53	80.00	100.00	98.82	100.00	92.79	100%	0.00	92.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.40	18.51	8.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	88.01		92.84				100.00				
52	056	019	579348	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG	Nilai	100.00	86.12	99.33	50.00	100.00	98.78	100.00	92.66	100%	0.00	92.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.92	19.87	5.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	93.06		87.03				100.00				
53	022	019	247140	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Nilai	100.00	75.08	97.88	0.00	0.00	0.00	100.00	46.26	50%	0.00	92.52
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.54		97.88				100.00				



54	182	019	579362	PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai	100.00	79.57	87.00	96.67	100.00	83.77	100.00	92.38	100%	0.00	92.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.94	17.40	9.67	10.00	8.38	25.00				
					Nilai Aspek	89.79		91.86				100.00				
55	165	019	247952	BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA	Nilai	100.00	83.39	98.54	50.00	100.00	100.00	100.00	92.22	100%	0.00	92.22
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.51	19.71	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.70		87.14				100.00				
56	182	019	579361	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	Nilai	100.00	71.28	94.21	84.00	100.00	91.91	99.91	92.10	100%	0.00	92.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.69	18.84	8.40	10.00	9.19	24.98				
					Nilai Aspek	85.64		92.53				99.91				
57	042	019	579357	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI PONTIANAK	Nilai	100.00	88.80	96.47	50.00	100.00	94.65	100.00	92.08	100%	0.00	92.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.32	19.29	5.00	10.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	94.40		85.28				100.00				
58	182	019	423089	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA	Nilai	100.00	70.07	94.42	89.00	98.53	89.10	100.00	92.06	100%	0.00	92.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.51	18.88	8.90	9.85	8.91	25.00				
					Nilai Aspek	85.04		92.76				100.00				
59	182	019	248628	PUSAT DATA DAN INFORMASI	Nilai	100.00	73.96	81.73	100.00	100.00	99.17	96.00	91.36	100%	0.00	91.36
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.09	16.35	10.00	10.00	9.92	24.00				
					Nilai Aspek	86.98		95.23				96.00				



60	042	019	539074	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK	Nilai	100.00	68.82	92.38	100.00	100.00	85.01	100.00	92.30	100%	1.00	91.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.32	18.48	10.00	10.00	8.50	25.00				
					Nilai Aspek	84.41		94.35				100.00				
61	026	019	247161	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI	Nilai	100.00	90.97	99.38	50.00	100.00	0.00	100.00	63.65	70%	0.00	90.92
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.65	0.00	5.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.49		100.00				100.00				
62	182	019	247982	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL	Nilai	100.00	59.40	93.19	96.67	100.00	85.19	100.00	90.73	100%	0.00	90.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.91	18.64	9.67	10.00	8.52	25.00				
					Nilai Aspek	79.70		93.76				100.00				
63	054	019	579337	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK MAKASSAR	Nilai	100.00	75.96	75.82	84.00	100.00	92.36	100.00	89.19	100%	0.00	89.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.39	15.16	8.40	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	87.98		88.04				100.00				
64	037	019	691253	BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA	Nilai	100.00	61.07	84.31	0.00	0.00	97.12	100.00	70.73	80%	0.00	88.42
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.16	16.86	0.00	0.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	80.54		90.72				100.00				
65	010	019	579343	BALAI DIKLAT INDUSTRI PADANG	Nilai	100.00	74.37	91.41	60.00	100.00	86.20	100.00	89.06	100%	1.00	88.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.16	18.28	6.00	10.00	8.62	25.00				
					Nilai Aspek	87.19		84.40				100.00				



66	061	019	248145	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON	Nilai	100.00	62.51	99.34	50.00	100.00	87.88	100.00	88.03	100%	0.00	88.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.38	19.87	5.00	10.00	8.79	25.00				
					Nilai Aspek	81.26		84.30				100.00				
67	182	019	015118	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI JAKARTA	Nilai	80.00	76.94	93.62	66.67	100.00	95.49	97.42	60.56	70%	0.00	86.52
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	8.00	11.54	0.00	6.67	10.00	0.00	24.36				
					Nilai Aspek	78.47		100.00				97.42				
68	054	019	579341	BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR	Nilai	100.00	85.12	89.98	50.00	100.00	96.56	82.50	86.05	100%	0.00	86.05
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.77	18.00	5.00	10.00	9.66	20.63				
					Nilai Aspek	92.56		84.14				82.50				
69	182	019	247949	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA	Nilai	80.00	57.24	82.20	84.00	100.00	97.66	99.14	85.98	100%	0.00	85.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	8.59	16.44	8.40	10.00	9.77	24.78				
					Nilai Aspek	68.62		90.97				99.14				

Kepala Biro Keuangan



Abdulah

Lampiran III

Nomor : 55/SJ-IND.3/KU/I/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Nilai Laporan Keuangan Tingkat Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian

NO	KODE SATKER	UNIT KERJA ESELON I	NILAI
1	247885	ITJEN	92,00
2	247101	SETJEN	91,00
3	247949	DITJEN IKMA	91,00
4	423089	DITJEN ILMATE	90,00
5	248035	BSKJI	89,90
6	248039	DITJEN KPAIL	89,25
7	579361	BPSDMI	87,63
8	247982	DITJEN IKFT	86,75
9	247960	DITJEN IA	86,25

Nilai Laporan Keuangan Tingkat Satker di Lingkungan Kementerian Perindustrian

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
1	579339	BDI YOGYAKARTA	98,00
2	579358	SMAK PADANG	98,00
3	579333	ATK YOGYAKARTA	98,00
4	247232	BSPJI BANJARBARU	97,00

<b>NO</b>	<b>KODE SATKER</b>	<b>NAMA SATKER</b>	<b>NILAI</b>
5	579338	STTT BANDUNG	97,00
6	579334	SMTI YOGYAKARTA	96,75
7	247211	BSPJI SURABAYA	96,75
8	579320	PUSAT INDUSTRI HALAL	96,50
9	248124	BSPJI BANDA ACEH	96,50
10	579344	BDI SURABAYA	96,00
11	247403	BBSPJI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM, DAN MARITIM	96,00
12	247225	BSPJI MEDAN	95,90
13	539074	BSPJI PONTIANAK	95,75
14	579356	SMK SMTI BANDAR LAMPUNG	95,50
15	579340	BDI MEDAN	95,50
16	579359	ATI PADANG	95,25
17	247204	BBSPJI KERAJINAN DAN BATIK	95,00
18	248920	BSPJI PALEMBANG	95,00
19	248056	BBSPJI SELULOSA	95,00
20	579352	AKOM SURAKARTA	94,90
21	247161	BBSPJI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI	94,75
22	248145	BSPJI AMBON	94,25
23	247199	BBSPJI KULIT, KARET, DAN PLASTIK	94,00
24	579360	BDI JAKARTA	94,00
25	579341	BDI MAKASSAR	93,75
26	579335	ATI MAKASSAR	93,40
27	539060	BSPJI BANDAR LAMPUNG	93,40
28	579348	AKOM BANTAENG	93,25

<b>NO</b>	<b>KODE SATKER</b>	<b>NAMA SATKER</b>	<b>NILAI</b>
29	412528	BBSPJI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN	93,25
30	247136	BBSPJI AGRO	93,00
31	579346	PTKI MEDAN	93,00
32	248060	BBSPJI LOGAM DAN MESIN	92,50
33	579332	SMAK BOGOR	92,40
34	417912	BSPJI PEKANBARU	92,25
35	579342	BDI DENPASAR	92,25
36	248042	BBSPJI TEKSTIL	92,00
37	539081	BSPJI SAMARINDA	92,00
38	579345	SMTI BANDA ACEH	92,00
39	579355	SMTI PADANG	91,50
40	579349	POLTEK KENDAL	91,00
41	247140	BBSPJI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	91,00
42	247952	BPIPI	90,90
43	579331	AKA BOGOR	90,75
44	247157	BBSPJI KERAMIK DAN MINERAL NONLOGAM	90,25
45	579350	STMI JAKARTA	90,00
46	579347	POLTEK MOROWALI	89,40
47	247246	BSPJI MANADO	88,55
48	539053	BSPJI PADANG	88,25
49	579357	SMTI PONTIANAK	87,75
50	579343	BDI PADANG	87,25
51	015118	BSPJI JAKARTA	87,00
52	579336	SMTI MAKASSAR	86,75

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
53	579351	APP JAKARTA	85,00
54	579362	PUSAT P3DN	84,50
55	579337	SMAK MAKASSAR	83,40
56	248628	PUSDATIN	80,00
57	619101	POLTEK BANTEN	75,00

Kepala Biro Keuangan



Abdulah